



**SALINAN**

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 70);



26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
dan  
BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

**Pasal 2**

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a.	Pendapatan Bersih	Rp1.123.014.379.268,72
b.	Belanja dan Transfer	Rp1.247.458.582.270,84
	Surplus/defisit	<hr/> Rp(124.444.203.002,12)
c.	Pembiayaan	
	- Penerimaan	Rp364.252.101.677,93
	- Pengeluaran	Rp0,00
	Pembiayaan netto	<hr/> Rp364.252.101.677,93

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp107.874.049.601,71 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan	Rp1.230.888.428.870,43
b. Realisasi	<u>Rp1.123.014.379.268,72</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp107.874.049.601,71

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp330.108.483.743,66 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja dan transfer	Rp1.577.567.066.014,50
b. Realisasi	<u>Rp1.247.458.582.270,84</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp330.108.483.743,66

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(222.234.434.141,95) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit	Rp(346.678.637.144,07)
b. Realisasi	<u>Rp(124.444.203.002,12)</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp(222.234.434.141,95)

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(17.573.464.533,86) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp346.678.637.144,07
b. Realisasi	<u>Rp364.252.101.677,93</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp(17.573.464.533,86)

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp0,00
b.	Realisasi	<u>Rp0,00</u>
	Selisih lebih/ (kurang)	Rp0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(17.573.464.533,86) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pembiayaan netto	Rp346.678.637.144,07
b.	Realisasi	<u>Rp364.252.101.677,93</u>
	Selisih lebih/ (kurang)	Rp(17.573.464.533,86)

#### Pasal 4

Uraian Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

Selisih saldo anggaran lebih awal dengan saldo anggaran lebih akhir sejumlah Rp239.807.898.675,81 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp364.252.101.677,93
b.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp364.252.101.677,93
c.	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)	Rp239.807.898.675,81
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp0,00
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp239.807.898.675,81

#### Pasal 5

Uraian Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

Surplus/defisit-LO sejumlah Rp76.464.440.367,53 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan LO	Rp1.052.981.634.961,77
b.	Beban LO	Rp977.862.008.935,24
c.	Surplus/defisit LO dari Operasi	Rp75.119.626.026,53
d.	Surplus/defisit LO dari	Rp1.344.814.341,00

	Kegiatan Non Operasional	
e.	Pendapatan Luar Biasa	Rp0,00
f.	Beban Luar Biasa	Rp0,00
g.	Surplus/ defisit LO	Rp76.464.440.367,53

#### **Pasal 6**

Uraian laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

Ekuitas akhir sejumlah Rp. Rp3.276.774.277.016,37 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp3.203.956.243.364,62
b.	Surplus/defisit LO	Rp76.464.440.367,53
c.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp(3.646.406.715,78)
d.	Ekuitas Akhir	Rp3.276.774.277.016,37

#### **Pasal 7**

Neraca per 31 Desember Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a.	Jumlah aset	Rp3.279.683.519.259,68
b.	Jumlah kewajiban	Rp2.909.242.243,31
c.	Jumlah ekuitas	Rp3.276.774.277.016,37

#### **Pasal 8**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2019	Rp364.252.101.677,93
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 240.748.737.986,50
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp(364.689.433.826,62)
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp0,00
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp(503.507.162,00)
f.	Saldo Akhir Kas di Bendahara	Rp2.849.722,00



- Penerimaan  
g. Saldo kas akhir per 31 Desember 2019 Rp239.807.898.675,81

### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- |    |               |  |
|----|---------------|--|
| a. | Lampiran I    | : Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari  |
|    | Lampiran I.1  | : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;  |
|    | Lampiran I.2  | : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;   |
|    | Lampiran I.3  | : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;   |
|    | Lampiran I.4  | : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| b. | Lampiran II   | : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;  |
| c. | Lampiran III  | : Laporan Operasional;   |
| d. | Lampiran IV   | : Laporan Perubahan Ekuitas;   |
| e. | Lampiran V    | : Neraca;  |
| f. | Lampiran VI   | : Laporan Arus Kas;  |
| g. | Lampiran VII  | : Catatan atas Laporan Keuangan;   |
| h. | Lampiran VIII | : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;  |
| i. | Lampiran IX   | : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;   |

- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### **Pasal 11**

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### **Pasal 12**

Rancangan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 31 Agustus 2020

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 31 Agustus 2020

**Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**DJAINU'DDIN NOOR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR 52**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02.40/2020**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR       TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Seruyan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran (TA) 2019 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2019.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders (antara lain masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan selama TA 2019.

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4



Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR .81**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REF	Anggaran 2019	Realisasi 2019	(%)	Realisasi 2018
1	<b>PENDAPATAN</b>	5.1.1				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.	66.449.894.273,00	32.508.779.709,74	47,49	46.849.541.357,55
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.b.	15.864.111.135,00	11.288.991.679,14	71,16	16.457.594.997,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.c.	7.443.141.653,00	7.453.171.538,00	100,13	7.529.299.395,00
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.d.	43.268.431.756,43	37.732.691.375,05	87,21	22.417.072.903,05
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>135.025.578.817,43</b>	<b>88.983.634.301,93</b>	<b>65,90</b>	<b>93.253.508.652,60</b>
8						
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	5.1.1.e.				
11	Dana Bagi Hasil Pajak		66.919.634.000,00	37.467.368.109,00	54,36	29.152.676.396,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		59.915.018.053,00	56.471.784.621,00	94,25	54.217.880.872,00
13	Dana Alokasi Umum		632.225.974.000,00	629.417.652.000,00	99,56	616.416.406.000,00
14	Dana Alokasi Khusus		132.915.842.000,00	120.786.747.188,00	90,87	186.575.296.212,00
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>		<b>893.976.468.053,00</b>	<b>844.143.551.918,00</b>	<b>94,43</b>	<b>886.362.459.480,00</b>
16						
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	5.1.1.f.				
18	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Penyesuaian		50.027.932.000,00	37.543.953.772,00	75,05	9.250.000.000,00
20	Dana Desa		101.114.450.000,00	99.900.323.600,00	98,80	82.532.152.804,00
21	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya</b>		<b>151.142.382.000,00</b>	<b>137.444.277.372,00</b>	<b>90,94</b>	<b>91.782.152.804,00</b>
22						
23	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	5.1.1.g.				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		30.000.000.000,00	31.828.235.676,79	106,09	35.619.771.733,53
25	Pendapatan Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00
26	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>		<b>30.000.000.000,00</b>	<b>31.828.235.676,79</b>	<b>106,09</b>	<b>37.269.771.733,53</b>
27	<b>Total Pendapatan Transfer</b>		<b>1.075.118.850.053,00</b>	<b>1.013.416.064.966,79</b>	<b>94,26</b>	<b>1.015.414.384.017,53</b>
28						

NO.	URAIAN	REF	Anggaran 2019	Realisasi 2019	(%)	Realisasi 2018
29	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>5.1.1.h.</b>				
30	Pendapatan Hibah		20.744.000.000,00	20.614.680.000,00	99,38	17.737.720.000,00
31	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	175.586.572,00
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		20.744.000.000,00	20.614.680.000,00	99,38	17.913.306.572,00
34	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.230.888.428.870,43</b>	<b>1.123.014.379.288,72</b>	<b>91,24</b>	<b>1.128.581.199.242,13</b>
35						
36	<b>BELANJA</b>	<b>5.1.2</b>				
37	<b>BELANJA OPERASI</b>					
38	Belanja Pegawai	5.1.2.a.	408.171.480.127,57	380.619.584.631,32	93,25	331.707.551.892,73
39	Belanja Barang Jasa	5.1.2.b.	505.031.159.935,22	244.184.069.585,60	48,35	179.780.383.490,75
40	Bunga	5.1.2.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Subsidi	5.1.2.d.	2.000.000.000,00	1.711.438.202,00	85,57	0,00
42	Hibah	5.1.2.e.	77.304.203.948,83	61.268.301.472,30	79,24	49.737.771.597,00
43	Bantuan Sosial	5.1.2.f.	10.930.500.000,00	10.223.736.460,00	93,53	3.746.476.765,00
44	Jumlah Belanja Operasi		1.003.437.344.011,42	697.995.130.351,22	69,56	564.972.183.745,48
45						
46	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.g.</b>				
47	Belanja Tanah		30.000.000,00	0,00	0,00	56.180.500,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin		76.647.327.107,92	70.512.082.806,26	92,00	24.282.874.440,30
49	Belanja Gedung dan Bangunan		71.545.108.024,00	69.240.183.004,93	96,78	68.416.187.131,00
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		225.043.061.489,05	217.282.518.918,43	96,55	218.149.156.546,00
51	Belanja Aset Tetap Lainnya		8.355.371.067,00	7.916.924.566,00	94,75	3.908.989.158,02
52	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Jumlah Belanja Modal		381.620.867.687,97	364.951.709.285,62	95,63	314.813.389.775,32
54						
55	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.1.2.h.</b>				
56	Belanja Tak Terduga		3.427.650.043,11	0,00	0,00	0,00
57	Jumlah Belanja Tak Terduga		3.427.650.043,11	0,00	0,00	0,00
58	<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.388.485.861.742,50</b>	<b>1.062.946.839.648,84</b>	<b>76,55</b>	<b>879.785.573.520,80</b>
59						
60	<b>TRANSFER</b>	<b>5.1.2.i.</b>				
61	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>					
62	Bagi Hasil Pajak		8.431.400.540,00	4.775.807.022,00	56,64	4.673.139.908,00
63	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa		8.431.400.540,00	4.775.807.022,00	56,64	4.673.139.908,00
66	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>					
66	Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah lainnya		245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00
67	Bantuan Keuangan Pemerintah Desa		179.677.214.732,00	178.801.563.602,00	99,51	154.025.606.300,00
68	Bantuan Keuangan Lainnya		727.569.000,00	669.372.000,00	94,75	718.952.000,00
69	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		1.049.246.214,00	1.082.635.602,00	103,19	917.879.300,00

NO.	URAIAN	REF	Anggaran 2019	Realisasi 2019	(%)	Realisasi 2018
70						
71	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>1.577.567.066.014,50</b>	<b>1.247.458.582.270,84</b>	<b>79,07</b>	<b>1.039.448.271.728,80</b>
72						
73	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(346.678.637.144,07)</b>	<b>(124.444.203.002,12)</b>	<b>35,90</b>	<b>87.132.927.513,33</b>
74						
75	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.3</b>				
76						
77	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.3.a.</b>				
78	Penggunaan SILPA		346.678.637.144,07	364.252.101.677,93	105,07	283.619.174.164,60
79	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
80	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
82	<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>346.678.637.144,07</b>	<b>364.252.101.677,93</b>	<b>105,07</b>	<b>283.619.174.164,60</b>
83						
84	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.3.b</b>				
85	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	6.500.000.000,00
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
90	<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000.000,00</b>
91	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>		<b>346.678.637.144,07</b>	<b>364.252.101.677,93</b>	<b>105,07</b>	<b>277.119.174.164,60</b>
92	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>			<b>236.807.898.675,81</b>		<b>364.252.101.677,93</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	2019	2018
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	364.252.101.677,93	283.619.174.164,60
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	364.252.101.677,93	283.619.174.164,60
3	Subtotal		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	239.807.898.675,81	364.252.101.677,93
5	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
6	Lain-lain		0,00	0,00
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir (3 + 4 + 5)	5.2.4	239.807.898.675,81	364.252.101.677,93

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.*

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

No	URAIAN	Ref	TAHUN 2020	Tahun 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	Lainnya					
78	Jumlah Defisit Non Operasional		0,00	780.845.427,00	-780.845.427,00	(100,00)
79	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.344.814.341,00	-780.845.427,00	2.105.459.768,00	(276,80)
80	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		76.464.440.367,53	131.428.383.655,96	-54.963.943.288,43	(41,82)
81						
82	<b>POS LUAR BIASA</b>	5.4.4				
83	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>	5.4.4.a.				
84	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
85	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
86						
87	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	5.4.4.b.				
88	Beban Luar Biasa		0,00	51.890.003.846,84	-51.890.003.846,84	(100,00)
89	Jumlah Beban Luar Biasa		0,00	51.890.003.846,84	-51.890.003.846,84	(100,00)
90	<b>POS LUAR BIASA</b>		0,00	-51.890.003.846,84	51.890.003.846,84	(100,00)
91						
92	<b>SURPLUS/DEFISIT T-LO</b>		76.464.440.367,53	79.538.379.809,12	-3.073.939.441,59	(3,86)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	2019	2018
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	3.203.956.243.364,62	3.108.884.285.432,02
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	76.464.440.367,53	79.538.379.809,12
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	(3.846.408.715,78)	15.533.578.123,48
	KOREKSI PERSEDIAAN		(33.064.870,70)	0,00
	KOREKSI ASET TETAP TANAH		0,00	(4.457.489,45)
	KOREKSI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN		0,00	(1.372.913.000,00)
	KOREKSI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN		172.830.000,00	198.264.546,00
	KOREKSI ASET TETAP JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		(82.702.383,00)	(2.160.159.500,00)
	KOREKSI ASET TETAP LAINNYA		0,00	10.430.000,00
	KOREKSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		0,00	140.093.480,00
	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP		(39.597.454.653,94)	0,00
	KOREKSI ASET TAK BERWUJUD		0,00	44.829.288.819,00
	KOREKSI AKUMULASI AMORTISASI		1.137.194.584,68	0,00
	KOREKSI ASET LAIN-LAIN		(4.634.405.597,00)	571.499.586,35
	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN		(3.991.290.878,05)	20.680.706.140,87
	KOREKSI KAS DI BENDAHARA SEKOLAH		(55.400.000,00)	0,00
	KOREKSI TAGIHAN TPI TGR		(1.856.720,00)	0,00
	KOREKSI KAS JKN		15.196.113,60	0,00
	KOREKSI SALDO AWAL UTANG		3.929.023,47	0,00
	KOREKSI PENGHAPUSAN ASET LAINNYA		(74.800.000,00)	0,00
	KOREKSI PENCATATAN TANAH		0,00	(47.359.174.459,29)
	KOREKSI EKUITAS BARANG EKSTRA		(308.725.410,00)	0,00
	KOREKSI PENYISIHAN TGR		43.804.144.075,18	0,00
	KOREKSI EKUITAS		0,00	0,00
4	EKUITAS AKHIR	5.6.4	3.276.774.277.016,37	3.203.956.243.364,62

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	2019	2018
1	<b>ASET</b>	<b>5.3.1</b>		
2				
3	<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.3.1.a.</b>		
4	Kas di Kas Daerah		233.101.103.566,48	360.859.277.126,44
5	Kas di Bendahara Penerimaan		2.849.722,00	10.254.452,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran		994.904,00	0,00
7	Kas di Bendahara Kapitasi JKN		761.664.354,71	1.281.651.794,38
8	Kas di Bendahara BOS APBN		903.133.281,62	886.791.903,11
9	Kas di Bendahara BLUD		4.327.533.609,00	0,00
10	Kas Lainnya		0,00	0,00
11	Piutang Pajak		7.700.013.998,61	6.883.927.851,00
12	Piutang Retribusi		318.061.887,00	4.519.590.154,00
13	Piutang Lain Lain PAD yang Sah		1.862.454.526,54	816.732.944,82
14	Piutang Transfer		11.032.184.883,39	8.397.481.260,62
15	Penyisihan Piutang		(4.035.548.237,05)	(3.622.343.102,09)
16	Beban Dibayar Dimuka		140.958.904,11	126.397.314,05
17	Persediaan		41.693.800.806,03	35.853.292.608,25
18	<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>297.609.206.206,44</b>	<b>416.013.054.308,58</b>
19				
20	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.1.b.</b>		
21	Investasi Nonpermanen			
22	Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00
23	Investasi Nonpermanen Lainnya		0,00	0,00
24	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Investasi Permanen			
26	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah		56.827.777.604,00	55.282.963.263,00
27	Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
28	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>		<b>56.827.777.604,00</b>	<b>55.282.963.263,00</b>
29	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>56.827.777.604,00</b>	<b>55.282.963.263,00</b>
30				
31	<b>ASET TETAP</b>	<b>5.5.1.c.</b>		
32	Tanah		199.911.606.997,26	199.852.137.537,00
33	Peralatan dan Mesin		378.567.489.672,02	316.010.052.143,83
34	Gedung dan Bangunan		854.460.724.153,79	788.456.356.446,69
35	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		2.771.783.471.529,83	2.543.740.279.924,43
36	Aset Tetap Lainnya		27.858.155.400,02	15.435.120.734,02
37	Konstruksi dalam Pengerjaan		114.649.268.306,68	109.921.410.831,00
38	Akumulasi Penyusutan		(1.515.950.800.340,02)	-1.281.033.948.580,00
39	<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>2.831.079.915.719,58</b>	<b>2.682.381.409.036,97</b>
40				
41	<b>DANA CADANGAN</b>			
42	Dana Cadangan		0,00	0,00
43	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44				
45	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.3.1.d.</b>		
46	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.d.1)	710.619.238,00	1.214.126.400,00
47	Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.d.2)	1.703.618.475,00	1.703.618.475,00
48	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.d.3)	49.757.492.036,03	49.828.671.689,78
49	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.d.4)	0,00	(43.804.144.075,18)



No.	Uraian	Ref	2019	2018
50	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
51	Aset Tak Berwujud	5.3.1.d.5)	9.997.613.250,00	16.572.638.250,00
52	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.d.6)	(2.903.983.404,88)	(3.430.487.461,21)
53	Aset Lain-Lain	5.3.1.d.7)	78.518.998.396,00	74.094.018.281,00
54	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.d.8)	(43.417.739.262,49)	(37.023.212.458,27)
55	Jumlah Aset Lainnya		94.368.619.729,66	89.155.229.101,12
56				
57	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>3.279.683.519.259,68</b>	<b>3.222.832.655.709,67</b>
58				
59	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.3.2</b>		
60				
61	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.a.	0,00	0,00
63	Utang Kepada Pihak Ketiga	5.3.2.b.	727.254.238,00	4.648.783.850,00
64	Utang Bunga	5.3.2.c.	0,00	0,00
65	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
66	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.d.	930.289,20	98.297.262,50
67	Utang Beban	5.3.2.e.	2.181.057.716,11	14.129.331.232,55
68	Utang Jangka Pendek Lainnya			
69	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.909.242.243,31	18.876.412.345,05
70				
71	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
72	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0,00	0,00
73	Utang Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
74	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
75	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>2.909.242.243,31</b>	<b>18.876.412.345,05</b>
	RK PPKD		0,00	0,00
76	EKUITAS/EKUITAS DANA	5.3.3.	3.276.774.277.016,37	3.203.956.243.364,62
	<b>JUMLAH EKUITAS/EKUITAS DANA</b>		<b>3.276.774.277.016,37</b>	<b>3.203.956.243.364,62</b>
77	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>3.279.683.519.259,68</b>	<b>3.222.832.655.709,67</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 dan 2018**  
**METODE LANGSUNG**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	2019	2018
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		32.508.779.709,74	46.849.541.357,55
4	Penerimaan Retribusi Daerah		11.288.991.679,14	16.457.594.997,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7.453.171.538,00	7.529.299.395,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		37.470.415.906,05	21.187.171.805,05
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		37.467.368.108,00	29.152.876.398,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		56.471.784.621,00	54.217.880.872,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		629.417.652.000,00	616.416.408.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		120.786.747.188,00	186.575.296.212,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		37.543.953.772,00	9.250.000.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		0,00	0,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		31.828.235.676,79	35.619.771.733,53
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Hibah		20.614.680.000,00	17.737.720.000,00
16	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
17	Penerimaan Lainnya		0,00	175.586.572,00
18	Penerimaan dari Bantuan Keuangan		0,00	1.650.000.000,00
19	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>1.022.851.780.199,72</b>	<b>1.042.819.146.340,13</b>
20				
21	<b>Arus Keluar Kas</b>			
22	Pembayaran Pegawai		380.619.584.631,32	331.707.551.892,73
23	Pembayaran Barang		244.184.089.585,60	179.780.393.490,75
24	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
25	Pembayaran Subsidi		1.711.438.202,00	0,00
26	Pembayaran Hibah		61.256.301.472,30	49.737.771.597,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial		10.223.736.460,00	3.746.476.765,00
28	Pembayaran Tak Terduga		0,00	0,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		4.775.807.022,00	4.673.136.906,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
32	Pembayaran Bantuan Keuangan		78.642.732.840,00	71.002.523.700,00
33	Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya		689.372.000,00	718.952.000,00
34	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>782.103.042.213,22</b>	<b>641.366.799.353,48</b>
35				
36	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>240.748.737.986,50</b>	<b>401.452.345.986,65</b>
37				
38	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.2</b>		
39	<b>Arus Masuk Kas</b>			
40	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
41	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
42	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	1.229.901.098,00
43	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
44	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
45	Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
46	Penjualan Aset Lainnya		262.275.469,00	0,00
47	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00

No.	Uraian	Ref	2019	2018
48	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
49	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>262.275.489,00</b>	<b>1.229.901.088,00</b>
50				
51	<b>Arus Keluar Kas</b>			
52	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
53	Perolehan Tanah		0,00	58.180.500,00
54	Perolehan Peralatan dan Mesin		70.512.082.806,26	24.282.874.440,30
55	Perolehan Gedung dan Bangunan		69.240.183.004,93	68.416.187.131,00
56	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		217.282.518.918,43	218.149.158.546,00
57	Perolehan Aset Tetap Lainnya		7.916.924.566,00	3.908.989.158,02
58	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
59	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	8.500.000.000,00
60	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
61	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>364.951.709.295,62</b>	<b>321.313.389.775,32</b>
62				
63	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan</b>		<b>(384.689.433.826,62)</b>	<b>(320.083.488.677,32)</b>
64				
65	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>	<b>5.5.3</b>		
66	<b>Arus Masuk Kas</b>			
67	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
70	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
71	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72				
73	<b>Arus Keluar Kas</b>			
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -- Obligasi		0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -- Lainnya		0,00	0,00
80	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
81	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
82	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
83				
84	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</b>	<b>5.5.4</b>		
86	<b>Arus Masuk Kas</b>			
87	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		58.914.532.476,63	65.907.574.391,00
88	Penerimaan Dana Desa		99.600.323.600,00	82.532.153.310,61
89	Koreksi Kurang Catat Saldo atas Kas Bendahara Penerimaan SKPD			
90	Koreksi Kurang Catat Saldo atas Kas Bendahara Pengeluaran SKPD			
91	Koreksi Kurang Catat Saldo di Kas Daerah			
92	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>158.514.856.076,63</b>	<b>148.439.727.701,61</b>
93	<b>Arus Keluar Kas</b>			
94	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		58.914.532.476,63	65.907.574.391,00
95	Penyaluran Dana Desa		100.403.830.762,00	83.268.082.600,00
96	Sisa Kas di Bendahara Penerimaan SKPD		0,00	0,00
97	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD		0,00	0,00
98	Koreksi Pencatatan Kas yang dibatasi penggunaannya		0,00	508,61
99	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>159.318.363.238,63</b>	<b>149.175.857.497,61</b>
100				
101	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non</b>		<b>(503.507.162,00)</b>	<b>-735.929.796,00</b>

No.	Uraian	Ref	2019	2018
	<b>Anggaran</b>			
102				
103	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>5.5.5</b>	<b>(124.444.203.002,12)</b>	<b>80.632.927.513,33</b>
104	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		384.252.101.677,93	283.619.174.164,80
105	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		239.807.898.675,81	364.252.101.677,93
106	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		233.101.103.566,48	360.859.277.128,44
107	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		2.849.722,00	10.254.452,00
108	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		994.904,00	0,00
109	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		903.133.281,62	886.791.903,11
110	Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN		761.864.354,71	1.281.851.794,38
111	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD		4.327.533.609,00	0,00
112	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		710.619.238,00	1.214.126.400,00
113	Saldo Akhir Kas		239.807.898.675,81	364.252.101.677,93

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.*

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan TA 2019 disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4616);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);



- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 19);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79);
- q. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 2);
- s. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 41).

### 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

#### **Bab I. Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

#### **Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1 Ekonomi makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

#### **Bab III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah**

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **Bab IV. Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

**Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

**5.1 Laporan Realisasi Anggaran**

5.1.1 Pendapatan LRA

5.1.2 Belanja LRA

5.1.3 Pembiayaan LRA

**5.2 Laporan Perubahan SAL**

5.2.1 SAL Awal

5.2.2 Penggunaan SAL

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

5.2.4 SAL Akhir

**5.3 Neraca**

5.3.1 Aset

5.3.2 Kewajiban

5.3.3 Ekuitas Dana

**5.4 Laporan Operasional**

5.4.1 Pendapatan LO

5.4.2 Beban LO

5.4.3 Kegiatan Non Operasional

5.4.4 Pos Luar Biasa

**5.5 Laporan Arus Kas**

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran

5.5.5 Perhitungan akhir kas per 31 Desember 2019

**5.6 Laporan Perubahan Ekuitas**

5.6.1 Ekuitas Awal

5.6.2 Ekuitas Akhir

**Bab VI. Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan**

**Bab VII. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (Subsequent Event)**

**Bab VIII. Penutup**

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBLIJAKAN KEUANGAN DAN**  
**PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemerintah Daerah) Tahun 2019 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan, yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,19 %
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,49 %.
- c. Gini Ratio sebesar 0,31%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 67,57
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,19%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 0,16%%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp6.048,86 milyar.

**2.1.1 Tingkat Kemiskinan**

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

**Tabel 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Seruyan**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Seruyan (%)	7,43	7,19	(0,24)
2	Kabupaten Seruyan (Ribu Orang)	14,56	14,66	0,10
3	Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5,17	4,98	(0,19)
4	Nasional (%)	9,82	9,41	(0,41)
5	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	14	14	-
6	Peringkat Nasional	157	157	-

*Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan*

Persentase penduduk miskin Kabupaten Seruyan pada Tahun 2018 sebesar 7,43% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2019 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 7,19% dan diharapkan pada tahun 2020 terus meningkat hingga angka 6%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Seruyan masih di atas provinsi dan di bawah nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

**Tabel 2.1.1.1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Seruyan**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Seruyan	1,09	1,26	0,17
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah	0,81	0,70	(0,11)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,55	(0,16)
4.	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	13	14	1
5	Peringkat Nasional	162	230	68

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan

**Tabel 2.1.1.2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Seruyan**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Seruyan	0,27	0,31	0,04
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah	0,21	0,14	(0,07)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,44	0,37	(0,04)
4.	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	13	14	1
5	Peringkat Nasional	182	259	77

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan

## 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Seruyan Tahun 2019 adalah sebesar 4,49%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Seruyan**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Seruyan (%)	4,40	4,49	0,09
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Kalimantan Tengah (%)	4,01	4,10	0,09
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,34	5,28	(0,06)
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	11	10	1
5	Peringkat Nasional	287	302	15

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Seruyan Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,49%, sedangkan TPT pada Tahun 2018 adalah sebesar 4,40% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2018. Dengan demikian TPT Kabupaten Seruyan masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 4,10% pada Tahun 2019 dan sebesar 4,01% pada tahun 2018.

### 2.1.3 Indek Gini (*Gini Ratio*)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan. Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Seruyan Tahun 2019 adalah sebesar 0,289 poin, sebagaimana dijelaskan Tabel 2.1.3.

Tabel 2.1.3 Gini Ratio Kabupaten Seruyan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kabupaten Seruyan	0,280	0,289	0,009
2	Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	0,342	0,336	(0,006)
3	Tingkat Nasional	0,389	0,362	(0,007)
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	2	3	1
5	Peringkat Nasional			

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan

### 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu:

- Rendah ( $< 60$ )
- Sedang ( $60 \leq IPM < 70$ )
- Tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ )
- Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Seruyan Tahun 2019 adalah sebesar 67,57 poin dengan kategori sedang, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kabupaten Seruyan	67,04	67,57	0,53
2	Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	70,42	70,91	0,49
3	Tingkat Nasional	71,39	71,92	0,53
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	14	14	-
5	Peringkat Nasional	331	338	7

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Seruyan



Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Seruyan Tahun 2019 adalah sebesar 67,57 poin, dibandingkan Tahun 2018 sebesar 67,04 poin mengalami kenaikan sebesar 0,53 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH) atau harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. IPM di Kabupaten Seruyan pada saat ini berada pada urutan 14 dari 14 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

### 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seruyan

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2019
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	5465,51	5750,25	6048,86	100428,7	8.564.866,606,2
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,18	5,21	5,19	6,2	5,01
3	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	14	14	14		
4	Peringkat Nasional (Indonesia)				7	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan

Pada periode Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Seruyan sebesar 5,21% dan pada kurun waktu Tahun 2018 s.d. 2019 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Seruyan sebesar 5,19%.

### 2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Seruyan dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Gallopning Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30 s.d. 100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.



### 2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Seruyan.

Struktur perekonomian Kabupaten Seruyan.dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.7 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha PDRB	Dalam Jutaan Rupiah		
	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.716.340,20	2.828.748,80	2.998.624,90
Pertambangan dan Penggalian	49.411,60	53.201,60	57.952,70
Industri Pengolahan	2.478.515,90	2.603.708,00	2.730.288,40
Pengadaan Listrik dan Gas	1.290,60	1.432,70	1.527,40
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.111,30	1.297,50	1.406,60
Konstruksi	684.523,70	723.065,00	767.359,20
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	471.717,10	537.328,00	583.959,80
Transportasi dan Pergudangan	153.205,40	178.090,90	192.316,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	90.444,60	97.190,60	103.130,60
Informasi dan Komunikasi	49.000,20	53.133,60	57.919,80
Jasa Keuangan dan Asuransi	70.895,50	74.550,90	80.419,10
Real Estate	113.296,60	126.135,20	134.959,60
Jasa Perusahaan	799,60	877,00	939,70
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	286.388,90	322.164,60	355.535,60
Jasa Pendidikan	249.593,50	274.790,50	299.875,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	105.787,40	118.346,90	127.157,80
Jasa Lainnya	63.294,10	67.671,50	71.539,10
<b>PDRB</b>	<b>7.585.616,30</b>	<b>8.061.733,50</b>	<b>8.564.911,40</b>

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013 s.d. 2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seruyan memuat program dan kegiatan yang merupakan hasil kajian yang mendalam tentang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. RPJMD juga disusun dengan mengacu pada RPJP Kabupaten Seruyan, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah /Renstra Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPJP Nasional, dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat termasuk sasaran pembangunan *Millentium Development Goals* (MDGs). Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Implementasi program dan kegiatan tersebut membutuhkan anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan setiap tahun.

Dalam tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Oleh karenanya stabilitas ekonomi makro akan dapat dicapai apabila hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal serta tabungan dan investasi. Perekonomian yang tidak stabil akan dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan akan menyulitkan masyarakat baik swasta maupun rumah tangga. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli (*purchasing power*) masyarakat akan semakin rendah. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Seruyan menerapkan kebijakan umum bidang keuangan daerah sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya sektor usaha swasta dalam semua ukuran, baik menengah maupun kecil yang akan berfungsi sebagai subyek pajak dan retribusi baru;
- b. Meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dengan cara:
  - 1) Mengusulkan rencana program dan kegiatan untuk setiap bidang pemerintahan yang dapat disampaikan kepada pemerintah melalui forum Musrenbang Provinsi dan Nasional,
  - 2) Mendorong pimpinan SKPD untuk melakukan koordinasi dengan Kementrian Teknis di tingkat pusat,
  - 3) Menjalin hubungan kerja dan komunikasi yang intensif dengan para pelaku ekonomi daerah dan nasional untuk melakukan investasi di Kabupaten Seruyan,
  - 4) Menerbitkan profil investasi pada berbagai sektor potensial untuk disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait secara periodik.
- c. Memberikan kemudahan perizinan kepada investor yang terkait untuk penanaman modal di Kabupaten Seruyan,
- d. Penajaman skala prioritas program dan kegiatan yang paling banyak memberikan kontribusi kepada upaya pencapaian visi dan misi daerah.

### **2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retibusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya.

Untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui penerapan kebijakan pendapatan antara lain:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan melalui upaya pemutakhiran data sumber-sumber pendapatan daerah;

- b. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD agar menghasilkan penerimaan,
- c. Menciptakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya peningkatan sumber-sumber penerimaan baru;
- d. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan dan perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan sumber-sumber pendapatan daerah;
- e. Perbaikan dan pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan publik; dan
- f. Menerapkan norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja dengan memberikan penekanan pada aspek-aspek transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektivitas.

### **2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja disusun dengan pendekatan anggaran belanja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur APBD Kabupaten Seruyan dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dalam mewujudkan visi dan misi daerah yang dianggarkan pada belanja SKPD.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, maka Kebijakan Umum Pengelolaan Belanja sepanjang periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terciptanya APBD yang semakin sehat. Ini harus diwujudkan melalui penyehatan rasio alokasi antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung terutama untuk menyehatkan rasio antara gaji dan upah dengan belanja barang, jasa dan modal. Besaran belanja honor dan upah bagi tiap-tiap SKPD diupayakan agar berada dalam keseimbangan yang rasional dengan belanja modal, barang dan jasa serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Menjamin dipertahankannya kesinambungan anggaran; dan
- c. Memberikan prioritas yang lebih tinggi bagi program yang menunjang upaya pencapaian visi misi daerah.

### **2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Untuk mengatasi permasalahan umum yang sering terjadi dalam bidang pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Seluruh SKPD wajib menyusun rencana pagu kebutuhan anggaran untuk setiap kegiatan dengan mengacu pada Standar Analisa Belanja dan Harga Satuan Setempat,
- b. Penggunaan SILPA dalam bentuk pemberian Anggaran Belanja Tambahan diutamakan kepada SKPD yang mengajukan rencana tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan umum yang terukur, bukan untuk penambahan belanja tidak langsung.

### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah

Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 secara umum sebagaimana tabel berikut:

**Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah Per SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
Dinas Pendidikan	20.000.000,00	20.068.320,00	68.320,00	100,34
Dinas Kesehatan	2.918.619.998,00	3.994.350.757,60	1.075.730.759,60	136,86
Rumah Sakit Umum Daerah	12.554.148.087,00	9.293.000.664,00	(3.261.147.423,00)	74,02
Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	9.463.905.735,00	8.881.878.605,00	(582.027.130,00)	93,85
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.988.927.000,00	383.840.147,30	(3.605.086.852,70)	9,62
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	117.000.000,00		(117.000.000,00)	-
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.500.000,00	2.191.600,00	(4.308.400,00)	33,72
Dinas Perhubungan	681.560.000,00	414.369.000,00	(267.191.000,00)	60,80
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	145.000.000,00	131.315.118,00	(13.684.882,00)	90,56
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	247.550.000,00	159.060.000,00	(88.490.000,00)	64,25
Dinas Perikanan	69.441.400,00	67.553.460,00	(1.887.940,00)	97,28
PPKD	1.129.029.306.002,93	1.064.769.752.859,68	(64.259.553.143,25)	94,31
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	530.362.909,00	262.275.469,00	(268.087.440,00)	49,45
Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah	70.279.635.898,50	33.955.876.844,89	(36.323.759.053,61)	48,32
Sekretariat Daerah	165.000.000,00	231.240.000,00	66.240.000,00	140,15
Kecamatan Seruyan Tengah	174.864.840,00	217.256.388,00	42.391.548,00	124,24
Kecamatan Danau Sembuluh	22.500.000,00		(22.500.000,00)	-
Kecamatan Hanau	115.515.000,00	109.209.773,91	(6.305.226,09)	94,54
Kecamatan Seruyan Hilir	47.500.000,00	26.807.877,34	(20.692.122,66)	56,44



Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
Kecamatan Seruyan Hulu	71.000.000,00	45.399.936,00	(25.600.064,00)	63,94
Kecamatan Batu Ampar	73.250.000,00	16.393.000,00	(56.857.000,00)	22,38
Kecamatan Seruyan Raya	44.500.000,00	13.862.647,00	(30.637.353,00)	31,15
Kecamatan Danau Seluluk	33.342.000,00	12.349.250,00	(20.992.750,00)	37,04
Kecamatan Seruyan Hillr Timur	27.000.000,00	6.327.551,00	(20.672.449,00)	23,44
Kecamatan Suling Tambun	62.000.000,00		(62.000.000,00)	-
<b>JUMLAH</b>	<b>1.230.888.428.870,43</b>	<b>1.123.014.379.268,72</b>	<b>(107.874.049.601,71)</b>	<b>91,24</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa target pendapatan sebesar Rp1.230.888.428.870,43 terealisasi sebesar Rp1.123.014.379.268,72 atau 91,24%, dengan demikian pencapaian target pendapatan daerah telah berhasil karena perencanaan anggaran pendapatan yang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan telah dapat dicapai.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Seruyan melakukan intensifikasi pemungutan pendapatan, penggalian potensi sumber pendapatan, melakukan pengawasan untuk memperkecil adanya kebocoran dan meningkatkan koordinasi baik dengan pemerintah provinsi maupun dengan tingkat pusat agar kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan sesuai target yang ingin dicapai.

Faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Tahun Anggaran 2019 antara lain :

a. Masalah Pajak Hotel

- 1) Penetapan target penerimaan pajak hotel yang belum optimal.
- 2) Pajak hotel dipungut belum melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah
- 3) Perhitungan pajak hotel yang dibayarkan oleh subyek pajak belum berdasarkan perhitungan khusus pajak sesuai dengan penerimaan subyek pajak.
- 4) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak hotel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Kabupaten Seruyan.
- 5) Wajib Pajak (Pengusaha Hotel) cenderung memanipulasi data omset usahanya untuk dapat menghindari kewajiban membayar pajak hotel sehingga jumlah nilai pajak yang disetorkan ke kas daerah menjadi menurun dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- 6) Kurang tegasnya penegakan hukum peraturan daerah di wilayah Kabupaten Seruyan yang belum dapat memberikan efek jera bagi para penunggak pajak sehingga terjadi kecemburuan sosial di kalangan masyarakat yang sadar pajak dan yang tidak taat pajak.

b. Masalah Pajak Restoran

- 1) Penetapan target penerimaan pajak restoran yang belum optimal.
- 2) Pajak restoran di pungut belum melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah
- 3) Perhitungan pajak restoran yang dibayarkan oleh subyek pajak belum berdasarkan perhitungan khusus pajak sesuai dengan penerimaan subyek pajak.
- 4) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak restoran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Kabupaten Seruyan.
- 5) Wajib Pajak (Pengusaha Restoran) cenderung memanipulasi data omset usahanya untuk dapat menghindari kewajiban membayar pajak restoran

sehingga jumlah nilai pajak yang disetorkan ke kas daerah menjadi menurun dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

- 6) Kurang tegasnya penegakan hukum peraturan daerah di wilayah Kabupaten Seruyan yang belum dapat memberikan efek jera bagi para penunggak pajak sehingga terjadi kecemburuan sosial di kalangan masyarakat yang sadar pajak dan yang tidak taat pajak.
- c. Masalah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan
- 1) Sebagian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dapat diserahkan kepada Wajib Pajak dikarenakan Obyek Pajak tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya (Wajib Pajak).
  - 2) Ada beberapa SPPT yang diterbitkan ganda, tidak ditemukannya letak (lokasi) obyek yang tertera pada SPPT PBB, banyaknya data yang terbit pada SPPT PBB tidak sesuai dengan data Obyek Pajak sebenarnya, sehingga menghambat proses penagihan.
  - 3) Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada SPPT PBB sektor pedesaan/perkotaan yang tinggi di beberapa daerah tidak sesuai dengan NJOP sebenarnya, serta perbedaan NJOP antara Wajib Pajak satu dengan yang lainnya dalam satu wilayah sehingga mengakibatkan kecemburuan antara wajib pajak.
  - 4) Ada beberapa desa yang mengalami kesulitan dalam penyeteroran PBB dikarenakan letak bank persepsi yang jauh, dan terkendala oleh sarana transportasi yang terbatas, sehingga menghambat dalam proses penerimaan serta pemungutan PBB.
  - 5) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya PBB dan kebiasaan menunda pembayaran Pajak dengan alasan yang tidak jelas, serta kebiasaan Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB apabila ada urusan yang berkaitan dengan perizinan dan surat menyurat.
  - 7) Belum Optimalnya pelaksanaan Validasi Data Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan.
- d. Masalah Pajak Sarang Burung Walet belum dikelola dengan baik
- 1) Pembangunan bangunan usaha walet belum semuanya dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan.
  - 2) Kurang tegasnya penegakan hukum Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Seruyan yang belum dapat memberikan efek jera bagi para penunggak pajak.
- e. Masalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Pasar
- 1) Kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Kabupaten Seruyan.
  - 2) Keterbatasan jumlah SDM (jumlah petugas penagih) dalam melaksanakan pemungutan retribusi yang dilaksanakan setiap hari, sehingga penagihan retribusi menjadi kurang maksimal.
  - 3) Kurang tegasnya penegakan hukum peraturan daerah di wilayah Kabupaten Seruyan yang belum dapat memberikan efek jera bagi para penunggak retribusi sehingga terjadi kecemburuan sosial di kalangan masyarakat yang sadar retribusi dan yang tidak taat retribusi.
- f. Masalah Retribusi Pengendalian Menara Telkomsel
- 1) Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telkomsel belum menjadi target pendapatan daerah.
  - 2) Terdapat beberapa menara Telekomunikasi yang dalam mendirikan bangunannya tidak memiliki IMB.



- 3) Kurangnya Pemahaman SDM Pengelola Pajak dan Retribusi.
- 4) Kurang tegasnya penegakan hukum peraturan daerah di wilayah Kabupaten Seruyan.

### 2.3.2 Kinerja Belanja Daerah

Kinerja Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan secara umum Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tabel-tabel berikut.

Capaian target kinerja berdasarkan urusan, baik Belanja Tak Langsung maupun Belanja Langsung sebagaimana tabel berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
Dinas Pendidikan	210.853.987.503,17	197.299.678.983,57	(13.554.308.519,60)	93,57
Dinas Kesehatan	91.816.562.688,44	74.817.280.280,61	(16.999.282.407,83)	81,49
Rumah Sakit Umum Daerah	41.557.308.759,68	40.438.526.109,05	(1.118.782.650,63)	97,31
Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	33.023.860.804,72	31.165.801.119,35	(1.858.059.685,37)	94,37
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	287.185.245.222,78	272.264.168.984,41	(14.921.076.238,37)	94,80
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	22.632.318.929,73	21.735.913.723,00	(896.405.206,73)	96,04
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.486.058.862,38	12.904.925.547,00	(581.133.315,38)	95,69
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas	6.362.222.435,25	6.213.125.954,00	(149.096.481,25)	97,66
Dinas Sosial	7.475.450.570,15	6.983.903.911,00	(491.546.659,15)	93,42
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.698.382.426,24	6.335.661.789,00	(362.720.637,24)	94,58
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.004.582.106,00	8.378.587.283,00	(2.625.974.823,00)	76,14
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	26.975.235.166,72	25.514.469.949,00	(1.460.765.217,72)	94,58
Dinas Lingkungan Hidup	235.871.940.284,61	12.066.915.900,28	(223.805.024.384,33)	5,12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.074.550.996,15	7.243.308.455,00	(831.242.541,15)	89,71
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.769.709.169,98	7.995.161.629,00	(774.547.540,98)	91,17
Dinas Perhubungan	14.992.621.412,90	12.412.986.041,00	(2.579.635.371,90)	82,79
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	9.615.212.541,53	8.404.050.916,00	(1.211.161.625,53)	87,40
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	27.862.009.767,03	27.214.350.007,04	(647.659.759,99)	97,68
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.248.371.146,55	5.922.697.830,00	(325.673.316,55)	94,79
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	12.160.588.986,73	11.465.719.983,00	(694.869.003,73)	94,29
Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan	5.595.870.580,90	4.972.831.093,25	(623.039.487,65)	88,87
Dinas Perikanan	21.451.231.805,00	20.635.966.665,00	(815.265.140,00)	96,20
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.735.829.054,78	11.147.804.030,00	(2.588.025.024,78)	81,16
PPKD	218.696.968.015,11	207.314.166.986,00	(11.382.801.029,11)	94,80
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.159.196.617,60	25.341.594.217,20	(6.817.602.400,40)	78,80

- 3) Kurangnya Pemahaman SDM Pengelola Pajak dan Retribusi.
- 4) Kurang tegasnya penegakan hukum peraturan daerah di wilayah Kabupaten Seruyan.

### 2.3.2 Kinerja Belanja Daerah

Kinerja Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan secara umum Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tabel-tabel berikut.

Capaian target kinerja berdasarkan urusan, baik Belanja Tak Langsung maupun Belanja Langsung sebagaimana tabel berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
Dinas Pendidikan	210.853.987.503,17	197.299.878.983,57	(13.554.308.519,60)	93,57
Dinas Kesehatan	91.816.562.688,44	74.817.280.280,61	(16.999.282.407,83)	81,49
Rumah Sakit Umum Daerah	41.557.308.759,68	40.438.526.109,05	(1.118.782.650,63)	97,31
Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	33.023.860.604,72	31.165.801.119,35	(1.858.059.485,37)	94,37
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	287.185.245.222,78	272.264.168.984,41	(14.921.076.238,37)	94,80
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	22.632.318.929,73	21.735.913.723,00	(896.405.206,73)	96,04
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.486.058.862,38	12.904.925.547,00	(581.133.315,38)	95,69
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas	6.362.222.435,25	6.213.125.954,00	(149.096.481,25)	97,66
Dinas Sosial	7.475.450.570,15	6.983.903.911,00	(491.546.659,15)	93,42
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.698.382.428,24	6.335.661.789,00	(362.720.637,24)	94,58
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.004.582.106,00	8.378.587.283,00	(2.625.974.823,00)	76,14
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	26.975.235.166,72	25.514.469.949,00	(1.460.765.217,72)	94,58
Dinas Lingkungan Hidup	235.871.940.284,61	12.086.915.900,28	(223.805.024.384,33)	5,12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.074.550.996,15	7.243.308.455,00	(831.242.541,15)	89,71
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.769.709.169,98	7.995.161.629,00	(774.547.540,98)	91,17
Dinas Perhubungan	14.992.621.412,90	12.412.966.041,00	(2.579.655.371,90)	82,79
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	9.615.212.541,53	8.404.050.916,00	(1.211.161.625,53)	87,40
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	27.862.009.767,03	27.214.350.007,04	(647.659.759,99)	97,68
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.248.371.146,55	5.922.697.830,00	(325.673.316,55)	94,79
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	12.160.588.986,73	11.465.719.983,00	(694.869.003,73)	94,29
Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan	5.595.870.580,90	4.972.831.093,25	(623.039.487,65)	88,87
Dinas Perikanan	21.451.231.805,00	20.635.966.665,00	(815.265.140,00)	96,20
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.735.829.054,78	11.147.804.030,00	(2.588.025.024,78)	81,16
PPKD	218.696.968.015,11	207.314.166.986,00	(11.382.801.029,11)	94,80
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.159.196.617,60	25.341.594.217,20	(6.817.602.400,40)	78,80

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah	12.922.769.732,91	9.644.358.999,13	(3.278.410.733,78)	74,63
Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.177.759.403,13	10.984.395.840,00	(4.193.363.563,13)	72,37
Sekretariat DPRD	32.392.422.724,56	30.489.625.376,74	(1.902.797.347,82)	94,13
DPRD	12.934.509.136,00	12.019.393.211,00	(915.115.925,00)	92,93
Sekretariat Daerah	40.353.613.594,28	38.295.892.554,21	(2.057.721.040,07)	94,90
KDHWKDH	675.355.755,78	564.863.766,00	(110.491.989,78)	83,64
Inspektorat Kabupaten	11.856.899.036,33	9.422.731.233,00	(2.434.167.803,33)	79,47
Kecamatan Seruyan Tengah	6.327.387.547,08	5.787.862.177,00	(539.525.370,08)	91,47
Kecamatan Danau Sembuluh	3.073.308.035,33	2.955.702.007,00	(117.606.028,33)	96,17
Kecamatan Hanau	4.124.822.822,35	4.097.004.668,00	(27.818.154,35)	99,33
Kecamatan Seruyan Hilir	8.601.160.296,95	7.990.234.441,00	(610.925.855,95)	92,90
Kecamatan Seruyan Hulu	3.758.656.102,38	3.574.272.431,00	(184.383.671,38)	95,09
Kecamatan Batu Ampar	2.723.744.132,70	2.538.608.526,00	(185.135.606,70)	93,20
Kecamatan Seruyan Raya	2.807.307.273,95	2.614.243.965,00	(193.063.308,95)	93,12
Kecamatan Danau Seluluk	2.876.915.329,88	2.702.823.244,00	(174.092.085,88)	93,95
Kecamatan Seruyan Hilir Timur	3.708.515.688,80	3.481.836.600,00	(226.679.088,80)	93,89
Kecamatan Suling Tambun	3.137.360.054,03	2.962.509.245,00	(174.850.809,03)	94,43
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35.809.463.693,93	31.142.646.801,00	(4.666.816.892,93)	86,97
<b>JUMLAH</b>	<b>1.577.567.066.014,50</b>	<b>1.247.458.582.270,84</b>	<b>(330.108.483.743,66)</b>	<b>79,07</b>

**Realisasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar  
Kelompok Belanja Langsung dan Tidak Langsung**

No.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>714.393.015.576,30</b>	<b>663.823.324.611,99</b>	<b>50.569.690.964,31</b>	<b>92,92</b>
1	Belanja Tidak Langsung	185.032.531.315,11	176.255.474.925,00	8.777.056.390,11	95,26
2	Belanja Langsung	529.360.484.261,19	487.567.849.686,99	41.792.634.574,20	92,11

**Rincian Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar  
Kelompok Belanja Tidak Langsung**

No	Uraian Urusan, Organisasi	Anggaran	Realisasi	Persentase %
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	<b>Pendidikan</b>	<b>126.730.463.401,23</b>	<b>120.068.666.920,00</b>	<b>94,74</b>
	Dinas Pendidikan	126.730.463.401,23	120.068.666.920,00	94,74
2	<b>Kesehatan</b>	<b>41.636.153.753,59</b>	<b>40.176.653.640,00</b>	<b>96,49</b>
	Dinas Kesehatan	28.495.894.399,06	26.819.684.370,00	94,12
	Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang	8.480.591.980,28	8.764.503.990,00	103,35
	Rumah Sakit Umum Hanau	4.659.667.374,25	4.592.465.280,00	98,56
3	<b>Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>	<b>6.255.157.093,78</b>	<b>6.052.174.974,00</b>	<b>96,75</b>
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6.255.157.093,78	6.052.174.974,00	96,75
4	<b>Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan</b>	<b>2.347.816.259,73</b>	<b>2.318.601.089,00</b>	<b>98,76</b>
	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	2.347.816.259,73	2.318.601.089,00	98,76

No	Uraian Urusan, Organisasi	Anggaran	Realisasi	Persentase %
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Tidak Langsung	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	3.652.359.745,38	3.422.781.446,00	93,71
	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	3.652.359.745,38	3.422.781.446,00	93,71
6	Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	2.070.456.951,25	2.024.025.554,00	97,76
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.070.456.951,25	2.024.025.554,00	97,76
7	Sosial	2.340.124.110,15	2.192.571.302,00	93,69
	Dinas Sosial	2.340.124.110,15	2.192.571.302,00	93,69

**Rincian Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar per Organisasi Kelompok Belanja Langsung**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung	Sisa Anggaran	%
1.	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>529.360.484.261,19</b>	<b>487.567.849.686,99</b>	<b>41.792.634.574,20</b>	<b>92,11</b>
1.01.	Pendidikan	84.123.524.101,94	77.231.012.063,57	6.892.512.038,37	91,81
1.01.1.01.01.	Dinas Pendidikan	84.123.524.101,94	77.231.012.063,57	6.892.512.038,37	91,81
1.02.	Kesehatan	124.761.578.299,25	106.244.953.869,01	18.516.624.430,24	85,16
1.02.1.02.01.	Dinas Kesehatan	63.320.668.289,38	47.997.595.910,61	15.323.072.378,77	75,80
1.02.1.02.02.	Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang	33.076.716.779,40	31.674.022.119,05	1.402.694.660,35	95,76
1.02.1.02.03.	Rumah Sakit Umum Hanau	28.364.193.230,47	26.573.335.839,35	1.790.857.391,12	93,69
1.03.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	280.930.088.129,00	266.211.994.010,41	14.718.094.118,59	94,76
1.03.1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	280.930.088.129,00	266.211.994.010,41	14.718.094.118,59	94,76
1.04.	Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	20.284.502.670,00	19.417.312.634,00	867.190.036,00	95,72
1.04.1.04.01.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	20.284.502.670,00	19.417.312.634,00	867.190.036,00	95,72
1.05.	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	14.125.464.601,00	13.671.244.501,00	454.220.100,00	96,78
1.05.1.05.01.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	9.833.699.117,00	9.482.144.101,00	351.555.016,00	96,42
1.05.1.05.02.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.291.765.484,00	4.189.100.400,00	102.665.084,00	97,61
1.06.	Sosial	5.135.326.460,00	4.791.332.609,00	343.993.851,00	93,30
1.06.1.06.01.	Dinas Sosial	5.135.326.460,00	4.791.332.609,00	343.993.851,00	93,30

Berikut ini adalah ringkasan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 untuk urusan wajib non pelayanan dasar, sebagai berikut:

**Realisasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kelompok Belanja Langsung dan Tidak Langsung**

No.	Urusan Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
2.	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>	<b>373.869.054.585,34</b>	<b>137.926.720.875,57</b>	<b>235.942.333.709,77</b>	<b>36,89</b>
1	Belanja Tidak Langsung	34.672.536.702,83	32.945.497.247,00	1.727.039.455,83	95,02
2	Belanja Langsung	339.196.517.882,51	104.981.223.628,57	234.215.294.253,94	30,95



**Rincian Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar  
Kelompok Belanja Tidak Langsung**

No	Uraian Urusan, Organisasi	Anggaran	Realisasi	Persentase %
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>2.777.681.509,33</b>	<b>2.678.903.624,00</b>	<b>96,44</b>
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.777.681.509,33	2.678.903.624,00	96,44
2	<b>Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</b>	<b>3.267.979.553,30</b>	<b>3.250.169.377,00</b>	<b>99,46</b>
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.267.979.553,30	3.250.169.377,00	99,46
3	<b>Pertanian</b>	<b>6.320.397.500,85</b>	<b>6.147.554.165,00</b>	<b>97,27</b>
	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	6.320.397.500,85	6.147.554.165,00	97,27
4	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>2.393.634.975,50</b>	<b>2.336.890.462,00</b>	<b>97,63</b>
	Dinas Lingkungan Hidup	2.393.634.975,50	2.336.890.462,00	97,63
5	<b>Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil</b>	<b>2.973.232.836,15</b>	<b>2.589.357.692,00</b>	<b>87,09</b>
	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.973.232.836,15	2.589.357.692,00	87,09
6	<b>Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>	<b>2.164.535.354,98</b>	<b>2.054.533.628,00</b>	<b>94,92</b>
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.164.535.354,98	2.054.533.628,00	94,92
7	<b>Perhubungan</b>	<b>3.285.419.212,90</b>	<b>3.067.157.760,00</b>	<b>93,36</b>
	Dinas Perhubungan	3.285.419.212,90	3.067.157.760,00	93,36
8	<b>Komunikasi Dan Informatika</b>	<b>2.223.277.826,53</b>	<b>2.016.152.417,00</b>	<b>90,64</b>
	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	2.223.277.826,53	2.016.152.417,00	90,64
9	<b>Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah</b>	<b>2.121.797.563,03</b>	<b>2.031.832.428,00</b>	<b>95,76</b>
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	2.121.797.563,03	2.031.832.428,00	95,76
10	<b>Penanaman Modal</b>	<b>2.709.254.277,63</b>	<b>2.624.494.964,00</b>	<b>96,87</b>
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.709.254.277,63	2.624.494.964,00	96,87
11	<b>Kepemudaan Dan Olah Raga</b>	<b>2.946.826.934,73</b>	<b>2.746.397.895,00</b>	<b>93,20</b>
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	2.946.826.934,73	2.746.397.895,00	93,20
12	<b>Perpustakaan</b>	<b>1.488.499.157,90</b>	<b>1.403.052.835,00</b>	<b>94,26</b>
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.488.499.157,90	1.403.052.835,00	94,26

**Rincian Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar  
per Organisasi Kelompok Belanja Langsung**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung	Sisa Anggaran	%
2.	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>	<b>339.196.517.882,51</b>	<b>104.981.223.628,57</b>	<b>234.215.294.253,94</b>	<b>30,95</b>
2.01.	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>3.920.700.916,91</b>	<b>3.656.758.165,00</b>	<b>263.942.751,91</b>	<b>93,27</b>
2.01.2.01.01.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.920.700.916,91	3.656.758.165,00	263.942.751,91	93,27
2.02.	<b>Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</b>	<b>7.736.582.552,70</b>	<b>5.128.417.906,00</b>	<b>2.608.164.646,70</b>	<b>66,29</b>
2.02.2.02.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.736.582.552,70	5.128.417.906,00	2.608.164.646,70	66,29
2.03.	<b>Pangan</b>	<b>20.654.837.665,87</b>	<b>19.366.915.784,00</b>	<b>1.287.921.881,87</b>	<b>93,76</b>
2.03.2.03.01.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	20.654.837.665,87	19.366.915.784,00	1.287.921.881,87	93,76

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung	Sisa Anggaran	%
2.05.	Lingkungan Hidup	233.478.305.309,11	9.730.025.438,28	223.748.279.870,83	4,17
2.05.2.05.01.	Dinas Lingkungan Hidup	233.478.305.309,11	9.730.025.438,28	223.748.279.870,83	4,17
2.06.	Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	5.101.318.160,00	4.653.950.763,00	447.367.397,00	91,23
2.06.2.06.01.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.101.318.160,00	4.653.950.763,00	447.367.397,00	91,23
2.07.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.605.173.815,00	5.940.628.001,00	664.545.814,00	89,94
2.07.2.07.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.605.173.815,00	5.940.628.001,00	664.545.814,00	89,94
2.09.	Perhubungan	11.707.202.200,00	9.345.808.281,00	2.361.393.919,00	79,83
2.09.2.09.01.	Dinas Perhubungan	11.707.202.200,00	9.345.808.281,00	2.361.393.919,00	79,83
2.10.	Komunikasi Dan Informatika	7.391.934.715,00	6.388.898.499,00	1.003.036.216,00	86,43
2.10.2.10.01.	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	7.391.934.715,00	6.388.898.499,00	1.003.036.216,00	86,43
2.11.	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	25.740.212.204,00	25.182.517.579,04	557.694.624,96	97,83
2.11.2.11.01.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	25.740.212.204,00	25.182.517.579,04	557.694.624,96	97,83
2.12.	Penanaman Modal	3.539.116.868,92	3.298.202.866,00	240.914.002,92	93,19
2.12.2.12.01.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.539.116.868,92	3.298.202.866,00	240.914.002,92	93,19
2.13.	Kepemudaan Dan Olah Raga	9.213.762.052,00	8.719.322.088,00	494.439.964,00	94,63
2.13.2.13.01.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	9.213.762.052,00	8.719.322.088,00	494.439.964,00	94,63
2.17.	Perpustakaan	4.107.371.423,00	3.569.778.258,25	537.593.164,75	86,91
2.17.2.17.01.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.107.371.423,00	3.569.778.258,25	537.593.164,75	86,91

Berikut ini adalah ringkasan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 untuk urusan pilihan, sebagai berikut:

**Realisasi Urusan Pilihan  
Kelompok Belanja Langsung dan Tidak Langsung**

No.	Uraian Urusan Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
3.	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>21.451.231.805,00</b>	<b>20.635.966.665,00</b>	<b>815.265.140,00</b>	<b>96,20</b>
1	Belanja Tidak Langsung	2.236.918.993,00	2.228.620.865,00	8.298.128,00	99,63
2	Belanja Langsung	19.214.312.812,00	18.407.345.800,00	806.967.012,00	95,80

**Rincian Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan  
Kelompok Belanja Tidak Langsung**

No	Uraian Urusan, Organisasi	Anggaran	Realisasi	Persentase %
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1.	Kelautan Dan Perikanan	2.236.918.993,00	2.228.620.865,00	99,63
	Dinas Perikanan	2.236.918.993,00	2.228.620.865,00	99,63



**Rincian Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan  
per Organisasi Kelompok Belanja Langsung**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung	Sisa Anggaran	%
3.	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>19.214.312.812,00</b>	<b>18.407.345.800,00</b>	<b>806.967.012,00</b>	<b>95,80</b>
3.01.	<b>Kelautan Dan Perikanan</b>	<b>19.214.312.812,00</b>	<b>18.407.345.800,00</b>	<b>806.967.012,00</b>	<b>95,80</b>
3.01.3.01.01.	Dinas Perikanan	19.214.312.812,00	18.407.345.800,00	806.967.012,00	95,80

Berikut ini adalah ringkasan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 untuk penunjang urusan pemerintah, sebagai berikut:

**Realisasi Penunjang Urusan  
Kelompok Belanja Langsung dan Tidak Langsung**

No.	Urusan Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
4.	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>432.044.300.363,93</b>	<b>393.929.923.317,28</b>	<b>38.114.377.036,65</b>	<b>91,18</b>
1	Belanja Tidak Langsung	282.390.130.500,83	265.027.460.321,13	17.362.670.179,70	93,85
2	Belanja Langsung	149.654.169.853,10	128.902.462.996,15	20.751.706.856,95	86,13

**Rincian Realisasi Pelaksanaan Penunjang Urusan  
Kelompok Belanja Tidak Langsung**

No	Uraian Urusan, Organisasi	Anggaran	Realisasi	Persentase %
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	<b>Perencanaan</b>	<b>3.082.827.323,78</b>	<b>2.963.869.052,00</b>	<b>96,14</b>
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.082.827.323,78	2.963.869.052,00	96,14
2	<b>Keuangan</b>	<b>231.287.617.806,89</b>	<b>216.612.788.373,13</b>	<b>93,66</b>
	PPKD	218.696.968.015,11	207.314.166.986,00	94,80
	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	4.499.897.456,87	4.197.164.535,00	93,27
	Badan Pengelola Perpajakan Dan Retribusi Daerah	8.090.752.334,91	5.101.456.852,13	63,05
3	<b>Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan</b>	<b>2.389.585.588,13</b>	<b>2.245.314.894,00</b>	<b>93,96</b>
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.389.585.588,13	2.245.314.894,00	93,96
4	<b>Administrasi Pemerintahan</b>	<b>26.515.322.719,06</b>	<b>25.011.570.562,00</b>	<b>94,33</b>
	Sekretariat DPRD	2.511.195.895,00	2.438.398.483,00	97,10
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.934.509.136,00	12.019.393.211,00	92,93
	Sekretariat Daerah	10.394.261.932,28	9.988.915.102,00	96,10
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	675.355.755,78	564.863.766,00	83,64
5	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.668.503.941,33</b>	<b>2.564.624.647,00</b>	<b>96,11</b>
	Inspektorat Daerah	2.668.503.941,33	2.564.624.647,00	96,11
6	<b>Pemerintahan Umum</b>	<b>16.446.273.121,64</b>	<b>15.629.292.793,00</b>	<b>95,03</b>
	Kecamatan Seruyan Tengah	2.352.251.547,08	2.249.362.496,00	95,63
	Kecamatan Danau Sembuluh	1.448.976.435,33	1.394.283.261,00	96,23
	Kecamatan Hanau	1.868.679.822,35	1.895.325.410,00	101,43
	Kecamatan Seruyan Hilir	2.661.002.359,95	2.582.841.607,00	97,06
	Kecamatan Seruyan Hulu	1.929.002.884,38	1.788.714.489,00	92,73
	Kecamatan Batu Ampar	1.089.958.582,70	948.747.526,00	87,04
	Kecamatan Seruyan Raya	1.328.154.305,14	1.296.195.567,00	97,59
	Kecamatan Danau Seluluk	1.070.109.129,88	915.469.844,00	85,55
	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	1.315.813.000,80	1.206.667.048,00	91,71

No	Uraian Urusan, Organisasi	Anggaran	Realisasi	Persentase %
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Tidak Langsung	
	Kecamatan Suling Tambun	1.382.325.054,03	1.351.685.545,00	97,78

**Realisasi Kelompok Belanja Tidak Langsung Non Gaji**

No.	Uraian Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase %
1	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.711.438.202,00	85,57
2	Belanja Hibah	16.047.613.700,00	13.487.249.700,00	84,05
3	Belanja Bantuan Sosial	8.140.500.000,00	7.603.736.460,00	93,41
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.431.400.540,00	4.775.807.022,00	56,64
5	Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	180.649.803.732,00	179.735.935.602,00	99,49
6	Belanja Tidak Terduga	3.427.650.043,11	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>218.696.968.015,11</b>	<b>207.314.166.986,00</b>	<b>94,80</b>

**Rincian Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Penunjang Urusan per Organisasi Kelompok Belanja Langsung**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung	Sisa Anggaran	%
4.	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>149.654.169.853,10</b>	<b>128.902.462.996,15</b>	<b>20.751.706.856,95</b>	<b>86,13</b>
4.01.	Perencanaan	10.653.001.731,00	8.183.934.978,00	2.469.066.753,00	76,82
4.01.4.01.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.653.001.731,00	8.183.934.978,00	2.469.066.753,00	76,82
4.02.	Keuangan	32.491.316.558,73	25.687.331.829,20	6.803.984.729,53	79,06
4.02.4.02.01.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	27.659.299.160,73	21.144.429.682,20	6.514.869.478,53	76,45
4.02.4.02.02.	Badan Pengelola Perpajakan Dan Retribusi Daerah	4.832.017.398,00	4.542.902.147,00	289.115.251,00	94,02
4.03.	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	12.788.173.815,00	8.739.080.746,00	4.049.093.069,00	68,34
4.03.4.03.01.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.788.173.815,00	8.739.080.746,00	4.049.093.069,00	68,34
4.05.	Administrasi Pemerintahan	69.840.578.491,56	66.358.204.345,95	3.482.374.145,61	94,18
4.05.4.05.01.	Sekretariat DPRD	29.881.226.829,56	28.051.226.893,74	1.829.999.935,82	93,88
4.05.4.05.03.	Sekretariat Daerah	29.959.351.662,00	28.306.977.452,21	1.652.374.209,79	94,48
4.06.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9.188.395.095,00	6.858.106.586,00	2.330.288.509,00	74,64
4.06.4.06.01.	Inspektorat Daerah	9.188.395.095,00	6.858.106.586,00	2.330.288.509,00	74,64
4.07.	Pemerintahan Umum	24.692.704.161,81	23.075.804.511,00	1.616.899.650,81	93,45
4.07.4.07.01.	Kecamatan Seruyan Tengah	3.975.136.000,00	3.538.499.681,00	436.636.319,00	89,02
4.07.4.07.02.	Kecamatan Danau Sembuluh	1.624.331.600,00	1.561.418.746,00	62.912.854,00	96,13
4.07.4.07.03.	Kecamatan Hanau	2.255.943.000,00	2.201.679.258,00	54.263.742,00	97,59
4.07.4.07.04.	Kecamatan Seruyan Hilir	5.940.157.937,00	5.407.392.834,00	532.765.103,00	91,03
4.07.4.07.05.	Kecamatan Seruyan Hulu	1.829.653.218,00	1.785.557.942,00	44.095.276,00	97,59
4.07.4.07.06.	Kecamatan Batu Ampar	1.633.785.550,00	1.589.861.000,00	43.924.550,00	97,31
4.07.4.07.07.	Kecamatan Seruyan Raya	1.479.152.968,81	1.318.048.398,00	161.104.570,81	89,11
4.07.4.07.08.	Kecamatan Danau Seluluk	1.806.806.200,00	1.787.353.400,00	19.452.800,00	98,92
4.07.4.07.09.	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	2.392.702.888,00	2.275.169.552,00	117.533.136,00	95,09
4.07.4.07.10.	Kecamatan Suling Tambun	1.755.035.000,00	1.610.823.700,00	144.211.300,00	91,78

Berikut ini adalah ringkasan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 untuk urusan lainnya, sebagai berikut:

**Realisasi Urusan Lainnya  
Kelompok Belanja Langsung dan Tidak Langsung**

No.	Urusan Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
<b>5.</b>	<b>URUSAN LAINNYA</b>	<b>35.809.463.693,93</b>	<b>31.142.646.801,00</b>	<b>4.666.816.892,93</b>	<b>86,97</b>
1	Belanja Tidak Langsung	1.800.139.779,93	1.736.211.013,00	63.928.766,93	96,45
2	Belanja Langsung	34.009.323.914,00	29.406.435.788,00	4.602.888.126,00	86,47

**Rincian Realisasi Pelaksanaan Urusan Lainnya  
Kelompok Belanja Tidak Langsung**

No	Uraian Urusan, Organisasi	Anggaran	Realisasi	Persentase %
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	Penanggulangan Bencana	1.800.139.779,93	1.736.211.013,00	96,45
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.800.139.779,93	1.736.211.013,00	96,45

**Rincian Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Urusan Lainnya  
per Organisasi Kelompok Belanja Langsung**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung	Sisa Anggaran	%
<b>5.</b>	<b>URUSAN LAINNYA</b>	<b>34.009.323.914,00</b>	<b>29.406.435.788,00</b>	<b>4.602.888.126,00</b>	<b>86,47</b>
<b>5.01.</b>	<b>Penanggulangan Bencana</b>	<b>34.009.323.914,00</b>	<b>29.406.435.788,00</b>	<b>4.602.888.126,00</b>	<b>86,47</b>
5.01.5.01.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34.009.323.914,00	29.406.435.788,00	4.602.888.126,00	86,47

### BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2019 anggaran Belanja Daerah Kabupaten Seruyan ditetapkan sebesar Rp1.577.567.066.014,50 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp135.025.578.817,43, Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp944.004.400.053,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp151.858.450.000,00 sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp346.678.637.144,07.

#### Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai, penganggaran pendapatan daerah tersebut sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan belanja daerah, karena belanja daerah harus didukung oleh kepastian tersediannya penerimaan dalam jumlah yang cukup untuk membiayai belanja daerah.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar 7,92%, sedangkan kontribusi Dana Transfer-Perimbangan 78,51% dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 13,57%, dengan demikian ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat masih sangat tinggi sehingga Pemerintah Daerah diharapkan terus berupaya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Seruyan selama Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat secara ringkas pada berikut ini:

Realisasi Sasaran Kinerja Keuangan TA 2019

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	%
<b>1 PENDAPATAN</b>	<b>1.230.888.428.870,43</b>	<b>1.123.014.379.268,72</b>	<b>91,24</b>
1.1 Pendapatan Asli Daerah	135.025.578.817,43	88.983.634.301,93	65,90
1.2 Pendapatan Dana Perimbangan	944.004.400.053,00	881.687.505.690,00	93,40
1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	151.858.450.000,00	152.343.239.276,79	100,32
<b>2 BELANJA</b>	<b>1.577.567.066.014,50</b>	<b>1.247.458.682.270,84</b>	<b>79,07</b>
2.1 Belanja Tidak Langsung	506.132.257.291,70	478.193.264.371,13	94,48
2.2 Belanja Langsung	1.071.434.808.722,80	769.265.317.899,71	71,80
Surplus/Defisit	(346.678.637.144,07)	(124.403.999.115,72)	36,88
<b>3 PEMBIAYAAN</b>	<b>346.678.637.144,07</b>	<b>364.211.897.791,53</b>	<b>105,06</b>
3.1 Penerimaan Pembiayaan	346.678.637.144,07	364.211.897.791,53	105,06
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa, realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.123.014.379.268,72 atau 91,24% dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.230.888.428.870,43. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2018, mengalami penurunan sebesar 3,56 milyar lebih.

Untuk Pendapatan Asli Daerah, realisasi penerimaan pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp88.983.634.301,93 dari target anggaran sebesar Rp135.025.578.817,43 atau 65,90 %. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 sebesar Rp93.253.508.652,60 mengalami penurunan sebesar 4,26 milyar lebih.

Untuk Dana Perimbangan, realisasi penerimaan pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp881.687.505.690,00 dari target anggaran sebesar Rp944.004.400.053,00 atau



93,40%. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 sebesar Rp895.612.459.480,00 mengalami penurunan sebesar 13,92 milyar lebih.

Untuk pos Lain-lain Pendapatan yang Sah dari target penerimaan Rp151.858.450.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp152.343.239.276,79 atau 100,32 % mengalami kenaikan sebesar 14,62 milyar lebih.

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah, pada Tahun Anggaran 2019 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1.577.567.066.014,50 dan direalisasikan sebesar Rp1.247.458.582.270,84 atau 79,07%. Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp506.132.257.291,70 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp478.193.264.371,13 atau sebesar 94,48 %. Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung ini terdiri atas:

No	Jenis Belanja Tidak Langsung	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	287.435.289.276,59	270.879.097.385,13	94,24
2	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.711.438.202,00	-
3	Belanja Hibah	16.047.613.700,00	13.487.249.700,00	84,05
4	Belanja Bantuan Sosial	8.140.500.000,00	7.603.736.460,00	93,41
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	8.431.400.540,00	4.775.807.022,00	56,64
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	180.649.803.732,00	179.735.935.602,00	99,49
7	Belanja Tidak Terduga	3.427.850.043,11	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>806.132.257.291,70</b>	<b>478.193.264.371,13</b>	<b>94,48</b>

Belanja Langsung diperuntukkan membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program. Pada tahun anggaran 2019, Belanja Langsung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.071.434.808.722,80 dan terealisasi sebesar Rp769.265.317.899,71 atau 71,80%. Dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja Langsung	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	120.736.190.850,98	109.740.487.246,19	90,89
2	Belanja Barang dan Jasa	569.077.750.183,85	294.573.121.357,90	51,76
3	Belanja Modal	381.620.867.687,97	364.951.709.295,62	95,63
<b>Jumlah</b>		<b>1.071.434.808.722,80</b>	<b>769.265.317.899,71</b>	<b>71,80</b>

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp346.678.637.144,07 dapat direalisasikan sebesar Rp 364.211.897.791,53 atau 105,06% dari anggaran. Realisasi penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp364.211.897.791,53

### 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2019 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi pendapatan yang ada di Kabupaten Seruyan (baik pajak maupun retribusi daerah);
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat, sehingga berdampak kepada kurang pedulinya masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber dana yang tersedia;
4. Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja; dan



5. Tidak terlaksananya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal lainnya; dan
5. Dengan meningkatnya penyebaran informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan dalam LKPD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Seruyan memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD) yang menyusun laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya.

### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Seruyan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### a. Pendapatan LRA

Pendapatan diakui dengan basis kas, yaitu Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Penerimaan pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima. Apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

Pendapatan dicatat dengan asas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan kas dan pendapatan yang bersangkutan. Apabila pengembalian/koreksi terjadi atas penerimaan pendapatan periode akuntansi sebelumnya dicatat sebagai pengurangan kas dan ekuitas dana lancar.

Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang diterima.

Pendapatan yang diperoleh dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat diterima oleh Kas Daerah.

#### **b. Pendapatan LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### **c. Pengakuan dan Penilaian Belanja**

Belanja diakui dengan basis kas, yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai belanja apabila telah ada realisasi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Dalam pelaksanaannya, belanja diakui pada saat diterbitkannya dokumen yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran kas daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila menambah saldo kas dan terjadi pada periode-periode sebelumnya dibukukan ke dalam Pendapatan Lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Dan apabila tidak mengurangi saldo kas dan terjadi pada periode-periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut

Pengeluaran belanja dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima. Apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang dikeluarkan.

Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap (Lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap).

Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengeluaran kas dilakukan.

#### **d. Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan jenis beban.

#### **e. Pengakuan dan Penilaian Pembiayaan**

Pembiayaan diakui dengan basis kas, yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai pembiayaan apabila telah ada realisasi penerimaan atau pengeluaran kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Dalam pelaksanaannya, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterbitkannya dokumen yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran kas daerah.

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui sebagai pembiayaan netto.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang diterima dan nilai nominal kas yang dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal direalisasikannya pembiayaan.

#### **f. Pengakuan dan Penilaian Transfer**

Transfer masuk dan transfer keluar diakui berdasarkan basis kas, yaitu dicatat pada saat dikeluarkan atau diterima oleh rekening kas umum daerah.

Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

#### **g. Pengakuan dan Penilaian Perhitungan Pihak Ketiga**

Penerimaan dan Pengeluaran PFK diakui berdasarkan basis kas, yaitu dibukukan saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.

Penerimaan dan Pengeluaran PFK dinilai sebesar jumlah nominal rupiah yang tercantum dalam potongan atau pungutan.

#### **h. Pengakuan dan Penilaian Aset**

##### **1) Kas dan Setara Kas**

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang Negara.

##### **2) Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

##### **3) Piutang Lancar**

Piutang lancar diakui pada akhir periode akuntansi dan diukur sebesar nilai nominal.

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah

Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.

Tata cara penghapusan piutang diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

#### **4) Persediaan**

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

Persediaan dinilai berdasarkan:

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- (b) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- (c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

#### **5) Investasi Permanen**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah dinilai sebagai berikut:

- (a) Jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendala yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan.
- (b) Jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai penyertaan modal pemerintah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikali dengan persentase kepemilikan.

Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

#### **6) Aset Tetap**

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.



Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

**Tanah** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurukan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dibongkar.

**Peralatan dan mesin** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya perolehan alat angkutan meliputi harga pembelian, biaya balik nama, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Biaya Perolehan Alat besar, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat laboratorium, alat kedokteran, dan alat lainnya meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

**Gedung dan bangunan** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun aset tetap yang bersangkutan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, serta biaya pembebasan. Apabila dibangun melalui swakelola, harga perolehan ditentukan sebesar biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pembebasan, serta semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

**Jalan, irigasi dan jaringan** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun aset tetap yang bersangkutan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, serta biaya pembebasan. Apabila dibangun melalui swakelola, harga perolehan ditentukan sebesar biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pembebasan, serta semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

**Aset tetap lainnya** diukur berdasarkan biaya perolehan sampai dengan aset tetap yang bersangkutan siap untuk digunakan.

**Konstruksi Dalam Pengerjaan** dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

(a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

- (b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- (c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- (a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- (c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- (a) Pengeluaran untuk persatuan tanah yang sama dengan atau lebih dari Rp1.,00 (Satu Rupiah);
- (b) Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang terdiri atas:
  - Pengeluaran untuk persatuan Alat-alat Besar Darat yang sama dengan atau lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk persatuan Alat-alat Besar Apung yang sama dengan atau lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk persatuan Alat-alat Bantu yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk persatuan Alat-alat Besar Angkutan yang sama dengan atau lebih dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Pengeluaran untuk persatuan Alat Bengkel dan Alat Ukur yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk persatuan Alat Pertanian yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk persatuan Alat Kantor dan Rumah Tangga yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk persatuan Alat Studio dan Alat Komunikasi yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk persatuan Alat Kedokteran yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk persatuan Alat Laboratorium yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
  - Pengeluaran untuk persatuan Alat-alat Peralatan/ Keamanan yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (c) Pengeluaran untuk persatuan Gedung dan Bangunan yang terdiri atas:
  - Pengeluaran untuk persatuan Bangunan Gedung yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk persatuan Monumen yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

- Pengeluaran untuk persatuan Rambu-rambu yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (d) Pengeluaran untuk persatuan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang sama dengan atau lebih dari Rp1,00 (Satu Rupiah);
- (e) Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya yang terdiri atas:
  - Pengeluaran untuk persatuan Buku dan Perpustakaan yang sama dengan atau lebih dari Rp1,00 (satu rupiah);
  - Pengeluaran untuk persatuan Barang Bercorak Kebudayaan yang sama dengan atau lebih dari Rp1,00 (satu rupiah);
  - Pengeluaran untuk persatuan Hewan yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
  - Pengeluaran untuk persatuan Tanaman yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (f) Pengeluaran untuk persatuan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sama dengan atau lebih dari Rp1,00 (SatuRupiah);

#### 7) **Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas Negara/kas daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas Negara/daerah.

Piutang tidak lancar diakui pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai nominal tagihan.

Aset lain-lain diakui berdasarkan nilai perolehan aset lain-lain tersebut.

#### 8) **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### (a) **Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(b) **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**9) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penentuan Pembentukan Penyisihan Piutang dengan klasifikasi sebagai berikut:

No	Kelompok Piutang	Umur Piutang
1.	Lancar	0 s/d 1 tahun
2.	Kurang Lancar	>1 tahun s/d 2 tahun
3.	Diragukan	>2 tahun s/d 5 tahun
4.	Macet	>5 tahun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebagai berikut:

No	Kelompok Piutang	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0 s/d 1 tahun	0,05 %
2.	Kurang Lancar	>1 tahun s/d 2 tahun	10%
3.	Diragukan	>2 tahun s/d 5 tahun	50%
4.	Macet	>5 tahun	100%

**11) Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- (a) Tanah
- (b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- (c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap satuhunanggaran tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa (nilai residu).

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.



### **Amortisasi**

Amortisasi adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari Aset Tidak Berwujud.

Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial oleh entitas. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Biaya amortisasi setiap periode harus diakui sebagai beban kecuali terdapat kebijakan akuntansi lainnya yang mengizinkan atau mengharuskannya untuk dimasukkan ke dalam nilai tercatat aset lain.

Metode amortisasi yang dapat dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*);

Metode amortisasi yang digunakan pada suatu aset tak berwujud harus diterapkan konsisten dari satu periode ke periode lainnya, kecuali bila terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan oleh entitas.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seruyan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintahan.

Mulai tahun 2016 Kabupaten Seruyan mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015 dan berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan pada paragraf 06 menyatakan bahwa "*entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*"



**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 PENJELASAN POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**5.1.1 Pendapatan LRA**

Realisasi Pendapatan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.123.014.379.268,72 atau 91,24% dari pagu anggaran Rp1.230.888.428.870,43. Pendapatan Kabupaten Seruyan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Perimbangan, dan Lain-lain PAD Yang Sah. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	135.025.578.817,43	88.983.634.301,93	65,90
Pendapatan Transfer/Perimbangan	1.075.118.850.053,00	1.013.416.064.966,79	94,26
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	20.744.000.000,00	20.614.680.000,00	99,38
<b>Jumlah</b>	<b>1.230.888.428.870,43</b>	<b>1.123.014.379.268,72</b>	<b>91,24</b>

Perbandingan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	88.983.634.301,93	93.253.508.652,60	(4.269.874.350,67)
Pendapatan Transfer/Perimbangan	1.013.416.064.966,79	1.015.414.384.017,53	(1.998.319.050,74)
Lain-Lain Pendapatan yang sah	20.614.680.000,00	17.913.306.572,00	2.701.373.428,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.123.014.379.268,72</b>	<b>1.126.581.199.242,13</b>	<b>(3.566.819.973,41)</b>

**Pendapatan Asli Daerah**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp88.983.634.301,93 atau 65,90% dari anggaran Rp135.025.578.817,43.

Rincian Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah	68.449.894.273,00	32.508.779.709,74	47,49
Pendapatan Retribusi Daerah	15.864.111.135,00	11.288.991.679,14	71,16
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.443.141.653,00	7.453.171.538,00	100,13
Lain-lain PAD yang Sah	43.268.431.756,43	37.732.691.375,05	87,21
<b>Jumlah</b>	<b>135.025.578.817,43</b>	<b>88.983.634.301,93</b>	<b>65,90</b>

**5.1.1.a. Hasil Pajak Daerah**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan un Anggaran 2019 sebesar Rp32.508.779.709,74 atau 47,49% dari anggaran Rp68.449.894.273,00.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>68.449.894.273,00</b>	<b>32.508.779.709,74</b>	<b>47,49</b>	<b>46.849.541.357,55</b>	<b>(14.340.761.647,81)</b>
Pajak Hotel	230.300.000,00	139.690.000,00	60,66	124.723.600,00	14.966.400,00
Rumah Penginapan dan sejenisnya	230.300.000,00	139.690.000,00	60,66	124.723.600,00	14.966.400,00
Pajak Restoran	4.510.258.239,00	1.864.855.520,10	41,35	1.677.873.856,00	186.981.664,10
Rumah Makan	113.000.000,00	91.551.300,00	81,02	48.415.620,00	43.135.660,00
Jasa Boga/ Katering	4.397.258.239,00	1.773.304.220,10	40,33	1.629.458.236,00	143.845.984,10
Pajak Hiburan	6.600.000,00	2.024.000,00	31,14	350.000,00	1.674.000,00
Sirkus/Akrobat/Sulap	6.500.000,00	2.024.000,00	31,14	350.000,00	1.674.000,00
Pajak Reklame	203.614.600,00	157.947.675,76	77,61	88.262.876,00	69.684.799,76
Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	171.057.000,00	134.924.762,76	78,88	78.871.678,00	56.053.084,76
Reklame Kain	11.738.000,00	10.858.885,00	92,51	8.027.843,00	2.831.042,00
Reklame Melekat/Stiker	219.600,00	1.972.680,00	898,31	29.280,00	1.943.400,00
Reklame Selebaran	500.000,00	-	-	-	-
Reklame Bersinar	20.000.000,00	10.191.348,00	50,96	1.334.075,00	8.857.273,00
Pajak Penerangan Jalan	23.973.732.055,00	10.077.963.622,31	42,04	3.680.816.513,00	6.397.147.109,31
Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri	20.010.278.931,00	6.741.735.723,31	33,69	597.384.867,00	6.144.350.856,31
Pajak Penerangan Jalan sumber lain	3.963.453.124,00	3.336.227.899,00	84,17	3.083.431.646,00	252.796.253,00
Pajak Air Tanah	2.533.635.020,00	810.605.029,45	31,99	289.918.660,00	520.586.369,45
Pajak Air Tanah	2.533.635.020,00	810.605.029,45	31,99	289.918.660,00	520.586.369,45
Pajak Sarang Burung Walet	63.500.000,00	8.059.250,00	12,69	8.319.125,00	(259.875,00)
Pajak Sarang Burung Walet	63.500.000,00	8.059.250,00	12,69	8.319.125,00	(259.875,00)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.673.092.224,00	5.804.607.429,12	60,01	3.713.344.573,55	2.091.262.855,57
Pajak Mineral bukan logam dan Batuan	9.673.092.224,00	5.804.607.429,12	60,01	3.713.344.573,55	2.091.262.855,57
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.765.814.035,00	2.103.602.958,00	31,09	1.052.583.254,00	1.051.019.704,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.765.814.035,00	2.103.602.958,00	31,09	1.052.583.254,00	1.051.019.704,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.489.548.100,00	11.539.524.225,00	56,32	36.213.348.900,00	(24.673.824.675,00)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.489.548.100,00	11.539.524.225,00	56,32	36.213.348.900,00	(24.673.824.675,00)

#### 5.1.1.b. Hasil Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Scruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.288.991.679,14 atau 71,16% dari anggaran Rp15.864.111.135,00.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>15.864.111.135,00</b>	<b>11.288.991.679,14</b>	<b>71,16</b>	<b>16.457.584.997,00</b>	<b>(5.168.603.317,86)</b>
Retribusi Jasa Umum	10.724.542.735,00	10.153.963.493,00	94,68	15.494.600.942,00	(5.340.637.449,00)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
Retribusi Pelayanan Kesehatan.	9.998.472.735,00	9.704.971.609,00	97,06	15.082.341.542,00	(5.377.369.933,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.050.000,00	6.704.200,00	47,72	1.914.000,00	4.790.200,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	343.910.000,00	262.600.000,00	76,36	239.702.500,00	22.897.500,00
Retribusi Pelayanan Pasar	56.000.000,00	51.517.684,00	92,00	42.342.900,00	9.174.784,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	312.110.000,00	128.170.000,00	41,07	128.300.000,00	(130.000,00)
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>698.641.400,00</b>	<b>644.030.740,00</b>	<b>92,18</b>	<b>632.397.480,00</b>	<b>11.633.260,00</b>
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	440.551.400,00	468.351.740,00	106,31	333.748.940,00	134.602.800,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	2.550.000,00	150.000,00	5,88	600.000,00	(450.000,00)
Retribusi Rumah Potong Hewan	5.000.000,00	910.000,00	18,20	2.077.500,00	(1.167.500,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	25.540.000,00	23.599.000,00	92,40	25.938.000,00	(2.339.000,00)
Retribusi Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga	225.000.000,00	151.020.000,00	67,12	179.250.000,00	(28.230.000,00)
Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Alat dan Mesin	-	-	-	64.417.700,00	(64.417.700,00)
Retribusi Rumah Dinas	-	-	-	26.365.340,00	(26.365.340,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	-	-	2.955.000,00	(2.955.000,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	-	-	-	2.955.000,00	(2.955.000,00)
Retribusi Perizinan Tertentu	4.440.927.000,00	490.997.446,14	11,06	327.641.575,00	163.355.871,14
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.321.427.000,00	490.997.446,14	11,36	221.810.775,00	269.186.671,14
Retribusi Izin Usaha Perikanan	2.500.000,00	-	-	100.000,00	(100.000,00)
Retribusi Izin Ketenagakerjaan/Bidang Perizinan Tenaga Kerja Asing	117.000.000,00	-	-	105.730.800,00	(105.730.800,00)

#### 5.1.1.c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.453.171.538,00 atau 100,13% dari anggaran Rp7.443.141.653,00.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Seruyan Tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.443.141.653,00	7.453.171.538,00	100,13	7.529.299.395,00	(76.127.857,00)
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.443.141.653,00	7.453.171.538,00	100,13	7.529.299.395,00	(76.127.857,00)

#### 5.1.1.d. Lain-lain PAD Yang Sah

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp37.732.691.375,05 atau 87,21 % dari anggaran sebesar Rp43.268.431.756,43. Termasuk didalamnya pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Pertama (JKN) yang diterima langsung pada rekening (JKN) pada 12 Puskesmas sebesar Rp3.133.637.280,00 dan pendapatan BLUD RSUD Kuala Pembuang sebesar Rp9.293.000.664,00.

Terdapat pendapatan karena penambahan Kas di Bendahara JKN sebesar Rp15.196.113,60 yang terdiri dari:

1. Puskesmas Kuala Pembuang II

Pengurangan sebesar Rp160.000,00 disebabkan pemotongan langsung oleh bank untuk biaya administrasi bank yang tidak dianggarkan dari bulan Januari 2017 sampai April 2019.

2. Puskesmas Terawan

Penambahan sebesar Rp15.386.092,00 disebabkan pencairan belanja Jasa Pelayanan (Jaspel) kapitasi Non PNS yang melebihi DPA sehingga dikembalikan ke rekening Bank Bendahara JKN.

3. Puskesmas Asam Baru

Penambahan Rp0,60 disebabkan kurang bayar pajak Jasa Pelayanan Non PNS.

4. Puskesmas Sandul

Pengurangan sebesar Rp30.000,00 disebabkan pemotongan langsung oleh bank untuk biaya penerbitan bilyet tipe buku (cek) yang tidak dianggarkan di bulan September 2019.

5. Puskesmas Rantau Pulut II

Penambahan sebesar Rp21,00 disebabkan bendahara JKN kurang ambil kas di rekening untuk bayar pajak Jasa Pelayanan (Jaspel) PNS.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
Lain-Lain PAD yang Sah	43.268.431.756,43	37.732.691.375,05	87,21	22.417.072.903,06	15.315.618.472,00
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	530.362.909,00	262.275.469,00	49,45	1.229.901.098,00	(967.625.629,00)
Hasil Penjualan Aset Lainnya	530.362.909,00	262.275.469,00	49,45	1.229.901.098,00	(967.625.629,00)
Penerimaan Jasa Giro	14.288.551.123,57	21.730.792.589,95	152,09	14.288.551.123,57	7.442.241.466,38
Jasa Giro Kas Daerah	14.288.551.123,57	21.730.792.589,95	152,09	14.288.551.123,57	7.442.241.466,38
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.910.675.675,72	57.744.791,71	0,73	1.355.250.111,44	(1.297.505.319,73)
Kerugian Uang Daerah	7.910.675.675,72	57.744.791,71	0,73	1.355.250.111,44	(1.297.505.319,73)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	1.710.320.420,00	(1.710.320.420,00)
Pendapatan Denda BPHTB	-	-	-	1.710.320.420,00	(1.710.320.420,00)
Pendapatan Denda Pajak	2.120.008.202,00	1.742.100.688,00	82,17	69.041.607,00	1.683.059.081,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan	402.106.562,00	24.199.048,00	6,02	-	24.199.048,00



Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
dan Perkotaan					
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.717.901.640,00	1.717.901.640,00	100,00	-	1.717.901.640,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	-	-	1.161.270,00	(1.161.270,00)
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	9.075.013,20	(9.075.013,20)
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	-	-	8.163.341,80	(8.163.341,80)
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	-	-	40.641.982,00	(40.641.982,00)
Pendapatan Denda Retribusi	263.000,00	457.234,00	173,85	1.349.102,00	(891.868,00)
Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan	-	-	-	1.200,00	(1.200,00)
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu	-	-	-	1.902,00	(1.902,00)
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	500,00	-	-	500,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	-	734,00	-	-	734,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	263.000,00	456.000,00	173,38	133.000,00	323.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	-	-	1.213.000,00	(1.213.000,00)
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	2.356.692.998,00	3.148.833.393,60	133,61	2.361.282.787,00	787.550.606,60
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.356.692.998,00	3.148.833.393,60	133,61	2.361.282.787,00	787.550.606,60
Pendapatan BLUD	12.537.648.087,00	9.293.000.664,00	74,12	-	9.293.000.664,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	12.537.648.087,00	9.173.720.476,00	73,17	-	9.173.720.476,00
Lain-lain Pendapatan BLUD	-	119.280.188,00	-	-	119.280.188,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	3.524.229.761,14	1.497.486.544,79	42,49	1.411.376.654,04	86.109.890,75
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	3.524.229.761,14	1.497.486.544,79	42,49	1.411.376.654,04	86.109.890,75

### Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.013.416.064.966,79 atau 94,26% dari anggaran Rp1.075.118.850.053,00.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019(Rp)	%
Dana Perimbangan	893.976.468.053,00	844.143.551.918,00	94,43
Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya	151.142.382.000,00	137.444.277.372,00	90,94
Transfer dari Pemerintah Provinsi	30.000.000.000,00	31.828.235.676,79	106,09
<b>Jumlah</b>	<b>1.075.118.850.053,00</b>	<b>1.013.416.064.966,79</b>	<b>94,26</b>



### 5.1.1.e. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi pendapatan Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp844.143.551.918,00 atau 94,43% dari anggaran Rp893.976.468.053,00.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA</b>	<b>893.976.468.053,00</b>	<b>844.143.551.918,00</b>	<b>94,43</b>	<b>886.362.459.480,00</b>	<b>(42.218.907.562,00)</b>
<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>68.919.634.000,00</b>	<b>37.467.368.109,00</b>	<b>54,36</b>	<b>29.152.876.396,00</b>	<b>8.314.491.713,00</b>
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	4.041.676.000,00	2.425.005.800,00	60,00	4.131.916.291,00	(1.706.910.691,00)
Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	168.556.000,00	84.325.113,00	50,03	-	84.325.113,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	64.709.402.000,00	34.958.037.396,00	54,02	25.020.960.105,00	9.937.077.291,00
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>59.915.018.053,00</b>	<b>56.471.784.621,00</b>	<b>94,25</b>	<b>54.217.880.872,00</b>	<b>2.253.903.749,00</b>
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	28.440.932.921,00	19.956.799.321,00	70,17	18.409.748.681,00	1.547.050.640,00
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	662.496.005,00	11.532.279.334,00	1.740,73	594.412.000,00	10.937.867.334,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	26.440.011.554,00	22.326.907.843,00	84,44	-	22.326.907.843,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.072.676.573,00	679.239.373,00	63,32	701.234.591,00	(21.995.218,00)
Bagi Hasil dari Gas bumi dan Minyak Bumi	55.637.000,00	30.600.350,00	55,00	25.163.600,00	5.436.750,00
Bagi Hasil dari Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	3.243.264.000,00	1.945.958.400,00	60,00	9.607.955.101,00	(7.661.996.701,00)
Bagi Hasil dari Mineral Batuan	-	-	-	24.879.366.899,00	(24.879.366.899,00)
<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>632.225.974.000,00</b>	<b>629.417.652.000,00</b>	<b>99,56</b>	<b>616.416.406.000,00</b>	<b>13.001.246.000,00</b>
Dana Alokasi Umum	632.225.974.000,00	629.417.652.000,00	99,56	616.416.406.000,00	13.001.246.000,00
<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>122.780.642.000,00</b>	<b>117.202.083.755,00</b>	<b>95,46</b>	<b>186.575.296.212,00</b>	<b>(69.373.212.457,00)</b>
Dana Alokasi Khusus Reguler	87.693.759.000,00	85.101.076.242,00	97,04	43.670.188.889,00	41.430.887.353,00
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (IPD)	22.293.548.000,00	21.264.836.168,00	95,39	82.685.402.000,00	(61.420.565.832,00)
Dana Alokasi Khusus Afirmasi	12.793.335.000,00	10.836.171.345,00	84,70	7.720.062.814,00	3.116.108.531,00
Tunjangan Guru Non Sertifikasi	-	-	-	1.329.250.000,00	(1.329.250.000,00)
Tunjangan Guru Sertifikasi	-	-	-	23.525.578.850,00	(23.525.578.850,00)
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	-	-	-	3.003.600.000,00	(3.003.600.000,00)
Bantuan Operasional Kesehatan	-	-	-	11.946.125.229,00	(11.946.125.229,00)
Bantuan Operasional KB	-	-	-	2.904.202.250,00	(2.904.202.250,00)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
Tunjangan Khusus Guru	-	-	-	8.898.253.000,00	(8.898.253.000,00)
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-	892.633.180,00	(892.633.180,00)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	10.135.200.000,00	3.584.663.433,00	35,37	-	3.584.663.433,00
Tunjangan Khusus Guru	9.147.410.000,00	2.744.223.000,00	30,00	-	2.744.223.000,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	987.790.000,00	840.440.433,00	85,08	-	840.440.433,00

#### 5.1.1.f. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp137.444.277.372,00 atau 90,94 % dari anggaran Rp151.142.382.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Pemerintah Pusat Lainnya Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	151.142.382.000,00	137.444.277.372,00	90,94	91.782.152.804,00	45.662.124.568,00
Dana Penyesuaian	50.027.932.000,00	37.543.953.772,00	75,05	9.250.000.000,00	28.293.953.772,00
Tunjangan Guru Non Sertifikasi - LRA	1.452.000.000,00	1.307.775.000,00	90,07	-	1.307.775.000,00
Tunjangan Guru Sertifikasi - LRA	24.530.609.000,00	23.225.671.170,00	94,68	-	23.225.671.170,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.223.800.000,00	2.793.000.000,00	86,64	-	2.793.000.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan	12.370.093.000,00	7.984.482.602,00	64,55	-	7.984.482.602,00
Akreditasi Puskesmas	1.475.840.000,00	-	-	-	-
Jaminan Persalinan	1.791.000.000,00	-	-	-	-
Bantuan Operasional KB	2.951.565.000,00	-	-	-	-
Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan	1.534.800.000,00	1.534.800.000,00	100,00	-	1.534.800.000,00
Dana Pelayanan Kepariwisata	698.225.000,00	698.225.000,00	100,00	-	698.225.000,00
Dana Insentif Daerah	-	-	-	9.250.000.000,00	(9.250.000.000,00)
Dana Desa	101.114.450.000,00	99.900.323.600,00	98,80	82.532.152.804,00	17.368.170.796,00
Dana Desa	101.114.450.000,00	99.900.323.600,00	98,80	82.532.152.804,00	17.368.170.796,00

#### 5.1.1.g. Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi pada Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp31.828.235.676,79 atau 106,09% dari anggaran Rp30.000.000.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi pada Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	30.000.000.000,00	31.828.235.676,79	106,09	37.269.771.733,53	(5.441.536.056,74)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	30.000.000.000,00	31.828.235.676,79	106,09	35.619.771.733,53	(3.791.536.056,74)
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	-	-	-	1.650.000.000,00	(1.650.000.000,00)

#### 5.1.1.h. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp20.614.680.000,00 atau 99,38% dari anggaran Rp20.744.000.000,00.

Terdapat koreksi Pendapatan Hibah Dana BOS karena penutupan sekolah sesuai Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 421.3/1216/DISDIK.I/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

NAMA SEKOLAH	KE KAS DAERAH PROVINSI
SMP NEGERI SATU ATAP 2 SERUYAN HILIR TIMUR	7.400.000,00
SMP NEGERI SATU ATAP 2 SERUYAN RAYA	12.000.000,00
SMP NEGERI SATU ATAP 1 BATU AMPAR	36.000.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>55.400.000,00</b>

Rincian anggaran dan pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	20.744.000.000,00	20.614.680.000,00	99,38	17.913.306.572,00	2.701.373.428,00
Pendapatan Hibah	20.744.000.000,00	20.614.680.000,00	99,38	17.737.720.000,00	2.876.960.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	-	-	-	1.279.000.000,00	(1.279.000.000,00)
Pendapatan Hibah Dana BOS	20.744.000.000,00	20.614.080.000,00	99,38	16.458.720.000,00	4.155.960.000,00
Pendapatan Lainnya	-	-	-	175.586.572,00	(175.586.572,00)
Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	175.586.572,00	(175.586.572,00)

#### 5.1.2. Belanja dan Transfer

Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.247.458.582.270,84 atau 79,07% dari pagu anggaran sebesar Rp1.577.567.066.014,50.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

URAIAN	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
Belanja Operasi	1.003.437.344.011,42	697.995.130.351,22	69,56
Belanja Modal	381.620.867.687,97	364.951.709.295,62	95,63
Belanja Tak Terduga	3.427.650.043,11	-	-

URAIAN	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
Transfer	189.081.204.272,00	184.511.742.624,00	97,58
<b>Jumlah</b>	<b>1.577.567.066.014,50</b>	<b>1.247.458.582.270,84</b>	<b>79,07</b>

Perbandingan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 dan 2018, sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Belanja Operasi	697.995.130.351,22	564.972.183.745,48	133.022.946.605,74
Belanja Modal	364.951.709.295,62	314.813.389.775,32	50.138.319.520,30
Belanja Tak Terduga	-	-	-
Transfer	184.511.742.624,00	159.662.698.208,00	24.849.044.416,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.247.458.582.270,84</b>	<b>1.039.448.271.728,80</b>	<b>208.010.310.542,04</b>

### Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp697.995.130.351,22 atau 69,56% dari anggaran Rp1.003.437.344.011,42.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

URAIAN	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
Belanja Pegawai	408.171.480.127,57	380.619.584.631,32	93,25
Belanja Barang	505.031.159.935,22	244.184.069.585,60	48,35
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subeldi	2.000.000.000,00	1.711.438.202,00	85,57
Belanja Hibah	77.304.203.948,63	61.256.301.472,30	79,24
Belanja Bantuan Sosial	10.930.500.000,00	10.223.736.460,00	93,53
<b>Jumlah</b>	<b>1.003.437.344.011,42</b>	<b>697.995.130.351,22</b>	<b>69,56</b>

Perbandingan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Pegawai	380.619.584.631,32	331.707.551.892,73	48.912.032.738,59
Belanja Barang	244.184.069.585,60	179.780.383.490,75	64.403.686.094,85
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	1.711.438.202,00	-	1.711.438.202,00
Belanja Hibah	61.256.301.472,30	49.737.771.597,00	11.518.529.875,30
Belanja Bantuan Sosial	10.223.736.460,00	3.746.476.765,00	6.477.259.695,00
<b>Jumlah</b>	<b>697.995.130.351,22</b>	<b>564.972.183.745,48</b>	<b>133.022.946.605,74</b>

#### 5.1.2.a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp380.619.584.631,32 atau 93,25% dari anggaran Rp408.171.480.127,57. Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
Belanja Tidak Langsung	287.435.289.275,59	270.879.097.385,13	94,24
Belanja Pegawai Langsung	120.736.190.850,98	109.740.487.246,19	90,89
<b>Jumlah</b>	<b>408.171.480.127,57</b>	<b>380.619.584.631,32</b>	<b>93,25</b>

	Pajak Reklame			
5.1.1.05.10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	1.298.686.600,80	298.706.584,93	23,00
5.1.1.05.12.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	126.681.700,40	19.002.263,05	15,00
5.1.1.05.13.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah -	3.037.500,00	243.750,00	8,02



URAIAN	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
Transfer	189.081.204.272,00	184.511.742.624,00	97,58
<b>Jumlah</b>	<b>1.577.567.066.014,50</b>	<b>1.247.458.582.270,84</b>	<b>79,07</b>

Perbandingan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 dan 2018, sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Belanja Operasi	697.995.130.351,22	564.972.183.745,48	133.022.946.605,74
Belanja Modal	364.951.709.295,62	314.813.389.775,32	50.138.319.520,30
Belanja Tak Terduga	-	-	-
Transfer	184.511.742.624,00	159.662.698.208,00	24.849.044.416,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.247.458.582.270,84</b>	<b>1.039.448.271.728,80</b>	<b>208.010.310.542,04</b>

### Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp697.995.130.351,22 atau 69,56% dari anggaran Rp1.003.437.344.011,42.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

URAIAN	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
Belanja Pegawai	408.171.480.127,57	380.619.584.631,32	93,25
Belanja Barang	505.031.159.935,22	244.184.069.585,60	48,35
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.711.438.202,00	85,57
Belanja Hibah	77.304.203.948,63	61.256.301.472,30	79,24
Belanja Bantuan Sosial	10.930.500.000,00	10.223.736.460,00	93,53
<b>Jumlah</b>	<b>1.003.437.344.011,42</b>	<b>697.995.130.351,22</b>	<b>69,56</b>

Perbandingan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Pegawai	380.619.584.631,32	331.707.551.892,73	48.912.032.738,59
Belanja Barang	244.184.069.585,60	179.780.383.490,75	64.403.686.094,85
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	1.711.438.202,00	-	1.711.438.202,00
Belanja Hibah	61.256.301.472,30	49.737.771.597,00	11.518.529.875,30
Belanja Bantuan Sosial	10.223.736.460,00	3.746.476.765,00	6.477.259.695,00
<b>Jumlah</b>	<b>697.995.130.351,22</b>	<b>564.972.183.745,48</b>	<b>133.022.946.605,74</b>

#### 5.1.2.a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp380.619.584.631,32 atau 93,25% dari anggaran Rp408.171.480.127,57. Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
Belanja Tidak Langsung	287.435.289.276,59	270.879.097.385,13	94,24
Belanja Pegawai Langsung	120.736.190.850,98	109.740.487.246,19	90,89
<b>Jumlah</b>	<b>408.171.480.127,57</b>	<b>380.619.584.631,32</b>	<b>93,25</b>



### Belanja Pegawai Tidak Langsung

Kode	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
5.1.1.	Belanja Pegawai	287.435.289.276,59	270.879.097.385,13	94,24
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	192.655.741.236,82	187.320.367.756,00	97,23
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	139.171.938.251,42	137.835.887.095,00	99,04
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	13.938.654.737,84	13.388.728.948,00	96,05
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	7.389.259.195,54	6.959.016.500,00	94,18
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	7.916.233.575,00	7.379.891.910,00	93,22
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	2.883.359.804,42	2.548.258.000,00	88,38
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	8.399.166.785,90	7.867.978.483,00	93,68
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	799.932.224,82	262.354.179,00	32,80
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	35.491.107,24	2.242.854,00	6,32
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	4.221.792.743,20	3.915.038.148,00	92,73
5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	1.371.877.911,24	1.132.298.014,00	82,54
5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah	18.818.100,00	16.975.875,00	90,21
5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi	32.337.900,00	29.643.075,00	91,67
5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran	21.010.500,00	19.533.675,00	92,97
5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan	7.125.300,00	6.531.525,00	91,67
5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	42.416.100,00	16.305.975,00	38,44
5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan	2.031.132.000,00	2.002.500.000,00	98,59
5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian	239.085.000,00	239.085.000,00	100,00
5.1.1.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	286.440.000,00	91,67
5.1.1.01.21.	Uang Paket	48.132.000,00	48.058.500,00	99,85
5.1.1.01.22.	Tunjangan Transportasi	2.673.000.000,00	2.643.300.000,00	98,89
5.1.1.01.23.	Tunjangan Reses	1.102.500.000,00	720.300.000,00	65,33
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	85.201.756.377,63	76.876.681.445,00	90,23
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	28.985.452.787,00	26.739.569.013,00	92,25
5.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	4.447.073.077,00	3.977.593.821,00	89,44
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	1.777.522.502,38	1.384.716.372,00	77,90
5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	2.597.133.985,25	2.455.118.631,00	94,53
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	35.519.019.000,00	31.276.398.400,00	88,06
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Daerah	11.710.455.026,00	10.942.935.208,00	93,45
5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (Tunjangan Khusus/Insentif Pelayanan)	165.100.000,00	100.350.000,00	60,78
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.810.000.000,00	4.810.000.000,00	100,00
5.1.1.03.01.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	4.410.000.000,00	100,00
5.1.1.03.02.	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.513.760.348,04	996.413.601,76	28,36
5.1.1.05.06.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	11.501.000,00	4.321.000,00	37,57
5.1.1.05.07.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	226.607.900,79	35.711.937,58	15,76
5.1.1.05.08.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	325.000,00	48.750,00	15,00
5.1.1.05.09.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	9.979.450,00	4.494.442,50	45,04
5.1.1.05.10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	1.298.686.600,80	298.706.584,93	23,00
5.1.1.05.12.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	126.681.700,40	19.002.263,05	15,00
5.1.1.05.13.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah -	3.037.500,00	243.750,00	8,02

Kode	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
	Pajak Sarang Burung Walet			
5.1.1.05.14.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	453.123.171,15	152.308.373,33	33,61
5.1.1.05.15.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	338.290.700,36	50.743.605,62	15,00
5.1.1.05.16.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.045.527.324,54	430.832.894,75	41,21
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.254.031.314,30	875.634.582,37	69,83
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	949.881.716,80	831.787.431,86	87,57
5.1.1.06.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	750.350,00	285.100,00	38,00
5.1.1.06.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	17.195.500,00	6.878.200,00	40,00
5.1.1.06.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	3.231.250,00	2.043.750,00	63,25
5.1.1.06.07.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	18.493.000,00	5.228.325,00	28,27
5.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	27.363.723,00	18.593.667,01	67,95
5.1.1.06.20.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	127.500,00	-	-
5.1.1.06.21.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	312.500,00	100.000,00	32,00
5.1.1.06.22.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan	1.473.900,00	1.154.650,00	78,34
5.1.1.06.23.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	13.471.875,00	6.721.875,00	49,90
5.1.1.06.26.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	216.700.383,50	2.841.583,50	1,31
5.1.1.06.30.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan	125.000,00	-	-
5.1.1.06.32.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	4.904.616,00	-	-

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan	126.730.463.401,23	120.068.666.920,00	94,74	110.465.312.593,00	9.603.354.327,00
Dinas Kesehatan	28.495.894.399,06	26.819.684.370,00	94,12	24.876.349.668,00	1.943.334.702,00
Rumah Sakit Umum Daerah	8.480.591.980,28	8.764.503.990,00	103,35	7.988.874.643,00	775.629.347,00
Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	4.659.667.374,25	4.592.465.280,00	98,56	3.784.438.818,00	808.026.462,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6.255.157.093,78	6.062.174.974,00	96,75	5.653.774.946,00	398.400.028,00
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	2.347.816.259,73	2.318.601.089,00	98,76	2.029.510.409,00	289.090.680,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.652.359.745,38	3.422.781.446,00	93,71	3.248.055.961,00	178.725.485,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.070.456.951,25	2.024.025.554,00	97,76	1.955.408.009,00	68.617.545,00

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
Dinas Sosial	2.340.124.110,15	2.192.571.302,00	93,69	2.233.384.120,00	(40.812.818,00)
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.777.681.509,33	2.678.903.624,00	96,44	2.521.662.601,00	157.241.023,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.267.979.553,30	3.250.169.377,00	99,46	3.067.496.403,00	182.672.974,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	6.320.397.500,85	6.147.554.165,00	97,27	6.036.000.917,00	111.553.248,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.393.634.975,50	2.336.890.462,00	97,63	2.214.025.717,00	122.864.745,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.973.232.836,15	2.589.357.692,00	87,09	2.825.688.536,00	(236.330.844,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.164.535.354,98	2.054.533.628,00	94,92	2.026.486.502,00	28.047.126,00
Dinas Perhubungan	3.285.419.212,90	3.067.157.760,00	93,36	3.147.797.504,00	(80.639.744,00)
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	2.223.277.826,53	2.015.152.417,00	90,64	2.145.931.183,00	(130.778.766,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	2.121.797.563,03	2.031.832.428,00	95,76	1.990.187.479,00	41.644.949,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.709.254.277,63	2.624.494.964,00	96,87	2.285.048.626,00	339.446.338,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	2.946.826.934,73	2.746.397.895,00	93,20	2.501.092.019,00	245.305.876,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.488.499.157,90	1.403.052.835,00	94,26	1.425.248.565,00	(22.195.730,00)
Dinas Perikanan	2.236.918.993,00	2.228.620.865,00	99,63	2.079.596.370,00	149.024.495,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.082.827.323,78	2.963.869.052,00	96,14	2.882.231.002,00	81.638.050,00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	4.499.897.456,87	4.197.164.535,00	93,27	4.122.111.284,00	75.053.251,00
Badan Pengelola Perpajakan Dan Retribusi Daerah	8.090.752.334,91	5.101.456.852,13	63,05	5.138.121.778,00	(36.664.925,87)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.389.585.588,13	2.245.314.894,00	93,96	2.245.825.012,00	(510.118,00)
Sekretariat DPRD	2.511.195.895,00	2.438.398.483,00	97,10	2.287.874.584,00	150.523.899,00
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.934.509.136,00	12.019.393.211,00	92,93	12.110.769.809,00	(91.376.598,00)
Sekretariat Daerah	10.394.261.932,28	9.988.915.102,00	96,10	9.596.793.745,00	392.121.357,00
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	675.355.755,78	564.863.766,00	83,64	417.478.354,00	147.385.412,00
Inspektorat Daerah	2.668.503.941,33	2.564.624.647,00	96,11	2.398.797.817,00	165.826.830,00
Kecamatan Seruyan Tengah	2.352.251.547,08	2.249.362.496,00	95,63	1.928.299.875,00	321.062.621,00
Kecamatan Danau Sembuluh	1.448.976.435,33	1.394.283.261,00	96,23	1.333.271.711,00	61.011.550,00
Kecamatan Hanau	1.868.679.822,35	1.895.325.410,00	101,43	1.479.686.103,00	415.639.307,00
Kecamatan Seruyan Hilir	2.661.002.359,95	2.582.841.607,00	97,06	2.576.297.427,00	6.544.180,00
Kecamatan Seruyan Hulu	1.929.002.884,38	1.788.714.489,00	92,73	1.606.753.271,00	179.961.218,00



Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
Kecamatan Batu Ampar	1.089.958.582,70	948.747.526,00	87,04	942.509.560,00	6.237.966,00
Kecamatan Seruyan Raya	1.328.154.305,14	1.296.195.567,00	97,59	1.144.214.168,00	151.981.399,00
Kecamatan Danau Seluluk	1.070.109.129,88	915.469.844,00	85,55	822.804.781,00	92.665.063,00
Kecamatan Seruyan Hilir Timur	1.315.813.000,80	1.206.667.048,00	91,71	1.263.455.006,00	(56.787.958,00)
Kecamatan Suling Tambun	1.382.325.054,03	1.351.685.545,00	97,78	1.244.746.911,00	106.938.634,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.800.139.779,93	1.736.211.013,00	96,45	1.643.316.963,00	92.894.050,00
<b>JUMLAH</b>	<b>287.435.289.276,59</b>	<b>270.679.097.385,13</b>	<b>94,24</b>	<b>263.686.730.750,00</b>	<b>17.192.366.635,13</b>

### Belanja Pegawai Langsung

Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp109.740.487.246,19 atau 90,89% dari anggaran Rp120.736.190.850,98.

Rincian Belanja Pegawai dari Belanja Langsung sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>120.736.190.850,98</b>	<b>109.740.487.246,19</b>	<b>90,89</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>28.830.488.973,28</b>	<b>25.101.423.572,93</b>	<b>87,07</b>
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	6.716.762.721,00	5.377.364.750,00	80,06
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.081.297.487,53	944.190.000,00	87,32
5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	2.174.590.000,00	2.054.159.392,00	94,46
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/ PPK SKPD	1.149.280.000,00	1.131.677.424,00	98,47
5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	2.651.710.000,00	2.565.940.000,00	96,77
5.2.1.01.06.	Honorarium Bendahara	2.847.091.824,00	2.681.378.792,00	94,18
5.2.1.01.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	2.912.515.000,00	2.629.935.000,00	90,30
5.2.1.01.08.	Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan PNS	3.492.587.940,75	2.775.134.718,93	79,46
5.2.1.01.09.	Honorarium Jaga PNS	133.200.000,00	136.100.000,00	102,18
5.2.1.01.10.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	803.980.000,00	670.010.000,00	83,34
5.2.1.01.11.	Honorarium Tim/ Tenaga Teknis	3.606.674.000,00	2.951.983.496,00	81,85
5.2.1.01.12.	Honorarium Admin Database Kependudukan	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00
5.2.1.01.13.	Honorarium Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL)	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
5.2.1.01.14.	Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/pengelola Website	163.800.000,00	158.000.000,00	96,46
5.2.1.01.15.	Honorarium Operator dan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi	1.076.000.000,00	1.004.550.000,00	93,36
<b>5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>85.474.782.208,70</b>	<b>79.044.679.384,81</b>	<b>92,48</b>
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	78.107.974.741,03	72.159.024.986,23	92,38
5.2.1.02.02.	Honorarium Jasa Pelayanan kesehatan Non PNS	4.476.087.467,67	4.137.465.670,58	92,43

Kode	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
5.2.1.02.03.	Honorarium Jaga Non PNS	21.720.000,00	21.240.000,00	97,79
5.2.1.02.04.	Honorarium Tenaga Kesehatan berdasarkan Kelangkaan Profesi	2.188.000.000,00	2.128.500.000,00	97,28
5.2.1.02.05.	Honorarium Tenaga Kesehatan berdasarkan Beban Kerja	681.000.000,00	598.448.728,00	87,88
5.2.1.03.	Uang Lembur	1.916.356.940,00	1.331.681.037,00	69,49
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.813.151.940,00	1.268.634.037,00	69,97
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	103.205.000,00	63.047.000,00	61,09
5.2.1.04.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	1.488.400.000,00	1.237.000.000,00	83,11
5.2.1.04.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	1.488.400.000,00	1.237.000.000,00	83,11
5.2.1.05.	Belanja Pegawai BOS APBN	3.026.162.729,00	3.025.703.251,45	99,98
5.2.1.05.01.	Belanja Pegawai	3.026.162.729,00	3.025.703.251,45	99,98

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan	29.236.566.806,11	27.111.133.751,45	82,38	19.052.717.374,22	8.058.416.377,23
Dinas Kesehatan	13.946.212.858,95	12.302.009.331,74	88,21	8.291.303.577,51	4.010.705.754,23
Rumah Sakit Umum Daerah	7.257.840.000,00	6.991.500.000,00	96,33	5.242.315.000,00	1.749.185.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	11.450.422.324,47	10.650.536.772,00	93,01	5.053.147.691,00	5.597.389.081,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.936.500.000,00	2.666.286.392,00	90,80	2.508.758.000,00	157.528.392,00
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	1.282.379.000,00	939.613.496,00	73,27	622.120.000,00	317.493.496,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.803.570.000,00	6.499.250.000,00	95,53	4.092.080.000,00	2.407.170.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	827.880.000,00	816.700.000,00	98,65	685.900.000,00	130.800.000,00
Dinas Sosial	817.625.000,00	804.589.250,00	98,41	651.830.000,00	152.759.250,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	763.970.000,00	704.770.000,00	92,25	608.840.000,00	95.930.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.962.310.000,00	1.833.110.000,00	93,42	1.476.855.000,00	356.255.000,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	3.678.835.020,00	3.472.872.000,00	94,40	3.445.300.000,00	27.572.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.554.400.000,00	4.285.325.000,00	94,09	3.697.555.000,00	587.770.000,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.171.680.000,00	1.050.184.000,00	89,63	1.041.955.000,00	8.229.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	853.305.000,00	794.881.000,00	93,15	768.940.000,00	25.941.000,00
Dinas Perhubungan	993.060.000,00	865.270.000,00	87,13	796.710.500,00	68.559.500,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	925.280.000,00	870.335.000,00	94,06	581.190.000,00	289.145.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	833.450.000,00	736.790.000,00	88,40	558.690.000,00	178.100.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	641.319.868,92	609.775.000,00	95,08	408.358.000,00	201.417.000,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	1.221.370.000,00	1.157.100.000,00	94,74	993.030.000,00	164.070.000,00
Dinas Perpustakaan Dan	678.020.000,00	645.284.000,00	95,17	480.125.000,00	185.159.000,00



Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
Kearsipan					
Dinas Perikanan	1.280.400.000,00	1.197.260.000,00	93,51	746.360.000,00	450.900.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.365.850.000,00	1.182.000.000,00	86,54	1.057.286.000,00	124.714.000,00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	3.770.186.311,53	3.172.399.216,00	84,14	2.036.368.000,00	1.136.031.216,00
Badan Pengelola Perpajakan Dan Retribusi Daerah	881.882.000,00	856.691.500,00	97,14	786.341.500,00	70.350.000,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.612.860.000,00	1.311.165.000,00	50,18	956.680.000,00	354.485.000,00
Sekretariat DPRD	2.892.630.000,00	2.763.180.000,00	95,52	2.182.760.000,00	580.420.000,00
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-	-
Sekretariat Daerah	5.204.620.000,00	4.655.210.500,00	89,44	3.234.416.500,00	1.420.794.000,00
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-
Inspektorat Daerah	1.015.514.940,00	839.790.000,00	82,70	714.984.000,00	124.806.000,00
Kecamatan Seruyan Tengah	747.300.000,00	713.360.000,00	95,46	523.620.000,00	189.740.000,00
Kecamatan Danau Sembuluh	461.480.000,00	433.980.000,00	94,04	380.550.000,00	53.430.000,00
Kecamatan Hanau	685.620.000,00	672.420.000,00	98,07	522.780.000,00	149.640.000,00
Kecamatan Seruyan Hilir	1.163.876.721,00	1.087.536.000,00	93,44	800.300.000,00	287.236.000,00
Kecamatan Seruyan Hulu	543.690.000,00	513.068.000,00	94,37	259.970.000,00	253.098.000,00
Kecamatan Batu Ampar	530.070.000,00	520.990.000,00	98,29	402.340.000,00	118.650.000,00
Kecamatan Seruyan Raya	433.360.000,00	379.440.000,00	87,56	341.440.000,00	38.000.000,00
Kecamatan Danau Seluluk	538.050.000,00	522.050.000,00	97,03	453.900.000,00	68.150.000,00
Kecamatan Seruyan Hilir Timur	853.580.000,00	841.810.000,00	98,62	713.940.000,00	127.870.000,00
Kecamatan Suling Tambun	475.140.000,00	390.420.000,00	82,17	392.265.000,00	(1.845.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.444.085.000,00	1.880.402.037,00	76,94	456.800.000,00	1.423.602.037,00
<b>JUMLAH</b>	<b>120.736.190.850,98</b>	<b>109.740.487.246,19</b>	<b>90,89</b>	<b>78.020.821.142,73</b>	<b>31.719.666.103,46</b>

#### 5.1.2.b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp244.184.069.585,60 atau 48,35% dari anggaran Rp505.031.159.935,22.

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	505.031.159.935,22	244.184.069.585,60	48,35
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.947.168.564,39	16.692.595.208,00	92,60
5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.684.202.711,48	5.418.142.673,00	95,32
5.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	695.937.500,00	659.534.050,00	94,77
5.1.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	603.288.000,00	577.248.500,00	95,68
5.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.381.315.574,00	1.338.492.300,00	96,90
5.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.149.415.400,00	1.972.987.900,00	91,79
5.1.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	35.250.000,00	30.116.500,00	85,44
5.1.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	822.968.664,00	804.535.000,00	97,76
5.1.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-	1.964.288.214,91	1.572.966.095,00	80,08

Kode	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
	umbu/Bendera			
5.1.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	753.102.500,00	691.785.375,00	91,86
5.1.2.01.11.	Belanja Logistik Rumah Tangga KDH dan WKDH	480.000.000,00	475.564.500,00	99,08
5.1.2.01.12.	Belanja Piala, Penghargaan dan Souvenir	801.209.000,00	689.469.300,00	86,05
5.1.2.01.13.	Belanja Pengadaan Tas	312.055.000,00	281.375.000,00	90,17
5.1.2.01.14.	Belanja Pengadaan Perlengkapan Dapur (Barang Pecah Belah)	386.538.000,00	372.624.075,00	96,40
5.1.2.01.15.	Belanja Pengadaan Sajadah/Mukena/Peci	12.500.000,00	11.880.000,00	95,04
5.1.2.01.16.	Belanja Bantal/Guling, Sprei dan Kasur	226.418.000,00	222.594.700,00	98,31
5.1.2.01.17.	Belanja Kabel	29.530.000,00	23.206.740,00	78,59
5.1.2.01.19.	Belanja Logistik Kebencanaan	31.950.000,00	25.713.500,00	80,48
5.1.2.01.20.	Belanja Pengadaan Karpel	30.000.000,00	26.681.000,00	88,94
5.1.2.01.21.	Belanja Logistik Rumah Tangga Ketua dan Wakil DPRD	547.200.000,00	497.678.000,00	90,95
<b>5.1.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>16.018.744.463,08</b>	<b>14.970.033.090,06</b>	<b>93,45</b>
5.1.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.079.957.500,00	920.886.210,00	85,27
5.1.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	382.559.800,00	373.828.000,00	97,72
5.1.2.02.03.	Belanja bibit ternak	232.000.000,00	229.141.850,00	98,77
5.1.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	9.608.177.275,08	9.151.587.169,06	95,25
5.1.2.02.05.	Belanja bahan kimia	704.887.300,00	596.986.850,00	84,69
5.1.2.02.06.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	864.000.000,00	830.360.000,00	96,11
5.1.2.02.07.	Belanja Pengadaan Sampel/Produk	17.900.000,00	15.737.500,00	87,92
5.1.2.02.08.	Belanja Bahan Percontohan/Praktek	386.440.500,00	340.207.500,00	88,04
5.1.2.02.09.	Belanja Peralatan Permainan Edukasi	23.500.000,00	23.428.000,00	99,69
5.1.2.02.10.	Belanja Pupuk	92.123.500,00	85.853.450,00	93,19
5.1.2.02.11.	Belanja Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian, Peternakan dan Perikanan	288.246.000,00	286.347.750,00	99,34
5.1.2.02.12.	Belanja Pengadaan/Pembuatan Papan Nama	98.430.000,00	93.158.500,00	94,64
5.1.2.02.13.	Belanja Bahan Laboratorium dan Pendukung Pemeriksaan Laboratorium	1.592.522.588,00	1.481.557.111,00	93,03
5.1.2.02.14.	Belanja Pakan Ternak/Ikan	285.000.000,00	283.278.200,00	99,40
5.1.2.02.15.	Belanja Pengadaan Bingkai/Pigura	125.500.000,00	119.900.000,00	95,54
5.1.2.02.16.	Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Seni Tari/Senam	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5.1.2.02.17.	Belanja Pengadaan Gorden	232.500.000,00	132.775.000,00	57,11
<b>5.1.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>55.080.344.314,40</b>	<b>41.752.493.955,00</b>	<b>75,80</b>
5.1.2.03.01.	Belanja telepon	408.945.983,00	325.647.187,00	79,63
5.1.2.03.02.	Belanja air	773.550.216,14	532.716.446,00	68,87
5.1.2.03.03.	Belanja listrik	5.595.687.184,00	4.837.141.788,00	86,44
5.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.581.419.387,00	1.378.390.000,00	87,16
5.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	2.160.602.800,00	1.657.628.054,00	76,72
5.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	122.744.448,00	68.715.000,00	55,98
5.1.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	219.000.000,00	75.679.000,00	34,56
5.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	11.917.366,00	1.520.000,00	12,75
5.1.2.03.12.	Belanja Jasa Kerja	11.345.861.450,86	7.783.701.441,00	68,60
5.1.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	15.285.929.079,00	11.218.137.990,00	73,39
5.1.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/Tenaga Ahli dan Narasumber	6.163.880.000,00	4.279.890.510,00	69,44
5.1.2.03.15.	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran	260.423.287,00	213.750.000,00	82,08
5.1.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentansi	791.591.000,00	624.358.300,00	78,87
5.1.2.03.17.	Belanja Jasa Kunjungan Dokter Spesialis	82.500.000,00	46.500.000,00	56,36
5.1.2.03.18.	Belanja Jasa Cuci Cetak Photo	125.141.016,00	91.272.500,00	72,94
5.1.2.03.19.	Belanja Uji Laboratorium/Kalibrasi	245.800.000,00	226.027.840,00	91,96

Kode	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
5.1.2.03.20.	Belanja TV Kabel	91.727.000,00	73.035.000,00	79,62
5.1.2.03.21.	Belanja Jasa Aplikasi	7.500.013,00	7.364.000,00	98,19
5.1.2.03.22.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	207.600.000,00	172.200.000,00	82,95
5.1.2.03.23.	Belanja Klaim Jamkesda	51.709.634,00	34.995.577,00	67,68
5.1.2.03.25.	Belanja Jasa Konsultan Penilaian/Appraisal	914.000.000,00	397.524.000,00	43,49
5.1.2.03.26.	Belanja Jasa Pendampingan	435.499.500,00	284.966.000,00	65,43
5.1.2.03.28.	Belanja Dokumentansi	71.747.100,00	43.335.000,00	60,40
5.1.2.03.29.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	6.729.167.850,40	6.509.176.560,00	96,73
5.1.2.03.31.	Belanja Klaim Jampersal	1.285.000.000,00	757.721.762,00	58,97
5.1.2.03.32.	Belanja Jasa Sewa VPS	111.400.000,00	111.100.000,00	99,73
<b>5.1.2.04.</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>9.678.074.350,37</b>	<b>5.028.683.885,00</b>	<b>51,96</b>
5.1.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
5.1.2.04.03.	Belanja Premi Jamkesda	9.387.415.000,00	4.878.683.885,00	51,97
5.1.2.04.04.	Belanja Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	140.659.350,37	-	-
<b>5.1.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>15.973.201.117,56</b>	<b>12.696.548.776,00</b>	<b>79,49</b>
5.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.251.562.000,00	1.512.222.902,00	67,16
5.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.382.741.172,00	3.272.411.428,00	74,67
5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.644.119.000,00	7.555.128.846,00	87,40
5.1.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	36.425.000,00	1.885.000,00	5,18
5.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	647.713.945,56	352.641.500,00	54,44
5.1.2.05.06.	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	-	-
5.1.2.05.07.	Belanja BBNKB dan PKB Kendaraan Bermotor	3.140.000,00	2.259.100,00	71,95
<b>5.1.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.834.319.354,35</b>	<b>6.173.369.623,00</b>	<b>78,80</b>
5.1.2.06.01.	Belanja cetak	5.725.281.000,00	4.419.796.099,00	77,20
5.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.928.588.354,35	1.587.653.624,00	82,32
5.1.2.06.03.	Belanja Perjilidan	180.450.000,00	165.919.900,00	91,95
<b>5.1.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>861.250.000,00</b>	<b>639.450.000,00</b>	<b>74,25</b>
5.1.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00
5.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	589.030.000,00	447.880.000,00	76,04
5.1.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	198.220.000,00	117.570.000,00	59,31
5.1.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
<b>5.1.2.09.</b>	<b>Belanja Sewa Alat Berat</b>	<b>636.674.300,00</b>	<b>634.100.000,00</b>	<b>99,60</b>
5.1.2.09.01.	Belanja sewa Eskavator	239.694.300,00	238.000.000,00	99,29
5.1.2.09.02.	Belanja sewa Bulldoser	196.980.000,00	196.100.000,00	99,55
5.1.2.09.03.	Belanja Sewa Long Bed	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
<b>5.1.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>718.300.000,00</b>	<b>631.690.000,00</b>	<b>87,94</b>
5.1.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	26.900.000,00	21.500.000,00	79,93
5.1.2.10.05.	Belanja sewa tenda	36.000.000,00	28.400.000,00	78,89
5.1.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	39.000.000,00	37.000.000,00	94,87
5.1.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	421.500.000,00	383.375.000,00	90,95
5.1.2.10.08.	Belanja Sewa Taplak Meja	11.500.000,00	10.950.000,00	95,22
5.1.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan, Perlengkapan Musik, Tari dan Kesenian Daerah/Tradisonal	97.750.000,00	97.750.000,00	100,00
5.1.2.10.11.	Belanja Sewa Tenda/Kursi	85.650.000,00	52.715.000,00	61,55
<b>5.1.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>23.904.377.167,00</b>	<b>19.522.931.250,00</b>	<b>81,67</b>
5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.059.236.082,00	6.556.547.100,00	92,86
5.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.302.590.500,00	1.563.590.500,00	67,91
5.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	800.331.100,00	753.239.550,00	94,12



Kode	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
5.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.316.835.485,00	10.305.786.700,00	77,39
5.1.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman pasien	425.384.000,00	343.767.400,00	80,81
<b>5.1.2.12.</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>2.435.514.965,00</b>	<b>2.393.075.600,00</b>	<b>98,28</b>
5.1.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	86.250.000,00	82.750.000,00	95,94
5.1.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	170.500.000,00	169.250.000,00	99,27
5.1.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.421.729.965,00	1.390.971.200,00	97,84
5.1.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	125.000.000,00	123.820.000,00	99,06
5.1.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	304.140.000,00	302.798.400,00	99,56
5.1.2.12.08.	Belanja Pakaian Linmas	78.900.000,00	78.375.000,00	99,33
5.1.2.12.09.	Belanja Pakaian Dharma Wanita	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
5.1.2.12.11.	Belanja Atribut Pakaian Dinas Harian	227.995.000,00	224.111.000,00	98,30
<b>5.1.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>1.641.899.500,00</b>	<b>1.571.063.875,00</b>	<b>95,69</b>
5.1.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.288.119.500,00	1.235.232.125,00	95,89
5.1.2.13.03.	Belanja Atribut Pakaian Kerja	353.780.000,00	335.831.750,00	94,93
<b>5.1.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>7.253.080.000,00</b>	<b>6.981.435.125,00</b>	<b>96,25</b>
5.1.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	37.500.000,00	37.380.000,00	99,68
5.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	1.043.655.000,00	1.018.648.500,00	97,60
5.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	3.406.792.000,00	3.257.503.725,00	95,62
5.1.2.14.05.	Belanja Pakaian Pasukan Pengibar Bendera	181.615.000,00	181.103.750,00	99,72
5.1.2.14.06.	Belanja Atribut Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	581.400.000,00	517.949.650,00	89,09
5.1.2.14.07.	Belanja Pakaian Peserta	487.050.000,00	477.791.000,00	98,10
5.1.2.14.08.	Belanja Pakaian khusus hari-hari tertentu	1.515.068.000,00	1.491.058.500,00	98,42
<b>5.1.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>100.151.467.538,76</b>	<b>83.286.443.887,25</b>	<b>83,14</b>
5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56.084.034.756,60	45.829.562.440,00	81,36
5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.887.038.394,16	36.336.682.847,25	86,75
5.1.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	50.000.000,00	-	-
5.1.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.130.394.388,00	1.300.198.600,00	61,03
<b>5.1.2.18.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>11.532.853.831,00</b>	<b>10.417.808.047,25</b>	<b>90,33</b>
5.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113.330.000,00	74.890.500,00	66,08
5.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.706.706.262,00	2.326.126.695,25	85,94
5.1.2.18.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.395.000.000,00	2.376.082.803,00	99,21
5.1.2.18.05.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	570.000.000,00	530.975.300,00	93,15
5.1.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Drainase	622.000.000,00	620.565.000,00	99,77
5.1.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	338.100.000,00	334.785.200,00	99,02
5.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.068.592.409,00	958.636.300,00	89,71
5.1.2.18.09.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum	80.000.000,00	79.582.800,00	99,48
5.1.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	1.128.210.000,00	975.735.800,00	86,49
5.1.2.18.11.	Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat kerja	1.035.043.060,00	856.715.000,00	82,77
5.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	824.952.000,00	678.907.849,00	82,30
5.1.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan Mesin/Alat-alat Bengkel	44.200.000,00	40.530.000,00	91,70
5.1.2.18.15.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	20.000.000,00	19.900.000,00	99,50
5.1.2.18.16.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio	92.450.000,00	92.432.000,00	99,98
5.1.2.18.17.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	120.000.000,00	119.345.000,00	99,45
5.1.2.18.19.	Belanja Pemeliharaan Halaman dan Taman	329.270.100,00	289.008.800,00	87,77



Kode	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
5.1.2.18.20.	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata	25.000.000,00	23.897.000,00	95,59
5.1.2.18.21.	Belanja Pemeliharaan Obyek Wisata	20.000.000,00	19.692.000,00	98,46
<b>5.1.2.19.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>209.789.602.930,00</b>	<b>1.389.072.362,00</b>	<b>0,66</b>
5.1.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	209.789.602.930,00	1.389.072.362,00	0,66
<b>5.1.2.22.</b>	<b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b>	<b>436.180.000,00</b>	<b>366.913.750,00</b>	<b>84,31</b>
5.1.2.22.01.	Belanja Beasiswa tugas belajar D3	211.920.000,00	208.133.750,00	98,21
5.1.2.22.02.	Belanja Beasiswa tugas belajar S1	132.020.000,00	113.160.000,00	85,71
5.1.2.22.03.	Belanja Beasiswa tugas belajar S2	91.240.000,00	45.620.000,00	50,00
<b>5.1.2.23.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>10.658.323.632,20</b>	<b>7.533.871.000,00</b>	<b>70,69</b>
5.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	5.706.877.195,00	4.038.881.000,00	70,77
5.1.2.23.02.	Belanja sosialisasi	102.500.000,00	102.495.000,00	100,00
5.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	4.848.946.437,20	3.392.495.000,00	69,96
<b>5.1.2.29.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa Bos APBN</b>	<b>12.824.483.907,11</b>	<b>11.891.440.152,04</b>	<b>92,72</b>
5.1.2.29.01.	Belanja Persediaan BOS	5.693.590.434,86	5.135.578.360,50	90,20
5.1.2.29.02.	Belanja Pemeliharaan BOS	761.873.972,25	680.419.104,15	89,31
5.1.2.29.03.	Belanja Jasa BOS	5.591.824.086,24	5.489.422.187,39	98,17
5.1.2.29.04.	Belanja Perjalanan Dinas BOS	777.195.413,76	586.020.500,00	75,40
<b>5.1.2.30.</b>	<b>Uang untuk Lomba</b>	<b>468.500.000,00</b>	<b>443.250.000,00</b>	<b>94,61</b>
5.1.2.30.01.	Uang Untuk Pemenang Perlombaan	468.500.000,00	443.250.000,00	94,61
<b>5.1.2.31.</b>	<b>Belanja barang dan jasa BPSP</b>	<b>187.800.000,00</b>	<b>187.800.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.1.2.31.01.	Belanja Persediaan BPSP	111.600.000,00	111.600.000,00	100,00
5.1.2.31.02.	Belanja Pemeliharaan BPSP	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
5.1.2.31.03.	Belanja Jasa BPSP	38.200.000,00	38.200.000,00	100,00
5.1.2.31.04.	Belanja Perjalanan Dinas BPSP	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00

Terdapat konversi Belanja Barang dan Jasa Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Bantuan Sosial. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga ke Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

No	SKPD	Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	3.740.580.000,00	3.442.506.784,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27.228.040.050,00	25.781.754.888,30
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	357.000.000,00	355.380.100,00
4	Dinas Sosial	30.450.000,00	30.450.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.273.096.730,00	3.701.670.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	10.228.587.990,63	-
7	Dinas Pemberdayaan dan Desa	45.000.000,00	22.500.000,00
9	Dinas Perhubungan	1.925.000.000,00	1.912.245.000,00
10	Dinas Perikanan	12.346.559.478,00	11.824.375.000,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	250.000.000,00	249.881.500,00
12	Sekretariat Daerah	92.000.000,00	91.237.500,00
13	Kecamatan Seruyan Hilir	740.276.000,00	357.049.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>61.256.690.248,63</b>	<b>47.769.051.772,30</b>

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	TAHUN 2018	LEBIH/ (KURANG)
Dinas Pendidikan	26.801.550.978,83	22.547.148.928,04	84,13	23.850.520.972,05	(1.103.372.044,01)
Dinas Kesehatan	38.240.081.490,99	24.969.580.521,00	65,30	19.048.994.990,00	5.920.585.531,00
Rumah Sakit Umum Daerah	16.882.443.250,40	16.364.689.765,95	96,93	5.991.521.643,80	10.373.168.122,15
Rumah Sakit Umum Daerah Manau	7.576.712.250,00	7.348.720.836,11	96,99	3.794.461.700,90	3.554.259.135,21
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	20.879.909.629,00	16.677.600.006,00	79,87	6.553.672.129,00	10.123.927.877,00
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	5.365.683.670,00	4.802.618.445,00	89,51	2.094.396.163,00	2.708.222.282,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.981.629.117,00	2.936.659.651,00	98,49	2.454.176.824,00	482.482.827,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.698.285.484,00	2.613.053.200,00	96,84	3.040.968.783,00	(427.915.583,00)
Dinas Sosial	3.845.251.460,00	3.686.283.359,00	95,87	2.567.926.772,00	1.118.356.587,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.555.080.916,91	2.357.204.665,00	92,26	1.380.614.829,00	976.589.836,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.529.212.780,00	2.702.201.306,00	59,66	2.191.170.026,00	511.031.280,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	8.488.927.011,04	8.053.169.824,00	94,87	7.405.470.125,00	647.699.699,00
Dinas Lingkungan Hidup	217.055.666.286,48	4.984.011.901,00	2,30	3.887.983.119,00	1.096.028.782,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.940.700.660,00	2.651.758.638,00	90,17	2.850.427.361,00	(198.668.723,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.359.368.815,00	4.777.875.101,00	89,15	5.118.505.610,00	(340.630.509,00)
Dinas Perhubungan	3.403.245.454,00	3.157.497.731,00	92,78	3.091.219.131,00	66.278.600,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	6.051.814.715,00	5.131.547.499,00	84,79	3.057.423.136,00	2.074.124.363,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	1.829.267.740,00	1.774.513.087,00	97,01	2.480.549.466,00	(706.036.379,00)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.270.347.000,00	2.076.960.759,00	91,48	1.406.625.354,00	670.335.405,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	6.123.436.302,00	5.708.348.088,00	93,22	4.376.618.402,00	1.331.729.686,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.743.057.673,00	1.475.022.758,25	84,62	1.083.138.264,00	381.864.494,25
Dinas Perikanan	4.598.153.334,00	4.404.527.900,00	95,79	2.939.384.594,00	1.465.143.306,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.474.404.831,00	5.386.968.153,00	72,07	5.376.390.639,00	10.577.514,00
PPKD	-	-	-	-	-
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	16.797.887.849,20	11.046.753.532,00	65,76	7.699.175.959,00	3.347.577.573,00
Badan Pengelola Perpajakan Dan Retribusi Daerah	3.813.635.398,00	3.551.343.647,00	93,12	3.377.717.504,00	173.626.143,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.891.259.815,00	6.154.980.746,00	69,23	3.927.100.846,00	2.227.879.900,00
Sekretariat DPRD	22.971.381.829,56	21.311.923.062,25	92,78	14.004.743.943,00	7.307.179.119,25
DPRD	-	-	-	-	-
Sekretariat Daerah	20.868.857.625,00	19.822.224.273,00	94,98	16.272.440.542,00	3.549.783.731,00
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	TAHUN 2018	LEBIH/ (KURANG)
Inspektorat Daerah	7.077.708.215,00	5.012.157.586,00	70,82	4.224.716.155,00	787.441.431,00
Kecamatan Seruyan Tengah	2.539.480.000,00	2.194.483.681,00	86,41	1.556.347.465,00	638.136.216,00
Kecamatan Danau Sembuluh	1.076.491.600,00	1.041.585.746,00	96,76	897.758.012,00	143.827.734,00
Kecamatan Hanau	1.391.823.000,00	1.352.089.258,00	97,15	1.138.038.773,00	214.050.485,00
Kecamatan Seruyan Hilir	3.198.194.216,00	3.182.103.834,00	99,50	2.337.492.510,00	844.611.324,00
Kecamatan Seruyan Hulu	1.226.963.218,00	1.219.489.942,00	99,39	1.289.860.776,00	(70.370.834,00)
Kecamatan Batu Ampar	1.066.315.550,00	1.031.921.000,00	96,77	1.015.269.300,00	16.651.700,00
Kecamatan Seruyan Raya	985.742.988,81	878.608.398,00	89,13	940.805.400,00	(62.197.002,00)
Kecamatan Danau Seluluk	1.193.231.200,00	1.189.778.400,00	99,71	1.066.088.600,00	123.689.800,00
Kecamatan Seruyan Hilir Timur	1.314.322.688,00	1.219.124.852,00	92,76	926.897.915,00	292.226.937,00
Kecamatan Suling Tambun	1.178.895.000,00	1.119.828.500,00	94,99	781.720.000,00	338.108.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.744.738.914,00	6.267.711.006,00	64,32	2.472.049.757,00	3.795.661.249,00
<b>JUMLAH</b>	<b>505.031.159.935,22</b>	<b>244.184.069.585,60</b>	<b>48,35</b>	<b>179.780.383.490,75</b>	<b>64.403.686.094,85</b>

#### 5.1.2.c. Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00.

#### 5.1.2.d. Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.711.438.202,00 atau 85,57% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00.

#### 5.1.2.e. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp61.256.301.472,30 atau 79,24% dari pagu anggaran sebesar Rp77.304.203.948,63.

Belanja hibah tersebut merupakan belanja hibah uang pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan konversi belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2019 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
Belanja Hibah	16.047.613.700,00	13.487.249.700,00	84,05
Konversi dari Belanja Barang dan Jasa	61.256.590.248,63	47.769.051.772,30	77,98
<b>Jumlah</b>	<b>77.304.203.948,63</b>	<b>61.256.301.472,30</b>	<b>79,24</b>

#### 5.1.2.f. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp10.223.736.460,00 atau 93,53 % dari anggaran sebesar Rp10.930.500.000,00. Belanja tersebut merupakan belanja bantuan sosial PPKD dan konversi belanja barang dan jasa Dinas Sosial dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
Belanja Bantuan Sosial Barang/jasa Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan)	2.620.000.000,00	2.620.000.000,00	100,00
Belanja Bantuan Sosial Barang/jasa Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Dinas Sosial)	170.000.000,00	-	-
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan (PPKD)	120.000.000,00	72.990.000,00	60,83
Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat yang Tidak direncanakan (PPKD)	525.000.000,00	439.246.460,00	83,67
Bantuan Sosial untuk Peningkatan Pendidikan (PPKD)	4.118.000.000,00	3.714.000.000,00	90,19
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat yang direncanakan	3.377.500.000,00	3.377.500.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.930.500.000,00</b>	<b>10.223.736.460,00</b>	<b>93,53</b>

#### 5.1.2.g. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp364.951.709.295,62 atau 95,63% dari anggaran Rp381.620.867.687,97.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
Belanja Tanah	30.000.000,00	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	76.647.327.107,92	70.512.082.806,26	92,00
Belanja Gedung dan Bangunan	71.545.108.024,00	69.240.183.004,93	96,78
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	225.043.061.489,05	217.282.518.918,43	96,55
Belanja Aset Tetap Lainnya	8.355.371.067,00	7.916.924.566,00	94,75
<b>Jumlah</b>	<b>381.620.867.687,97</b>	<b>364.951.709.295,62</b>	<b>95,63</b>

Perbandingan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 dan 2018, sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Tanah	-	56.180.500,00	(56.180.500,00)
Belanja Peralatan dan Mesin	70.512.082.806,26	24.282.874.440,30	46.229.208.365,96
Belanja Gedung dan Bangunan	69.240.183.004,93	68.416.187.131,00	823.995.873,93
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	217.282.518.918,43	218.149.158.546,00	(866.639.627,57)
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.916.924.566,00	3.908.989.158,02	4.007.935.407,98
<b>Jumlah</b>	<b>364.951.709.295,62</b>	<b>314.813.389.775,32</b>	<b>50.138.319.520,30</b>

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>381.620.867.687,97</b>	<b>364.951.709.295,62</b>	<b>95,63</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.1.11.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung	30.000.000,00	-	-
<b>2.2.2.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>76.647.327.107,92</b>	<b>70.512.082.806,26</b>	<b>92,00</b>
2.2.2.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar Darat	9.889.855.150,00	9.318.817.020,00	94,23
2.2.2.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	373.900.000,00	348.122.500,00	93,11
2.2.2.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	18.739.285.632,00	15.712.992.153,00	83,85



Kode	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
2.2.2.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	585.000.000,00	568.410.000,00	97,16
2.2.2.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	35.000.000,00	34.800.000,00	99,43
2.2.2.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	30.600.000,00	24.148.460,00	78,92
2.2.2.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	187.000.000,00	178.651.000,00	95,54
2.2.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	1.025.450.000,00	952.787.872,00	92,91
2.2.2.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	514.400.000,00	511.722.500,00	99,48
2.2.2.13.	Belanja Modal Pengadaan Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.677.009.000,00	2.674.422.000,00	99,90
2.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	8.533.570.478,60	8.186.311.990,00	95,93
2.2.2.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.535.683.000,00	1.484.791.626,00	96,69
2.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.305.199.409,46	5.905.630.618,76	93,66
2.2.2.17.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.148.763.277,00	3.047.322.350,00	96,78
2.2.2.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	1.247.515.000,00	1.230.745.388,00	98,66
2.2.2.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	233.800.000,00	221.767.100,00	94,85
2.2.2.20.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	3.000.000,00	2.998.000,00	99,93
2.2.2.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	12.561.472.183,86	11.690.268.219,50	93,06
2.2.2.22.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	2.767.893.777,00	2.280.167.291,00	82,38
2.2.2.23.	Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium	1.100.556.000,00	1.062.391.300,00	96,53
2.2.2.24.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Peraga/Praktek Sekolah	76.400.000,00	75.642.400,00	99,01
2.2.2.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	3.185.000,00	3.185.000,00	100,00
2.2.2.35.	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
2.2.2.36.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos APBN	5.067.789.200,00	4.990.988.018,00	98,48
<b>2.2.3.</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>71.545.108.024,00</b>	<b>69.240.183.004,93</b>	<b>96,78</b>
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	61.214.863.604,00	59.007.310.321,24	96,39
2.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	8.152.256.820,00	8.066.634.299,41	98,95
2.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	7.900.000,00	7.840.000,00	99,24
2.2.3.12.	Belanja Modal Bangunan Konstruksi/ Papan Kantor/ Bundaran	2.170.087.600,00	2.158.398.384,28	99,46
<b>2.2.4.</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>225.043.061.489,06</b>	<b>217.282.518.918,43</b>	<b>96,56</b>
2.2.4.01.	Belanja Modal Pengadaan Jalan	170.443.075.084,83	163.451.046.092,79	95,90
2.2.4.02.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	21.485.225.750,00	21.305.024.713,00	99,16
2.2.4.03.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	13.627.509.000,00	13.322.091.757,11	97,76
2.2.4.08.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	69.550.000,00	69.400.000,00	99,78
2.2.4.09.	Belanja Model Pengadaan Bangunan Air Kotor	10.938.773.950,00	10.907.502.950,00	99,71
2.2.4.10.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air	2.982.106.396,00	2.913.272.550,00	97,69
2.2.4.11.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	80.000.000,00	79.647.150,00	99,56
2.2.4.15.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	416.378.328,22	336.740.000,00	80,87
2.2.4.19.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman	25.000.000,00	24.750.000,00	99,00

Kode	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
2.2.4.20.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum	336.755.000,00	334.233.500,00	99,25
2.2.4.21.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	715.000.000,00	661.075.750,00	92,46
2.2.4.23.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Gas	3.923.686.000,00	3.877.734.455,53	98,83
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.365.371.067,00	7.916.924.566,00	94,75
2.2.5.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku	286.125.000,00	39.985.466,00	13,97
2.2.5.03.	Belanja Modal Pengadaan Barang-barang Perpustakaan	624.940.000,00	611.730.000,00	97,89
2.2.5.04.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	172.650.000,00	165.456.000,00	95,83
2.2.5.07.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
2.2.5.08.	Belanja Modal Masterplan/ Studi/ Perekayasaan	6.549.300.000,00	6.399.545.900,00	97,71
2.2.5.09.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bos APBN	712.356.067,00	690.207.200,00	96,89

Rincian Realisasi Belanja Modal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran tahun 2019 sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	TAHUN 2018	LEBIH/ (KURANG)
Dinas Pendidikan	24.344.826.317,00	24.130.220.600,08	99,12	13.978.345.429,10	10.151.875.170,98
Dinas Kesehatan	11.134.373.939,44	10.726.006.057,87	96,33	11.706.802.364,38	(980.796.306,51)
Rumah Sakit Umum Daerah	8.936.433.529,00	8.317.832.353,10	93,08	3.636.310.750,44	4.681.521.602,66
Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	9.337.058.656,00	8.574.078.231,24	91,83	5.569.403.393,40	3.004.674.837,84
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	229.885.638.450,00	221.086.352.724,11	96,17	217.306.353.337,00	3.779.999.387,11
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	11.016.440.000,00	11.055.080.693,00	100,35	11.009.530.200,00	45.550.493,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	48.500.000,00	46.234.450,00	95,33	62.339.750,00	(16.105.300,00)
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	408.600.000,00	403.967.100,00	98,87	505.786.000,00	(101.818.900,00)
Dinas Sosial	272.000.000,00	270.010.000,00	99,27	300.123.000,00	(30.113.000,00)
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	601.650.000,00	594.783.500,00	98,86	643.080.000,00	(48.296.500,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.245.059.772,70	593.106.600,00	47,64	108.960.000,00	484.146.600,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	4.213.978.904,83	4.139.203.960,00	98,23	2.195.974.389,00	1.943.229.571,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.639.651.032,00	460.688.537,28	28,10	702.320.600,00	(241.632.062,72)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	988.937.500,00	952.008.125,00	96,27	731.631.400,00	220.376.725,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	347.500.000,00	345.371.900,00	99,39	389.534.500,00	(44.162.600,00)
Dinas Perhubungan	5.385.896.746,00	3.410.795.550,00	63,33	5.828.245.076,00	(2.417.449.526,00)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	TAHUN 2018	LEBIH/ (KURANG)
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	414.840.000,00	387.016.000,00	93,29	155.827.000,00	231.189.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	23.077.494.464,00	22.671.214.492,04	98,24	22.708.696.800,00	(37.482.307,96)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	627.450.000,00	611.467.107,00	97,45	63.354.000,00	548.113.107,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	1.868.955.750,00	1.853.874.000,00	99,19	2.215.468.200,00	(361.594.200,00)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.686.293.750,00	1.449.471.500,00	85,96	217.445.000,00	1.232.026.500,00
Dinas Perikanan	989.200.000,00	981.182.900,00	99,19	1.647.310.000,00	(666.127.100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.812.746.900,00	1.614.986.825,00	89,09	950.884.500,00	664.082.325,00
PPKD	-	-	-	-	-
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	6.841.225.000,00	6.675.395.434,20	97,58	4.839.912.090,00	1.835.483.344,20
Badan Pengelola Perpajakan Dan Retribusi Daerah	136.500.000,00	134.867.000,00	98,80	495.873.298,00	(361.006.298,00)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.284.054.000,00	1.272.935.000,00	99,13	921.587.000,00	351.348.000,00
Sekretariat DPRD	4.017.215.000,00	3.976.123.831,49	98,98	891.688.000,00	3.084.435.831,49
DPRD	-	-	-	-	-
Sekretariat Daerah	3.793.874.037,00	3.738.305.179,21	98,54	2.692.697.700,00	1.045.607.479,21
KDHWKADEHA	-	-	-	-	-
Inspektorat Daerah	1.095.171.940,00	1.006.159.000,00	91,87	1.198.776.000,00	(192.617.000,00)
Kecamatan Seruyan Tengah	688.356.000,00	630.656.000,00	91,62	129.750.000,00	500.906.000,00
Kecamatan Danau Sembuluh	86.360.000,00	85.853.000,00	99,41	130.590.000,00	(44.737.000,00)
Kecamatan Hanau	178.500.000,00	177.170.000,00	99,25	162.210.000,00	14.960.000,00
Kecamatan Seruyan Hilir	837.811.000,00	780.704.000,00	93,18	74.630.000,00	706.074.000,00
Kecamatan Seruyan Hulu	59.000.000,00	53.000.000,00	89,83	151.500.000,00	(98.500.000,00)
Kecamatan Batu Ampar	37.400.000,00	36.950.000,00	98,80	-	-
Kecamatan Seruyan Raya	60.050.000,00	60.000.000,00	99,92	30.700.000,00	29.300.000,00
Kecamatan Danau Seluluk	75.525.000,00	75.525.000,00	100,00	121.100.000,00	(45.575.000,00)
Kecamatan Seruyan Hilir Timur	224.800.000,00	214.234.700,00	95,30	64.820.000,00	149.414.700,00
Kecamatan Suling Tambun	101.000.000,00	100.575.200,00	99,58	28.000.000,00	72.575.200,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.820.500.000,00	21.258.322.745,00	97,42	245.830.000,00	21.012.482.745,00
<b>JUMLAH</b>	<b>381.620.867.687,97</b>	<b>364.981.709.295,62</b>	<b>95,63</b>	<b>314.813.389.775,32</b>	<b>80.138.319.620,30</b>

#### 5.1.2.h. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 dari anggaran Rp3.427.650.043,11.

#### 5.1.2.i. Transfer

Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp184.511.742.624,00 atau 97,58% dari anggaran sebesar Rp189.081.204.272,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
<b>Belanja Transfer</b>			
Bagi Hasil Pajak	8.431.400.540,00	4.775.807.022,00	56,64
Bantuan Keuangan ke pemerintah Daerah lainnya	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00
Bantuan Keuangan ke pemerintah Desa	179.677.214.732,00	178.801.563.602,00	99,51
Bantuan Keuangan Lainnya	727.589.000,00	689.372.000,00	94,75
<b>Jumlah</b>	<b>189.081.204.272,00</b>	<b>184.511.742.624,00</b>	<b>97,58</b>

Perbandingan realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Bagi Hasil Pajak	4.775.807.022,00	4.673.139.908,00	102.667.114,00
Bantuan Keuangan ke pemerintah Daerah lainnya	245.000.000,00	245.000.000,00	-
Bantuan Keuangan ke pemerintah Desa	178.801.563.602,00	154.025.606.300,00	24.775.957.302,00
Bantuan Keuangan Lainnya	689.372.000,00	718.952.000,00	(29.580.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>184.511.742.624,00</b>	<b>159.662.696.208,00</b>	<b>24.849.044.416,00</b>

### 5.1.3. PEMBIAYAAN

#### 5.1.3.a. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp364.252.101.677,93 dari pagu anggaran sebesar Rp 346.678.637.144,07.

#### 5.1.3.b. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebesar Rp0,00 dan Rp6.500.000.000,00.

## 5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

### 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Nilai saldo anggaran lebih awal pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp364.252.101.677,93 dan Rp283.619.174.164,60.

### 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Jumlah penggunaan SAL untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp364.252.101.677,93 dan Rp283.619.174.164,60.



### 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 239.807.898.675,81 dan Rp364.252.101.677,93.

### 5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 Saldo Anggaran Lebih adalah sebesar 239.807.898.675,81 dan Rp364.252.101.677,93.

## 5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

### 5.3.1 ASET

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	<u>3.279.683.519.259,68</u>	<u>3.222.832.655.709,67</u>

#### 5.3.1.a. Aset Lancar

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	<u>297.809.206.206,44</u>	<u>416.013.054.308,58</u>

#### Kas

Saldo Kas Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp239.097.279.437,81 dan Rp363.037.975.277,93 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Kas di Kas Daerah	233.101.103.566,48	360.859.277.128,44
Kas di Bendahara Penerimaan	2.849.722,00	10.254.452,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	994.904,00	
Kas di Bendahara JKN	761.664.354,71	1.281.651.794,38
Kas di Bendahara BOS APBN	903.133.281,62	886.791.903,11
Kas di Bendahara BLUD	4.327.533.609,00	-
Kas Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>239.097.279.437,81</b>	<b>363.037.975.277,93</b>

#### Kas di Kas Daerah

Merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang terdapat pada beberapa Bank sebagai berikut:

Dalam Rupiah

No	Nama Bank	Jenis Rek	Nomor Rek	Saldo 31 Des 2019	Saldo 31 Des 2018	Kenalkan/ Penurunan
1	Bank Kalteng	Giro	301.0301.00015-9	33.543.554.069,03	101.849.035.826,45	(68.305.481.757,42)
2	Bank Mandiri	Giro	159-00-0300002-2	20.462.450.647,45	205.849.472,99	20.256.601.174,46
3	BNI	Giro	07-9928266	1.018.088,00	6.454.846,00	(5.436.558,00)
4	BRI	Giro	0163-01-001165-30-2	-	2.432,00	(2.432,00)
<b>Total Giro</b>				<b>54.007.022.804,48</b>	<b>102.061.342.377,44</b>	<b>(48.054.319.572,96)</b>
5	Bank	Deposito	301.101.126.6	-	25.000.000.000,00	(25.000.000.000,00)

No	Nama Bank	Jenis Rek	Nomor Rek	Saldo 31 Des 2019	Saldo 31 Des 2018	Kenaikan/ Penurunan
	Kalteng					
6	Bank Kalteng	Deposito	301.0301.00015-9	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
7	Bank Mandiri	Deposito	159-02-0012141-5	-	35.000.000.000,00	(35.000.000.000,00)
8	Bank Mandiri	Deposito	159-02-0011438-6	-	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)
9	Bank Mandiri	Deposito	159-02-0015933-2	5.000.000.000,00		5.000.000.000,00
10	BNI	Deposito	576100293	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
11	BNI	Deposito	590195244	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
12	BNI	Deposito	376760021	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
13	BNI	Deposito	377446003	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
14	BNI	Deposito	724201445	-	50.000.000.000,00	(50.000.000.000,00)
15	BNI	Deposito	789276391	-	50.000.000.000,00	(50.000.000.000,00)
16	BNI	Giro Optima	900419484	35.000.000.000,00		35.000.000.000,00
17	BRI	Deposito	0163-01-001003-40-3	-	15.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)
18	BRI	Deposito	0163-01-002217-40-3	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00
19	BRI	Deposito	0163-01-001603-40-7	15.000.000.000,00		15.000.000.000,00
20	BRI	Deposito	0163-01-001989-40-5	35.000.000.000,00		35.000.000.000,00
<b>Total Deposito</b>				<b>180.000.000.000,00</b>	<b>260.000.000.000,00</b>	<b>(80.000.000.000,00)</b>
<b>Total Saldo Bank</b>				<b>234.007.022.804,48</b>	<b>362.061.342.377,44</b>	<b>(128.054.319.572,96)</b>
<b>Saldo Kas Daerah (Buku)</b>				<b>233.101.103.566,48</b>	<b>360.859.277.128,44</b>	<b>(127.758.173.561,96)</b>
<b>Selisih/Perbedaan</b>				<b>905.919.238,00</b>	<b>1.202.065.249,00</b>	<b>(296.146.011,00)</b>

Terdapat selisih/perbedaan antara saldo Kas Daerah di Bank dengan pelaporan saldo Kas Daerah berdasarkan perhitungan entitas akuntansi sebesar Rp905.919.238,00. Selisih kas tersebut terdiri dari:

a.	Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp710.619.238,00
b.	Kesalahan debet bank (tanpa SP2D) sebesar (Rp15.100.000,00)
c.	SP2D belum dibukukan bank sebesar Rp210.400.000,00 yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SP2D nomor 15642/SP2D/LS/2.03.01./12/2019 dengan nilai Rp202.500.000,00</li> <li>2. SP2D nomor 16393/SP2D/LS/2.03.01./12/2019 dengan nilai Rp7.900.000,00</li> </ol>

#### **Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp2.849.722,00 dan Rp10.254.452,00. Merupakan saldo Bendahara Penerimaan pada RSUD Hanau.

#### **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp994.904,00 dan Rp0,00. Merupakan Saldo Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### **Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional**

Saldo Kas di Bendahara JKN Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp761.664.354,71 dan Rp1.281.651.794,38. Kas di Bendahara JKN merupakan saldo kas per 31

Desember 2019 yang dikelola secara langsung oleh Bendahara JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) diseluruh Kabupaten Seruyan yang berjumlah 12 Puskesmas serta merupakan bagian dari Kas Daerah. Perhitungan saldo kas tersebut berdasarkan lampiran data-data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada BPKAD dalam rangka permohonan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B).

Rincian saldo kas di rekening JKN sebagai berikut:

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Puskesmas	per 31 Des 2019	per 31 Des 2018	Kenalkan/ Penurunan
1	Bank Kalteng	301-002-490-9	Puskesmas Kuala Pembuang I	139.865.266,00	203.189.781,00	(63.324.515,00)
2	Bank Kalteng	301-002-489-5	Puskesmas Kuala Pembuang II	135.821.674,00	236.684.835,00	(100.863.161,00)
3	Bank Kalteng	303-002-14-7	Puskesmas Terawan	17.095.906,00	132.847.314,00	(115.751.408,00)
4	Bank Kalteng	303-002-12-1	Puskesmas Telaga Pulang	1.684.175,00	57.846.958,00	(56.162.783,00)
5	Bank Kalteng	303-002-10-4	Puskesmas Denau Sembutih	2.706.470,68	32.804.117,44	(30.097.646,76)
6	Bank Kalteng	402-002-300-4	Puskesmas Pembuang Hulu	94.122.287,50	175.850.152,60	(81.727.865,10)
7	Bank Kalteng	402-002-301-2	Puskesmas Asam Baru	38.547.295,70	108.523.101,00	(69.975.805,30)
8	Bank Kalteng	402-002-302-1	Puskesmas Sandul	83.891.387,25	170.977.322,61	(87.085.935,36)
9	Bank Kalteng	402-002-303-9	Puskesmas Rantau Pulut I	25.017.493,60	93.275.171,60	(68.257.678,00)
10	Bank Kalteng	402-002-305-5	Puskesmas Tumbang Langkai	4.660.188,00	18.144.189,00	(13.484.001,00)
11	Bank Kalteng	402-002-306-3	Puskesmas Rantau Pulut II	111.307.955,00	42.344.747,00	68.963.208,00
12	Bank Kalteng	402-002-307-1	Puskesmas Tumbang Manjul	106.944.255,98	9.164.105,13	97.780.150,85
<b>Total Kas JKN</b>				<b>761.664.354,71</b>	<b>1.281.651.794,38</b>	<b>(519.987.439,67)</b>

#### **Kas di Bendahara BOS APBN**

Saldo Kas di Bendahara BOS APBN Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp903.133.281,62 dan Rp886.791.903,11, merupakan saldo kas per 31 Desember 2019 yang dikelola secara langsung oleh Bendahara BOS pada SD/SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Perhitungan saldo kas tersebut berdasarkan data saldo kas yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada BPKAD dalam rangka permohonan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B).

#### **Kas di Bendahara BLUD**

Saldo Kas di Bendahara BLUD Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp4.327.533.609,00 dan Rp0,00, merupakan saldo kas Bendahara BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang berdasarkan Laporan Keuangan Audited RSUD Kuala Pembuang Tahun Anggaran 2019 yang telah diaudit oleh KAP SODIKIN & HARIJANTO. RSUD Kuala Pembuang menjadi BLUD sesuai Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/540/2017, namun pola pengelolaan keuangan BLUD efektif dilaksanakan pada tahun 2019.

#### **Kas Lainnya**

Saldo Kas Lainnya Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

## Piutang

Saldo Piutang Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp20.712.715.295,54 dan Rp20.617.732.210,44 terdiri dari:

Uraian	Saldo 31 Des 2019	Saldo 31 Des 2018	Kenaikan/ Penurunan
Piutang Pajak	7.700.013.998,61	6.883.927.851,00	816.086.147,61
Piutang Retribusi	318.061.887,00	4.519.590.154,00	(4.201.528.267,00)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.662.454.526,54	816.732.944,82	845.721.581,72
Piutang Transfer	11.032.184.883,39	8.397.481.260,62	2.634.703.622,77
<b>Jumlah Piutang</b>	<b>20.712.715.295,54</b>	<b>20.617.732.210,44</b>	<b>94.983.085,10</b>

## Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp7.700.013.998,61 dan Rp6.883.927.851,00

Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Des 2019	Saldo 31 Des 2018	Kenaikan/ Penurunan
Pajak Reklame	21.891.500,96	27.642.371,00	(5.750.870,04)
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	420.997.911,50	537.300.063,00	(116.302.151,50)
Pajak Air Tanah	419.915.936,15	455.637.253,00	(35.721.316,85)
PBB P2	6.823.608.650,00	5.849.748.164,00	973.860.486,00
BPHTB	13.600.000,00	13.600.000,00	-
<b>Jumlah Piutang Pajak</b>	<b>7.700.013.998,61</b>	<b>6.883.927.851,00</b>	<b>816.086.147,61</b>

Pemerintah Kabupaten Seruyan tidak menyajikan Piutang Bunga/Denda PBB-P2 hasil perhitungan tahun 2019 dikarenakan masih dalam proses validasi dan verifikasi data.

## Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Seruyan Per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp318.061.887,00 dan Rp4.519.590.154,00

Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31 Des 2019	Saldo 31 Des 2018	Kenaikan/ Penurunan
Retribusi Pelayanan Kesehatan	272.930.127,00	4.485.778.054,00	(4.212.847.927,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	44.131.760,00	33.812.100,00	10.319.660,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. – LRA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Jumlah Piutang Retribusi</b>	<b>318.061.887,00</b>	<b>4.519.590.154,00</b>	<b>(4.201.528.267,00)</b>

## Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain Lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Seruyan Per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp1.662.454.526,54 dan Rp816.732.944,82.

Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31 Des 2019	Saldo 31 Des 2018	Kenaikan/ Penurunan
Penerimaan Jasa Giro	610.546.042,50	720.387.366,82	(109.841.324,32)
Pendapatan Denda Pajak	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	493.208,00	302.242,00	190.966,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.039.837.136,00	96.043.336,00	943.793.800,00



Uraian	Saldo 31 Des 2019	Saldo 31 Des 2018	Kenaikan/ Penurunan
Bagian Lancar TGR	11.578.140,04	-	11.578.140,04
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.862.454.526,54	816.732.944,82	845.721.581,72

Piutang Lain Lain PAD yang Sah Lainnya merupakan piutang pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kuala Pembuang dan piutang bagi hasil penerbangan yang dicatat sebagai piutang berdasarkan Surat dari Aviastar Nomor Surat nomor 102REV/ASM/DZ/III/2016 Tanggal 24 maret 2016. Piutang Bagi Hasil Penerbangan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Seruyan atas bagi hasil penerbangan bulan Februari sampai dengan bulan November 2016.

#### Piutang Transfer

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp11.032.184.883,39 dan Rp8.397.481.260,62 merupakan piutang bagi hasil pajak provinsi yang belum disalurkan pada Pemerintah Kabupaten Seruyan dan diakui sebagai hak Pemerintah Kabupaten Seruyan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/26/2020 tanggal 15 Februari 2020 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap III (tiga) pada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 yang disalurkan pada Tahun Anggaran 2020.

#### Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp4.035.548.237,05 dan Rp3.622.343.102,09, merupakan penyisihan atas piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2019.

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seruyan, "piutang dinilai berdasarkan kualitas piutang dengan cara penilaian ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh pihak yang terutang". Pemerintah Kabupaten Seruyan tidak melakukan penyisihan atas piutang dana transfer.

Rincian penyisihan piutang per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Pajak	3.942.647.330,50
Penyisihan Piutang Retribusi	44.579.388,05
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah	48.321.518,50
<b>Jumlah Penyisihan</b>	<b>4.035.548.237,05</b>

#### Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp140.958.904,11 dan Rp126.397.314,05 merupakan beban atas pembayaran Asuransi Kendaraan Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Seksetaris Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Seruyan.

#### Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp41.693.800.806,03 dan Rp35.853.292.608,25 merupakan nilai saldo persediaan yang dimiliki oleh SKPD termasuk didalamnya persediaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang dan Persediaan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Rincian jenis Persediaan tahun 2019 sebagai berikut:

No	Nama Barang	Nilai
	<b>Persediaan Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.926.360.673,00</b>
1	Alat Tulis Kantor	1.154.086.326,00
2	Alat Listrik dan Elektronik	10.093.000,00

3	Prangko, Meterai, dan Benda Pos Lainnya	5.737.000,00
4	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	78.877.350,00
5	Bahan Bakar Minyak/Gas	5.700.000,00
6	Cetakan	467.265.547,00
7	Peralatan Rumah Tangga	100.017.000,00
8	Perlengkapan Dinas	104.584.450,00
	<b>Persediaan Bahan/Material</b>	<b>6.747.800.720,83</b>
1	Bahan Obat – Obatan	5.039.204.912,13
2	Bahan Kimia	883.342.499,70
3	Bahan Makanan Pokok	7.288.000,00
4	Alat Kesehatan	614.084.509,00
5	Benda Berharga	203.880.800,00
	<b>Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat</b>	<b>33.019.639.412,20</b>
1	Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	33.019.639.412,20
	<b>Total</b>	<b>41.693.800.806,03</b>

Saldo persediaan obat-obatan per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

No	Nama Puskesmas	Persediaan per 31 Des 2019
1	Puskesmas Kuala Pembuang I	69.576.264,94
2	Puskesmas Kuala Pembuang II	34.311.968,00
3	Puskesmas Terawan	46.885.648,00
4	Puskesmas Danau Sembuluh	63.151.274,00
5	Puskesmas Telaga Pulang	31.823.132,70
6	Puskesmas Pembuang Hulu	228.425.312,00
7	Puskesmas Asam Baru	51.045.979,00
8	Puskesmas Sandul	53.074.301,00
9	Puskesmas Rantau Pulut I	52.556.248,00
10	Puskesmas Rantau Pulut II	28.675.754,00
11	Puskesmas Tumbang Manjul	22.132.565,00
12	Puskesmas Tumbang Langkai	19.064.437,16
13	UPTD Gudang Farmasi	1.107.279.415,20
14	Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kuala Pembuang	1.628.323.626,70
15	RSUD Hanau	1.574.010.461,43
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	28.868.525,00
	<b>Total</b>	<b>5.039.204.912,13</b>

Rincian persediaan Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

No	SKPD	Saldo Akhir 31 Des 2019 (Rp)	Saldo Awal 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan /Penurunan
1	2	3	4	5
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	10.482.500,00	2.831.750,00	7.650.750,00
2	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas	3.170.750,00	6.046.500,00	(2.875.750,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup	4.099.000,00	8.976.638,00	(4.877.638,00)
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.691.100,00	2.553.300,00	137.800,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	44.083.028,00	180.150.110,00	(136.067.082,00)

No	SKPD	Saldo Akhir 31 Des 2019 (Rp)	Saldo Awal 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan /Penurunan
1	2	3	4	5
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.902.290,00	7.127.330,00	(2.225.040,00)
7	Dinas Perikanan	26.979.500,00	29.789.300,00	(2.809.800,00)
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	647.535.247,00	540.402.712,00	107.132.535,00
9	Dinas Kesehatan	2.616.986.808,00	1.305.265.421,73	1.311.721.386,27
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.092.497.076,20	30.216.450.250,00	1.876.046.826,20
11	Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah	239.360.800,00	116.080.450,00	123.280.350,00
12	Dinas Pendidikan	3.550.000,00	17.850.006,00	(14.300.006,00)
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	423.107.800,00	152.070.700,00	271.037.100,00
14	Dinas Perhubungan	8.666.800,00	14.658.650,00	(5.991.850,00)
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	1.429.500,00	560.000,00	869.500,00
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	182.376.875,00	198.886.208,00	(16.509.333,00)
17	Dinas Sosial	1.256.000,00	3.532.200,00	(2.276.200,00)
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.328.700,00	4.027.780,00	(1.699.080,00)
19	Inspektorat Kabupaten	19.146.500,00	20.448.275,00	(1.301.775,00)
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.868.500,00	6.675.900,00	192.600,00
21	Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan	4.337.000,00	2.106.000,00	2.231.000,00
22	Kecamatan Batu Ampar	804.100,00	1.069.300,00	(265.200,00)
23	Kecamatan Danau Sembuluh	809.000,00	936.500,00	(127.500,00)
24	Kecamatan Hanau	1.765.000,00	1.952.000,00	(187.000,00)
25	Kecamatan Danau Seluluk	506.000,00	620.000,00	(114.000,00)
26	Kecamatan Seruyan Hilir	3.531.000,00	8.875.000,00	(5.344.000,00)
27	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	4.407.400,00	3.598.482,00	808.918,00
28	Kecamatan Seruyan Hulu	2.250.000,00	3.080.000,00	(830.000,00)
29	Kecamatan Seruyan Raya	506.000,00	719.000,00	(213.000,00)
30	Kecamatan Seruyan Tengah	1.105.000,00	1.075.000,00	30.000,00
31	Kecamatan Suling Tambun	976.000,00	595.000,00	381.000,00
32	Rumah Sakit Umum Daerah	1.950.331.193,40	1.059.921.733,27	890.409.460,13
33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.403.500,00	4.412.000,00	(1.008.500,00)
34	Sekretariat Daerah	1.376.834.707,00	1.396.670.147,00	(19.835.440,00)
35	Sekretariat DPRD	118.407.300,00	2.406.600,00	116.000.700,00
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	101.162.850,00	2.182.000,00	98.980.850,00
37	Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	1.756.081.931,43	523.955.261,25	1.232.126.670,18
38	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	19.286.500,00	2.351.994,00	16.934.506,00
39	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.930.000,00	720.460,00	4.209.540,00
40	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	847.550,00	1.662.650,00	(815.100,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>41.693.800.806,03</b>	<b>35.863.292.608,25</b>	<b>6.840.508.197,78</b>

### 5.3.1.b. Investasi Jangka Panjang

#### Investasi Permanen

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp56.627.777.604,00 dan Rp55.282.963.263,00 merupakan investasi dalam saham pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, penyertaan saham pada PT JAMKRIDA dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2019	Saldo 31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan
PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	39.000.000.000,00	39.000.000.000,00	0,00
PT. JAMKRIDA	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	14.627.777.604,00	13.282.963.263,00	1.344.814.341,00
Jumlah	56.627.777.604,00	55.282.963.263,00	1.344.814.341,00

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan penyertaan modal pemerintah daerah:

#### a. Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Seruyan mempunyaikewajiban penyertaanmodal pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp19.500.000.000,00 (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Pemerintah Kabupaten Seruyan telah menyelesaikan kewajiban penyertaan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seruyan sampai dengan tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp39.000.000.000,00 dengan alokasi penyertaan sebagai berikut:

- 1) Alokasi penyertaan sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp22.000.000.000,00;
- 2) Alokasi penyertaan tahun 2015 sebesar Rp3.500.000.000,00;
- 3) Alokasi penyertaan tahun 2016 sebesar Rp4.500.000.000,00;
- 4) Alokasi penyertaan tahun 2018 sebesar Rp5.500.000.000,00; dan
- 5) Alokasi penyertaan tahun 2019 sebesar Rp3.500.000.000,00.

#### b. Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Penyertaan modal pada PDAM Seruyan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan..Ekuitas PDAM Tahun Anggaran 2019 disajikan berdasarkan data Laporan Keuangan *Audited*. Pemerintah Kabupaten Seruyan menyajikan nilai inventasi pada PDAM dengan menggunakan metode ekuitas.

#### c. Penyertaan modal pada PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Seruyan mempunyai kewajiban penyertaan modal kepada PT JAMKRIDA KALTENG sebesar Rp3.000.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Seruyan telah menyelesaikan kewajiban penyertaan modal kepada PT. Jamkrida sebesar Rp3.000.000.000,00.



### 5.3.1.c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp4.347.030.716.059,60 dan Rp3.973.415.357.616,97, merupakan saldo aset tetap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dengan rincian sebagai berikut:

No	JENIS ASET	Saldo	Saldo
		31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Tanah	199.911.606.997,26	199.852.137.537,00
2	Peralatan dan Mesin	378.567.489.672,02	316.010.052.143,83
3	Gedung dan Bangunan	854.460.724.153,79	788.456.356.446,69
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.771.783.471.529,83	2.543.740.279.924,43
5	Aset Tetap Lainnya	27.658.155.400,02	15.435.120.734,02
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	114.649.268.306,68	109.921.410.831,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.347.030.716.059,60</b>	<b>3.973.415.357.616,97</b>

Nilai buku aset tetap Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.831.103.087.970,55 dengan rincian sebagai berikut:

No	JENIS ASET	Saldo	Penyusutan	Nilai Buku
		31 Desember 2019	31 Desember 2019	
1	Tanah	199.911.606.997,26	-	199.911.606.997,26
2	Peralatan dan Mesin	378.567.489.672,02	242.589.721.276,77	135.977.768.395,25
3	Gedung dan Bangunan	854.460.724.153,79	116.808.412.011,66	737.652.312.142,13
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.771.783.471.529,83	1.156.552.667.051,59	1.615.230.804.478,24
5	Aset Tetap Lainnya	27.658.155.400,02	-	27.658.155.400,02
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	114.649.268.306,68	-	114.649.268.306,68
	<b>Jumlah</b>	<b>4.347.030.716.059,80</b>	<b>1.516.950.800.340,02</b>	<b>2.831.079.915.719,58</b>

#### Tanah

Saldo Tanah Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp199.911.606.997,26 dan Rp199.852.137.537,00 mengalami kenaikan sebesar Rp59.469.460,26 dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		199.852.137.537,00
2	Pertambahan		
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	1.526.949.460,26	
	<b>Jumlah Pertambahan</b>		<b>1.526.949.460,26</b>
3	Pengurangan		
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	1.467.480.000,00	
	<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>1.467.480.000,00</b>
4	Saldo Akhir		199.911.606.997,26

Pemerintah Kabupaten Seruyan masih mencatat Tanah yang tidak ada bukti kepemilikan/sertifikat. Untuk permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Seruyan telah mengusulkan penerbitan sertifikat tetapi belum dapat diproses oleh Badan Pertanahan Nasional dikarenakan adanya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 jo. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Pemerintah Kabupaten Seruyan juga masih mencatat Tanah dengan bukti

kepemilikan/sertifikat atas nama masyarakat. Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Seruyan akan melakukan verifikasi dan koreksi pencatatan tanah jika hasil verifikasi tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut milik masyarakat dan tidak pernah diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan.

#### **Peralatan Dan Mesin**

Saldo Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp378.567.489.672,02 dan Rp316.010.052.143,83 mengalami kenaikan sebesar Rp62.557.437.528,19 dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>Saldo Awal</b>		<b>316.010.052.143,83</b>
<b>2</b>	<b>Pertambahan</b>		
	Realisasi Belanja Modal 2019	70.512.082.806,26	
	Hibah	51.158.025,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	2.833.448.191,92	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	213.540.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	183.773.000,00	
	<b>Jumlah Pertambahan</b>		<b>73.794.002.023,18</b>
<b>3</b>	<b>Pengurangan</b>		
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	889.121.700,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	118.393.650,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	13.083.200,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ATB	461.075.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	7.387.306.712,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	2.193.924.424,99	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	173.659.808,00	
	<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>11.236.564.494,99</b>
<b>4</b>	<b>Saldo Akhir</b>		<b>378.567.489.672,02</b>

#### **Gedung dan Bangunan**

Saldo Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp854.460.724.153,79 dan Rp788.456.356.446,69 mengalami kenaikan sebesar Rp66.004.367.707,10 dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>Saldo Awal</b>		<b>788.456.356.446,69</b>
<b>2</b>	<b>Pertambahan</b>		
	Realisasi Belanja Modal 2019	69.240.183.004,93	
	Hibah	159.341.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	1.467.480.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	2.502.313.700,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	6.068.525.250,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	21.390.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	277.205.600,00	

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
	Aset Yang Belum Tercatat	172.830.000,00	
	<b>Jumlah Pertambahan</b>		<b>79.909.268.554,93</b>
<b>3</b>	<b>Pengurangan</b>		
	Koreksi Pembayaran Utang	207.461.550,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	1.529.494.460,26	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	2.830.903.191,92	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	3.908.449.785,97	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	3.525.745.359,68	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	1.672.079.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	69.345.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	171.422.500,00	
	<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>13.904.900.847,83</b>
<b>4</b>	<b>Saldo Akhir</b>		<b>854.460.724.153,79</b>

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 mencatat Gedung berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/379/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Penetapan Nilai dan Pencatatan Gedung dan Bangunan Gedung Serbaguna Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan ada daftar barang pengguna Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan.

#### **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp2.771.783.471.529,83 dan Rp2.543.740.279.924,43 mengalami kenaikan sebesar Rp228.043.191.605,40 dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>Saldo Awal</b>		<b>2.543.740.279.924,43</b>
<b>2</b>	<b>Pertambahan</b>		
	Realisasi Belanja Modal 2019	217.282.518.918,43	
	Hibah	17.487.435.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	118.393.650,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	3.908.449.785,97	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	1.153.879.400,00	
	<b>Jumlah Pertambahan</b>		<b>239.950.676.754,40</b>
<b>3</b>	<b>Pengurangan</b>		
	Koreksi Pembayaran Utang	3.150.901.283,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	213.540.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	7.155.613.250,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	1.387.430.616,00	
	<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>11.907.485.149,00</b>
<b>4</b>	<b>Saldo Akhir</b>		<b>2.771.783.471.529,83</b>

#### **Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp27.658.155.400,02 dan Rp15.435.120.734,02 mengalami kenaikan sebesar Rp12.223.034.666,00 dengan rincian penambahan dan

pengurangan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		15.435.120.734,02
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal 2019	7.916.924.566,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	13.083.200,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	855.261.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ATB	6.961.300.000,00	
	Jumlah Pertambahan		15.746.568.766,00
3	Pengurangan		
	Koreksi Pembayaran Utang	176.410.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	183.773.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	1.153.879.400,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	1.196.046.500,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	813.425.200,00	
	Jumlah Pengurangan		3.523.534.100,00
4	Saldo Akhir		27.658.155.400,02

#### Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp114.649.268.306,68 dan Rp109.921.410.831,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.727.857.475,68 dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		109.921.410.831,00
2	Pertambahan		
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	3.525.745.359,68	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	1.387.430.616,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	1.196.046.500,00	
	Jumlah Pertambahan		6.109.222.475,68
3	Pengurangan		
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	526.104.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	855.261.000,00	
	Jumlah Pengurangan		1.381.365.000,00
4	Saldo Akhir		114.649.268.306,68

Rincian jumlah Kontruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan tahun pengadaan sebagai berikut:

TAHUN KDP	JUMLAH
2011	12.430.000,00
2012	13.009.507.850,00
2013	50.000.000.000,00
2014	1.214.111.000,00
2015	1.479.387.000,00
2016	6.460.255.700,00
2017	9.289.795.500,00



TAHUN KDP	JUMLAH
2018	28.851.894.281,00
2019	4.331.886.975,68
<b>JUMLAH</b>	<b>114.649.268.306,68</b>

#### Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 Rp1.515.950.800.340,02. Pemerintah Kabupaten Seruyan melakukan perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus disusutkan perbulan. Rincian penyusutan aset tetap sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan
1	Peralatan dan Mesin	242.589.721.276,76
2	Gedung dan Bangunan	116.808.412.011,66
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.156.552.667.051,60
<b>JUMLAH</b>		<b>1.515.950.800.340,02</b>

#### 5.3.1.d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp94.366.619.729,66 dan Rp59.155.229.101,12 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	710.619.238,00	1.214.126.400,00
Tagihan Penjualan Angsuran	1.703.618.475,00	1.703.618.475,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	49.757.492.038,03	49.828.671.689,78
Aset Tidak Berwujud	9.997.613.250,00	16.572.638.250,00
Aset Lain-Lain	78.518.998.396,00	74.094.018.281,00
Amortisasi	(2.903.983.404,88)	(3.430.487.461,21)
Penyusutan Aset Lain Lain	(43.417.738.262,49)	(37.023.212.458,27)
Penyisihan TGR	-	(43.804.144.075,16)
<b>JUMLAH</b>	<b>94.366.619.729,66</b>	<b>59.155.229.101,12</b>

#### 5.3.1.d.1) Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp710.619.238,00 dan Rp1.214.126.400,00 merupakan saldo Dana Desa yang belum disalurkan per 31 Desember 2019 terdiri dari:

No	Desa	Pagu (Rp)	Jumlah Penyaluran (Rp)	Sisa Yang Belum Disalurkan (Rp)
1	Mongoh Juoi	888.274.038,00	177.654.800,00	710.619.238,00

#### 5.3.1.d.2) Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp1.703.618.475,00 dan Rp1.703.618.475,00.

Rincian Tagihan penjualan Angsuran sebagai berikut:

##### 1. Dinas Pertanian dan Peternakan

Saldo tagihan penjualan angsuran Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Dinas Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.645.188.475,00.

1	Saldo Awal		16.572.638.250,00
2	Portambahan		
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIR B	461.075.000,00	

TAHUN KDP	JUMLAH
2018	28.851.894.281,00
2019	4.331.886.975,68
<b>JUMLAH</b>	<b>114.649.268.306,68</b>

### Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 Rp1.515.950.800.340,02. Pemerintah Kabupaten Seruyan melakukan perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus disusutkan perbulan. Rincian penyusutan aset tetap sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan
1	Peralatan dan Mesin	242.589.721.276,76
2	Gedung dan Bangunan	116.808.412.011,66
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.156.552.667.051,60
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.515.950.800.340,02</b>

### 5.3.1.d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp94.366.619.729,66 dan Rp59.155.229.101,12 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	710.619.238,00	1.214.126.400,00
Tagihan Penjualan Angsuran	1.703.618.475,00	1.703.618.475,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	49.757.492.038,03	49.828.671.689,78
Aset Tidak Berwujud	9.997.813.250,00	16.572.838.250,00
Aset Lain-Lain	78.518.998.396,00	74.094.018.281,00
Amortisasi	(2.903.983.404,88)	(3.430.487.461,21)
Penyusutan Aset Lain Lain	(43.417.738.262,49)	(37.023.212.458,27)
Penyisihan TGR	-	(43.804.144.075,18)
<b>JUMLAH</b>	<b>94.366.619.729,66</b>	<b>69.155.229.101,12</b>

#### 5.3.1.d.1) Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp710.619.238,00 dan Rp1.214.126.400,00 merupakan saldo Dana Desa yang belum disalurkan per 31 Desember 2019 terdiri dari:

No	Desa	Pagu (Rp)	Jumlah Penyaluran (Rp)	Sisa Yang Belum Disalurkan (Rp)
1	Mongoh Juoi	868.274.038,00	177.654.800,00	710.619.238,00

#### 5.3.1.d.2) Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp1.703.618.475,00 dan Rp1.703.618.475,00.

Rincian Tagihan penjualan Angsuran sebagai berikut:

##### 1. Dinas Pertanian dan Peternakan

Saldo tagihan penjualan angsuran Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Dinas Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.645.188.475,00.

Saldo tagihan penjualan angsuran Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari:

- a. Saldo tagihan penjualan angsuran Ternak sebesar Rp1.035.612.655,00 merupakan pengadaan ternak yang disalurkan kepada masyarakat dan masyarakat membayar dengan cara mencicil kepada Dinas Pertanian dan Peternakan untuk disetorkan ke kas daerah.

Aset tagihan penjualan angsuran masih mencatat ternak yang telah dinyatakan mati sesuai Berita Acara Kematian sebesar Rp69.207.300,00 untuk permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan akan menindaklanjuti dengan melakukan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Saldo tagihan penjualan angsuran ALSINTAN sebesar Rp609.575.820,00 merupakan pengadaan alat pertanian yang disalurkan kepada masyarakat dan masyarakat membayar dengan cara mencicil kepada Dinas Pertanian dan Peternakan untuk disetorkan ke kas daerah.

## 2. Dinas Kelautan dan Perikanan

Saldo tagihan penjualan angsuran Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Dinas Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2019 sebesar Rp58.430.000,00.

### 5.3.1.d.3) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp49.757.492.038,03 dan Rp49.828.671.689,78 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2018	49.828.671.689,78
Penambahan	0,00
Pengurangan	71.179.651,75
Saldo Akhir per 31 Desember 2019	49.757.492.038,03

Pada Tahun 2019 tidak ada Penetapan Pembebanan Kerugian Daerah.

Pengurangan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan Realisasi Pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp57.744.791,71, koreksi atas pembayaran tahun sebelumnya yang baru dicatat tahun 2019 sebesar Rp1.856.720,00 dan reklasifikasi bagian lancar ke Piutang sebesar Rp11.578.140,04.

### 5.3.1.d.4) Penyisihan TGR

Penyisihan TGR per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp0,00 dan Rp43.804.144.075,18. Pemerintah Kabupaten Seruyan tidak menyajikan penyisihan TGR dan mengoreksi saldo awal penyisihan TGR karena tidak diatur baik pada Buletin Teknis Nomor 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah ataupun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seruyan.

### 5.3.1.d.5) Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp9.997.613.250,00 dan Rp16.572.638.250,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.575.025.000,00.

Rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		16.572.638.250,00
2	Pertambahan		
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	461.075.000,00	

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
	Jumlah Pertambahan		461.075.000,00
3	Pengurangan		-
	Musnah	74.800.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	6.961.300.000,00	
	Jumlah Pengurangan		7.036.100.000,00
4	Saldo Akhir		9.997.613.250,00

Rincian Aset Tak Berwujud pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan sebagai berikut:

No	SKPD	Jumlah Aset Tidak Berwujud
1	Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	5.775.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.691.204.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	235.204.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	385.330.000,00
5	Dinas Perhubungan	797.239.750,00
6	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	31.150.000,00
7	Dinas Perikanan	852.238.500,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.397.703.000,00
9	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	583.010.000,00
10	Badan Pengelola Perpajakan Dan Restribusi Daerah	195.509.000,00
11	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	352.978.000,00
12	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	470.272.000,00
	Jumlah	9.997.613.250,00

#### 5.3.1.d.6) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp2.903.983.404,88 dan Rp3.430.487.461,21.

#### 5.3.1.d.7) Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp78.518.998.396,00 dan Rp74.094.018.281,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.424.980.115,00

Rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		74.094.018.281,00
2	Pertambahan		
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	7.387.306.712,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	1.672.079.000,00	
	Jumlah Pertambahan		9.059.385.712,00
3	Pengurangan		
	Penghapusan	4.634.405.597,00	
	Jumlah Pengurangan		4.634.405.597,00
4	Saldo Akhir		78.518.998.396,00



Aset lain-lain adalah Aset Tetap yang tidak dipergunakan lagi secara aktif untuk menunjang operasional Pemerintah Daerah terdiri dari:

No	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	DINAS PENDIDIKAN	2.176.446.624,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
2	DINAS KESEHATAN	3.623.187.338,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.468.907.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU	120.624.100,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30.362.414.073,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	144.851.250,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	99.355.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
8	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN LINMAS	893.175.660,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
9	DINAS SOSIAL	278.665.300,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	145.923.500,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	506.396.800,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	6.019.621.962,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	434.035.900,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	328.950.600,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
16	DINAS PERHUBUNGAN	9.953.676.127,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	72.168.600,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	1.202.970.500,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.150.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	837.279.556,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
21	DINAS PERPUSTAKAAN, DAN KEARSIPAN	29.967.500,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
22	DINAS PERIKANAN	2.563.075.685,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.539.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.036.710.600,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.729.073.270,00	Aset dimanfaatkan Pihak Ke 3 (Pinjam Pakal)
26	BADAN PENGELOLA PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH	45.850.500,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER	243.870.900,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya

No	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
	DAYA MANUSIA		
28	SEKRETARIAT DPRD	1.221.709.217,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
29	SEKRETARIAT DAERAH	7.808.833.594,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
30	INSPEKTORAT DAERAH	81.529.300,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
31	KECAMATAN SERUYAN TENGAH	18.250.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
32	KECAMATAN DANAU SEMBULUH	994.416.700,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
33	KECAMATAN HANAU	439.817.650,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
34	KECAMATAN SERUYAN HILIR	201.863.525,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
35	KECAMATAN SERUYAN HULU	157.587.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
36	KECAMATAN BATU AMPAR	27.165.500,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
37	KECAMATAN SERUYAN RAYA	74.562.750,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
38	KECAMATAN DANAU SELULUK	63.340.795,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
39	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR	73.320.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
40	KECAMATAN SULING TAMBUN	16.715.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
<b>Jumlah</b>		<b>78.518.998.396,00</b>	

#### 5.3.1.d.8) Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp43.417.738.262,49 dan Rp37.023.212.458,27

#### 5.3.2. Kewajiban

31 Desember 2019

31 Desember 2018

**2.909.242.243,31**

**18.876.412.345,05**

#### 5.3.2.a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00,

#### 5.3.2.b. Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp727.254.238,00 dan Rp4.648.783.850,00 merupakan utang Alokasi Dana Desa yang belum disalurkan tahun 2019 sebesar Rp710.619.238,00 utang belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp9.980.000,00 dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp6.655.000,00.

### 5.3.2.c. Utang Bunga

Saldo Utang Bunga Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp0 dan Rp 0,00.

### 5.3.2.d. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp930.289,20 dan Rp98.297.262,50.

### 5.3.2.e. Utang Beban

Saldo Utang Beban Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.181.057.716,11 dan Rp14.129.331.232,55,

Rincian utang beban SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	-
2	Dinas Kesehatan	551.298.327,14
3	Rumah Sakit Umum Daerah	481.705,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	687.318.662,98
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	146.212.792,00
6	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	1.118.200,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	1.270.105,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas	1.940.420,00
9	Dinas Sosial	166.367,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.282.864,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.196.520,00
12	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.602.345,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	477.015,00
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.262.155,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	467.015,00
16	Dinas Perhubungan	5.659.521,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	497.013.788,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan	217.635,00
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.970.077,00
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	-
21	Dinas Perpustakaan, Dan Kearsipan	323.080,00
22	Dinas Perikanan	551.470,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.564.755,00
24	PPKD	-
25	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	15.231.240,00
26	Badan Pengelola Perpajakan Dan Retribusi Daerah	198.669.962,99
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	226.125,00
28	Sekretariat DPRD	28.853.389,00
29	DPRD	-
30	Sekretariat Daerah	19.290.493,00
31	KDH/WKDH	-
32	Inspektorat	808.585,00
33	Kecamatan Seruyan Tengah	-
34	Kecamatan Danau Sembuluh	-
35	Kecamatan Hanau	-
36	Kecamatan Seruyan Hilir	362.052,00
37	Kecamatan Seruyan Hulu	-
38	Kecamatan Batu Ampar	-
39	Kecamatan Seruyan Raya	-
40	Kecamatan Danau Seluluk	-

No	SKPD	Jumlah
41	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	-
42	Kecamatan Suling Tambun	-
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.021.030,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.181.057.716,11</b>

### 5.3.3 EKUITAS DANA

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<u>3.276.774.277.016,37</u>	<u>3.203.966.243.364,62</u>

## 5.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### 5.4.1 Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp1.052.981.634.961,77 dan Rp1.056.910.312.377,01. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	86.456.761.892,21	97.309.068.494,08	(10.852.306.801,87)
Pendapatan Transfer	916.150.444.989,56	932.043.745.446,93	(15.893.300.457,37)
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	50.374.428.280,00	27.557.498.436,00	22.816.929.844,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.052.981.634.961,77</b>	<b>1.056.910.312.377,01</b>	<b>(3.928.677.415,24)</b>

#### 5.4.1.a Pendapatan Asli Daerah LO

##### 5.4.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah LO

Pendapatan Pajak Daerah adalah Pendapatan-LO yang diperoleh dari Penerimaan pajak daerah yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Seruyan. Sampai dengan 31 Desember 2019, saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp33.346.148.399,65 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Pendapatan Pajak Daerah – LO</b>	<b>33.346.148.399,65</b>
Pajak Hotel – LO	139.690.000,00
Pajak Restoran – LO	1.864.855.520,10
Pajak Hiburan – LO	2.024.000,00
Pajak Reklame – LO	173.479.348,02
Pajak Penerangan Jalan – LO	9.961.661.470,81
Pajak Air Tanah – LO	774.783.712,80
Pajak Sarang Burung Walet – LO	8.059.250,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	5.804.607.429,12
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	3.077.463.444,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	11.539.524.225,00

##### 5.4.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah LO

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pendapatan-LO yang diperoleh dari Penerimaan Retribusi Daerah yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Seruyan. Sampai dengan 31 Desember 2019, saldo Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp9.542.072.243,14 dengan rincian sebagai berikut:



<b>Pendapatan Retribusi Daerah – LO</b>	<b>9.542.072.243,14</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	7.870.648.082,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	6.704.200,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	263.800.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	51.517.684,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	128.170.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	478.671.400,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO	150.000,00
Retribusi Rumah Polong Hewan – LO	910.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LO	23.599.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	151.020.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	490.997.446,14
Retribusi Izin Perikanan – LO	-
Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LO	76.084.431,00

#### 5.4.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp7.453.171.538,00 merupakan deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Bank Kalteng Rp7.443.141.653,00 dan Jamkrida Rp10.029.885,00.

#### 5.4.1.a.4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO

Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp36.115.369.511,42 terdiri dari:

<b>Lain-lain PAD Yang Sah – LO</b>	<b>36.115.369.511,42</b>
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LO	262.275.469,00
Penerimaan Jasa Giro – LO	21.620.951.265,63
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	0,00
Pendapatan Denda Pajak – LO	1.742.100.688,00
Pendapatan Denda Retribusi – LO	648.200,00
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum – LO	3.133.637.280,00
Pendapatan BLUD – LO	7.858.270.064,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO	1.497.486.544,79

#### 5.4.1.b Pendapatan Transfer LO

##### 5.4.1.b.1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO

Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat-LO sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 37.467.368.109,00 terdiri dari:

<b>Bagi Hasil Pajak – LO</b>	<b>37.467.368.109,00</b>
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LO	2.425.005.600,00
Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau – LO	84.325.113,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). – LO	34.958.037.396,00

##### 5.4.1.b.2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO

Pendapatan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pemerintah Pusat-LO sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp56.471.784.621,00 terdiri dari:

<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO</b>	<b>56.471.784.621,00</b>
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LO	19.956.799.321,00
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) – LO	11.532.279.334,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) – LO	22.326.907.843,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LO	679.239.373,00

Bagi Hasil dari Gas Bumi dan Minyak Bumi. – LO	30.600.350,00
Bagi Hasil dari Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH).- LO	1.945.958.400,00

#### 5.4.1.b.3) Dana Alokasi Umum

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Pemerintah Kabupaten Seruyan periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp629.417.652.000,00 yang merupakan pendapatan Transfer-LO berupa DAU dari Pemerintah Pusat yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019.

#### 5.4.1.b.4) Dana Alokasi Khusus

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp120.786.747.188,00 terdiri dari:

<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO</b>	<b>120.786.747.188,00</b>
Dana Alokasi Khusus Reguler – LO	85.101.078.242,00
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (IPD) – LO	21.264.836.168,00
Dana Alokasi Khusus Afirmasi – LO	10.836.171.345,00
Tunjangan Khusus Guru – LO	2.744.223.000,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan – LO	840.440.433,00

#### 5.4.1.c. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

##### 5.4.1.c.1) Dana Penyesuaian

Pendapatan Dana Penyesuaian LO terdiri dari:

<b>Dana Penyesuaian – LO</b>	<b>37.543.963.772,00</b>
Tunjangan Guru Non Sertifikasi – LO	1.307.775.000,00
Tunjangan Guru Sertifikasi – LO	23.225.671.170,00
BOP PAUD – LO	2.793.000.000,00
BOP Kesehatan – LO	7.984.482.602,00
BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan – LO	1.534.800.000,00
Dana Pelayanan Kepariwisata - LO	698.225.000,00

#### 5.4.1.d. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

##### 5.4.1.d.1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO Pemerintah Kabupaten Seruyan periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp34.462.939.299,56 yang merupakan pendapatan Transfer-LO berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi.

##### 5.4.1.d.2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LO

Pendapatan Bantuan Keuangan -LO Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

##### 5.4.1.e Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp50.374.428.280,00 merupakan Pendapatan dari pendapatan hibah.

#### 5.4.2 Beban

##### 5.4.2.a. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp370.955.310.690,35 terdiri dari :

<b>Beban Pegawai</b>	<b>370.955.310.690,35</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan	187.320.367.756,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS	76.882.681.445,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.810.000.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	996.413.601,76
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	875.634.582,37
Uang Lembur	1.331.681.037,00
Honorarium PNS	15.431.149.631,96
Honorarium Non PNS	79.044.679.384,81
Honorarium Pengelolaan Dana BOS	1.237.000.000,00
Belanja Pegawai BOS APBN	3.025.703.251,45

#### 5.4.2.b. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban persediaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebesar Rp54.919.560.712,53.

Rincian jenis Beban Persediaan tahun 2019 sebagai berikut:

No	Nama Barang	Persediaan per 31 Des 2019
	<b>Persediaan Bahan Pakai Habis</b>	<b>40.369.692.616,1</b>
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	7.037.139.251,06
2	Persediaan Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )	810.882.090,00
3	Persediaan Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	778.082.510,67
4	Persediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.631.118.010,39
5	Persediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas	9.524.384.346,00
6	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	28.516.500,00
7	Persediaan Isi Tabung Gas	870.491.000,00
8	Persediaan Peralatan Rumah Tangga	541.916.975,00
9	Persediaan Perlengkapan Dinas	13.068.762.168,00
10	Persediaan Barang Cetak	6.078.299.765,00
	<b>Persediaan Bahan/Material</b>	<b>14.549.968.096,41</b>
1	Persediaan Bahan Baku Bangunan	909.462.210,22
2	Persediaan Bahan/ Bibit Tanaman	379.774.000,00
3	Persediaan Bibit Ternak	532.251.050,00
4	Persediaan Bahan Obat- Obatan	6.240.839.029,15
5	Persediaan Bahan Kimia	1.624.833.285,30
6	Persediaan Bahan Makanan Pokok	3.466.660.949,08
7	Persediaan Alat Pertanian	266.516.750,00
8	Persediaan Alat Kesehatan	529.404.451,00
9	Persediaan Bahan Praktek Percontohan	554.584.321,66
10	Persediaan Benda-benda Berharga	45.642.050,00
	<b>Total</b>	<b>54.919.560.712,53</b>

#### 5.4.2.c. Beban Jasa

Beban Jasa merupakan beban Jasa untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebesar Rp 85.663.364.921,33.

#### 5.4.2.d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebesar Rp15.815.630.881,40.

#### 5.4.2.e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban Perjalanan Dinas untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebesar Rp83.868.464.387,25

No	SKPD	Uraian Belanja	Beban
1	DINAS PENDIDIKAN	Belanja perjalanan dinas	3.665.720.525,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.481.281.390,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	580.318.635,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	2.100.000,00
		Belanja perjalanan dinas BOS	586.020.500,00
		Belanja perjalanan dinas BPSP	16.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	Belanja perjalanan dinas	9.220.182.264,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.142.661.296,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.006.574.968,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	70.946.000,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Belanja perjalanan dinas	696.975.252,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.138.893,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	644.376.359,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	12.460.000,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU	Belanja perjalanan dinas	812.999.346,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	542.185.150,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	270.814.196,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belanja perjalanan dinas	7.488.687.239,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.457.145.260,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.991.431.979,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	40.110.000,00
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Belanja perjalanan dinas	2.169.478.300,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.184.114.200,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	950.744.100,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	34.620.000,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Belanja perjalanan dinas	759.765.090,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	567.999.418,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	189.805.672,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	1.960.000,00
8	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN LINMAS	Belanja perjalanan dinas	1.175.472.548,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	803.963.600,00



No	SKPD	Uraian Belanja	Beban
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	348.641.948,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	22.867.000,00
9	DINAS SOSIAL	Belanja perjalanan dinas	1.841.800.070,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.096.450.928,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	714.579.142,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	30.770.000,00
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Belanja perjalanan dinas	1.493.466.533,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	956.760.000,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	523.826.533,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	12.880.000,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belanja perjalanan dinas	592.064.212,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	295.915.564,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	296.148.648,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja perjalanan dinas	2.897.095.395,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.379.519.028,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.516.256.367,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	1.320.000,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Belanja perjalanan dinas	1.836.696.591,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.159.738.724,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	676.957.867,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Belanja perjalanan dinas	1.050.435.106,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	650.808.536,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	399.626.570,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Belanja perjalanan dinas	2.528.369.518,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.437.964.500,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.088.405.018,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	2.000.000,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	Belanja perjalanan dinas	1.692.506.494,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	913.915.913,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	772.826.981,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	5.763.600,00
17	DINAS KOMUNIKASI,	Belanja perjalanan dinas	1.260.781.681,00

No	SKPD	Uraian Belanja	Beban
	INFORMATIKA DAN STATISTIK		
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	620.740.027,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	622.681.654,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	17.360.000,00
18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	Belanja perjalanan dinas	777.514.419,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	402.690.000,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	371.604.419,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	3.220.000,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Belanja perjalanan dinas	1.147.411.123,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	421.930.000,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	705.569.123,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	19.912.000,00
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Belanja perjalanan dinas	632.522.825,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	431.087.000,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	191.635.825,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	9.800.000,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN, DAN KEARSIPAN	Belanja perjalanan dinas	579.610.793,25
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	258.205.148,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	314.965.645,25
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	6.440.000,00
22	DINAS PERIKANAN	Belanja perjalanan dinas	1.813.324.197,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.432.445.000,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	374.999.197,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	5.880.000,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Belanja perjalanan dinas	2.080.739.615,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	741.217.690,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.339.521.925,00
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Belanja perjalanan dinas	3.029.868.270,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	879.762.397,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.144.835.873,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	5.270.000,00

No	SKPD	Uraian Belanja	Beban
25	BADAN PENGELOLA PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH	Belanja perjalanan dinas	2.206.131.832,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.110.093.059,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.084.898.773,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	11.340.000,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belanja perjalanan dinas	1.683.076.798,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	318.152.112,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.360.024.686,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	4.900.000,00
27	SEKRETARIAT DPRD	Belanja perjalanan dinas	9.909.646.515,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.322.639.291,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.574.947.224,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	12.080.000,00
28	SEKRETARIAT DAERAH	Belanja perjalanan dinas	10.004.341.555,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.918.842.182,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.080.719.373,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	24.780.000,00
29	INSPEKTORAT KABUPATEN	Belanja perjalanan dinas	3.164.733.184,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.550.713.386,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	982.304.798,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	631.715.000,00
30	KECAMATAN SERUYAN TENGAH	Belanja perjalanan dinas	569.322.081,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	394.855.800,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	83.326.281,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	91.140.000,00
31	KECAMATAN DANAU SEMBULUH	Belanja perjalanan dinas	404.957.346,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	357.137.146,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.090.200,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	12.730.000,00
32	KECAMATAN HANAU	Belanja perjalanan dinas	413.457.353,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	368.175.000,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.747.353,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	10.535.000,00
33	KECAMATAN SERUYAN HILIR	Belanja perjalanan dinas	577.914.139,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	235.750.900,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	267.033.239,00

No	SKPD	Uraian Belanja	Beban
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	75.130.000,00
34	KECAMATAN SERUYAN HULU	Belanja perjalanan dinas	595.902.542,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	553.149.742,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.752.800,00
35	KECAMATAN BATU AMPAR	Belanja perjalanan dinas	313.307.400,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	277.205.000,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.202.400,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	1.900.000,00
36	KECAMATAN SERUYAN RAYA	Belanja perjalanan dinas	294.038.598,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	242.765.000,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.573.598,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	14.700.000,00
37	KECAMATAN DANAU SELULUK	Belanja perjalanan dinas	458.100.900,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	393.869.500,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.761.400,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	21.470.000,00
38	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR	Belanja perjalanan dinas	317.573.002,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	109.575.000,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	136.048.002,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	71.950.000,00
39	KECAMATAN SULING TAMBUN	Belanja perjalanan dinas	398.982.000,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	344.483.000,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.499.000,00
40	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Belanja perjalanan dinas	1.313.491.736,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	833.516.660,00
		Belanja perjalanan dinas luar daerah	469.805.076,00
		Belanja perjalanan dinas dalam Kota	10.170.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>83.868.484.387,25</b>

#### 5.4.2.f. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan beban Bunga untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

#### 5.4.2.g. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan beban Subsidi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.711.438.202,00.

#### 5.4.2.h. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Hibah untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp69.926.909.107,85. Beban Hibah merupakan Beban



pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Rincian Beban Hibah terdiri dari:

NO	SKPD	HIBAH UANG	HIBAH BARANG PESEDIAAN	BEBAN HIBAH
1	Dinas Pendidikan		4.694.661.644,75	4.694.661.644,75
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		21.707.997.663,10	21.707.997.663,10
3	Dinas Sosial		30.450.000,00	30.450.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		355.380.100,00	355.380.100,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		3.701.670.000,00	3.701.670.000,00
6	Dinas Perhubungan		1.912.245.000,00	1.912.245.000,00
7	Dinas Perikanan		11.824.375.000,00	11.824.375.000,00
8	PPKD	13.487.249.700,00		13.487.249.700,00
9	Sekretariat Daerah		11.855.831.000,00	11.855.831.000,00
10	Kecamatan Seruyan Hilir		357.049.000,00	357.049.000,00
<b>J U M L A H</b>		<b>13.487.249.700,00</b>	<b>56.439.659.407,85</b>	<b>69.926.909.107,85</b>

#### 5.4.2.i. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Bantuan Sosial untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.223.736.460,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

NO	SKPD	HIBAH UANG	HIBAH BARANG PESEDIAAN	BEBAN BANSOS
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.620.000.000,00	0,00	2.620.000.000,00
2	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
3	PPKD	7.603.736.460,00	0,00	7.603.736.460,00
<b>J U M L A H</b>		<b>10.223.736.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.223.736.460,00</b>

#### 5.4.2.j. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan merupakan beban Penyusutan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar sebesar Rp195.319.397.106,08. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian Beban Penyusutan	Tahun 2019	Tahun 2018	Lebih/kurang
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	34.311.294.965,43	32.924.509.665,00	2.488.289.724,93
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.014.076.458,50	15.414.201.078,00	492.055.572,46
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	144.994.025.682,15	194.619.611.861,00	-49.112.748.708,58
<b>Jumlah</b>	<b>195.319.397.106,08</b>	<b>242.958.322.604,00</b>	<b>-46.122.403.411,19</b>

#### 5.4.2.k. Beban Amortisasi

Beban Amortisasi merupakan beban Amortisasi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp610.690.528,33 dan

Rp888.375.470,61. Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

#### 5.4.2.l. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban Penyisihan Piutang untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp413.205.134,96. Beban Penyisihan Piutang merupakan pencatatan atas estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian beban Penyisihan piutang sebagai berikut:

Uraian Beban Penyisihan	Tahun 2019
Beban Penyisihan Piutang Pajak	382.486.741,50
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	31.496.253,07
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah	-777.859,61
Jumlah	413.205.134,96

#### 5.4.2.m. **Beban Penyisihan TGR**

Beban Penyisihan TGR per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp0,00 dan Rp22.027.921.818,51

#### 5.4.2.n. **Beban Penyusutan Aset Lainnya**

Beban Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp2.403.234.926,17 dan Rp4.650.849.626,57

#### 5.4.2.o. **Beban Lain Lain**

Beban Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 Rp 1.923.154.014,99 merupakan beban atas belanja barang yang dibawah batas minimum kapitalisasi.

#### 5.4.2.p. **Beban Transfer Bagi Hasil Pajak**

Jumlah Beban Transfer Bagi Hasil Pajak periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 4.775.807.022,00 dan Rp4.673.139.908,00

#### 5.4.2.q. **Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa**

Jumlah Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp78.397.732.840,00 dan Rp70.757.523.193,39

#### 5.4.2.r. **Beban Transfer Keuangan Lainnya**

Jumlah Beban Transfer Keuangan Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp dan Rp934.372.000,00. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Seruyan.

#### 5.4.3 **Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp1.344.814.341,00 dan Rp0,00.

##### 5.4.3.a **Surplus Non Operasional**

Surplus Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp1.344.814.341,00 dan Rp0,00 merupakan surplus dari penyertaan modal pada PDAM.

##### 5.4.3.b **Defisit Non Operasional**

Defisit Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp760.645.427,00.

#### 5.4.4. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp51.890.003.846,84).

##### 5.4.4.a Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

##### 5.4.4.b Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp51.890.003.846,84.

### 5.5 PENJELASAN AKUN LAPORAN ARUS KAS

#### 5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp240.748.737.986,50 merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019.

Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
Arus Kas Masuk	1.022.851.780.199,72	1.042.819.145.340,13	(19.967.365.140,41)
Arus Kas Keluar	782.103.042.213,22	641.366.799.353,48	140.736.242.859,74
Selisih	240.748.737.986,50	401.452.345.986,65	(160.703.608.000,15)

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	32.508.779.709,74	46.849.541.357,55	(14.340.761.647,81)
Penerimaan Retribusi Daerah	11.288.991.679,14	16.457.594.997,00	(5.168.603.317,86)
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.453.171.538,00	7.529.299.395,00	(76.127.857,00)
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	37.470.415.906,05	21.187.171.805,05	16.283.244.101,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	37.467.368.109,00	29.152.876.396,00	8.314.491.713,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	56.471.784.621,00	54.217.880.872,00	2.253.903.749,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	629.417.652.000,00	616.416.406.000,00	13.001.246.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	120.786.747.188,00	186.575.296.212,00	(65.788.549.024,00)
Penerimaan Dana Penyesuaian	37.543.953.772,00	9.250.000.000,00	28.293.953.772,00
Penerimaan Dana Desa	-	-	-
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.828.235.676,79	35.619.771.733,53	(3.791.536.056,74)
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
Penerimaan Hibah	20.614.680.000,00	17.737.720.000,00	2.876.960.000,00
Penerimaan Dana Darurat	-	-	-
Penerimaan Lainnya	-	175.586.572,00	(175.586.572,00)
Penerimaan dari Bantuan Keuangan	-	1.650.000.000,00	(1.650.000.000,00)
Jumlah	1.022.851.780.199,72	1.042.819.145.340,13	(19.967.365.140,41)

Perbandingan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Pengeluaran Daerah	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)
Pembayaran Pegawai	380.619.584.631,32	331.707.551.892,73	48.912.032.738,59
Pembayaran Barang	244.184.069.585,60	179.780.383.490,75	64.403.686.094,85
Pembayaran Bunga	-	-	-
Pembayaran Subsidi	1.711.438.202,00	-	1.711.438.202,00
Pembayaran Hibah	61.256.301.472,30	49.737.771.597,00	11.518.529.875,30
Pembayaran Bantuan Sosial	10.223.736.460,00	3.746.476.765,00	6.477.259.695,00
Pembayaran Tak Terduga	-	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	4.775.807.022,00	4.673.139.908,00	102.667.114,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-
Pembayaran Bantuan Keuangan	78.642.732.840,00	71.002.523.700,00	7.640.209.140,00
Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya	689.372.000,00	718.952.000,00	(29.580.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>782.103.042.213,22</b>	<b>641.366.799.353,48</b>	<b>140.736.242.859,74</b>

### 5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar (364.689.433.826,62) merupakan selisih Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan per 31 Desember 2019.

Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Arus Kas Masuk	262.275.469,00	1.229.901.098,00	(967.625.629,00)
Arus Kas Keluar	364.951.709.295,62	321.313.389.775,32	43.638.319.520,30
<b>Selisih</b>	<b>(364.689.433.826,62)</b>	<b>(320.083.488.677,32)</b>	<b>(44.606.945.149,30)</b>

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp262.275.469,00 merupakan hasil penjualan aset lainnya tahun 2019. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan sebesar Rp364.951.709.295,62 digunakan untuk membiayai belanja yang terkait dengan investasi aset non keuangan, tercermin dalam Belanja Modal yang dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ada di SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Belanja Tanah	-	56.180.500,00	(56.180.500,00)
Belanja Peralatan dan Mesin	70.512.082.806,26	24.282.874.440,30	46.229.208.365,96
Belanja Gedung dan Bangunan	69.240.183.004,93	68.416.187.131,00	823.995.873,93
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	217.282.518.918,43	218.149.158.546,00	(866.639.627,57)
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.916.924.566,00	3.908.989.158,02	4.007.935.407,98
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	6.500.000.000,00	(6.500.000.000,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>364.951.709.295,62</b>	<b>321.313.389.775,32</b>	<b>43.638.319.520,30</b>

### 5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00.



#### 5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp710.619.238,00 merupakan selisih antara penerimaan dan penyaluran dana desa.

Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Uraian	Per 31-12-2019 (Rp)	Per 31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Arus Masuk Kas	158.814.856.076,63	148.439.727.701,61	10.375.128.375,02
Arus Keluar Kas	159.318.363.238,63	149.175.657.497,61	10.142.705.741,02
Selisih	(503.507.162,00)	(735.929.796,00)	232.422.634,00

#### 5.5.5. Perhitungan akhir Kas Per 31 Desember 2019

Kenaikan/Penurunan Kas	(124.444.203.002,12)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	364.252.101.677,93
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	239.807.898.675,81
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	233.101.103.566,48
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	2.849.722,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	994.904,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	903.133.281,62
Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN	761.664.354,71
Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	4.327.533.609,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	710.619.238,00
Saldo Akhir Kas	239.807.898.675,81

### 5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### 5.6.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal sebesar Rp3.203.956.243.364,62.

#### 5.6.2 Surplus / (Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp76.464.440.367,53 dan Rp79.538.379.809,12. Surplus/(Defisit)-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

#### 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan mendasar merupakan akibat dari penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar sebagai berikut:

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(3.646.406.715,78)
KOREKSI PERSEDIAAN	(33.064.870,70)
KOREKSI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	172.830.000,00
KOREKSI ASET TETAP JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	(82.702.383,00)
KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	(39.597.454.653,94)
KOREKSI AKUMULASI AMORTISASI	1.137.194.584,66
KOREKSI ASET LAIN-LAIN	(4.634.405.597,00)
KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	(3.991.290.878,05)
KOREKSI KAS DI BENDAHARA SEKOLAH	(55.400.000,00)
KOREKSI TAGIHAN TP/ TGR	(1.856.720,00)
KOREKSI KAS JKN	15.196.113,60
KOREKSI UTANG	3.929.023,47
KOREKSI PENGHAPUSAN ASET LAINNYA	(74.800.000,00)
KOREKSI EKUITAS BARANG EKSTRA	(308.725.410,00)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(3.646.406.715,78)
KOREKSI PENYISIHAN TGR	43.804.144.075,18

#### 5.6.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp3.276.774.277.016,37 dan Rp3.203.956.243.364,62.

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### 6.1 SEJARAH SINGKAT KABUPATEN SERUYAN

##### a. Pemerintahan "*Onderdistrictshoofd*"

###### 1) Sebelum Tahun 1880

Wilayah Seruyan terdiri atas 13 kampung yang waktu itu disebut "*Shoofd*" di mana Pejabat Pemerintahannya disebut "Asisten Kiai" sedangkan kedudukan pemerintahannya berada di Sampit. Kampung-kampung tersebut adalah Kampung Beratih (sekarang Kuala Pembuang), Kampung Telaga Pulang, Kampung Sembuluh, Kampung Pembuang Hulu, Kampung Asam, Kampung Durian Kait, Kampung Sandul, Kampung Sukamandang, Kampung Rantau Pulut, Kampung Tumbang Kale, Kampung Tumbang Manjul, Kampung Sepundu Hantu, dan Kampung Tumbang Darap.

###### 2) Tahun 1880

Karena pesatnya perkembangan dan pertumbuhan kampung-kampung tersebut, maka ditempatkan Pemerintahan "*Onderdistrictshoofd*" dengan Ibu Kota Telaga Pulang.

###### 3) Tahun 1902

Pemerintahan "*Onderdistrictshoofd*" yang kala itu dengan Ibukota di Telaga Pulang pindah ke Pembuang Hulu.

###### 4) Tahun 1905

Pemerintahan "*Onderdistrictshoofd*" dengan Ibukota dipindahkan ke Kuala Pembuang, karena letaknya di pesisir selatan maka dianggap strategis terutama dari segi perhubungan dan perekonomian serta pemerintahan saat itu.

##### b. Pemerintahan Kecamatan Seruyan

###### 1) Tahun 1946

Pemerintahan "*Onderdistrictshoofd*" diubah menjadi Kecamatan dengan nama Kecamatan Seruyan dengan Ibu Kota Pemerintahannya di Kuala Pembuang.

###### 2) Tahun 1947

Pada tahun ini Wilayah Kecamatan Seruyan dibagi menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu terdiri dari:

(a) Kecamatan Seruyan Hilir dengan Ibukota Kuala Pembuang dan menjadi Wilayah Hukum Kewedanaan Sampit Barat.

(b) Kecamatan Seruyan Hulu dengan Ibu Kota Rantau Pulut dan menjadi Wilayah Hukum Kewedanaan Sampit Utara.

Wilayah Seruyan kala itu termasuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (sebelum terbentuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1957) dan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin (sebelum terbagi menjadi dua Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat).

###### 3) Tahun 1958

Wilayah Kecamatan Seruyan Hulu dibagi menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu:

(a) Kecamatan Seruyan Tengah dengan Ibukota Rantau Pulut.

(b) Kecamatan Seruyan Hulu dengan Ibukota Pembuang Hulu.

###### 4) Tahun 1961

Wilayah Kecamatan Seruyan Hilir dibagi menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu:

(a) Kecamatan Seruyan Hilir dengan Ibukota Kuala Pembuang.

(b) Kecamatan Hanau dengan Ibukota Pembuang Hulu.

5) Tahun 1963

Wilayah Kecamatan Seruyan Hilir dibagi menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu:

(a) Kecamatan Seruyan Hilir dengan Ibukota Kuala Pembuang.

(b) Kecamatan Danau Sembuluh dengan Ibukota Telaga Pulang.

**c. Pemerintahan Kewedanaan Seruyan**

Dengan semakin pesatnya perkembangan pemekaran kecamatan, maka dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 06/Pem.330-c-2-3/1963, tanggal 1 Juni 1963 tentang Penetapan Kewedanaan Seruyan. Kewedanaan Seruyan membawahi 5 (lima) wilayah kecamatan dengan Ibukota Kuala Pembuang. Di antara 5 (lima) kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kecamatan Seruyan Hilir dengan Ibukota Kuala Pembuang.

2) Kecamatan Danau Sembuluh dengan Ibukota Telaga Pulang.

3) Kecamatan Hanau dengan Ibukota Pembuang Hulu.

4) Kecamatan Seruyan Tengah dengan Ibukota Rantau Pulut.

5) Kecamatan Seruyan Hulu dengan Ibukota Tumbang Manjul.

**d. Pemerintahan Pembantu Bupati Kotawaringin Timur Wilayah Seruyan**

Pemerintahan Pembantu Bupati Kotawaringin Timur Wilayah Seruyan terbentuk berdasarkan:

1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1979, tanggal 28 April 1979 tentang Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kapuas untuk Wilayah Gunung Mas, Pembantu Bupati Kotawaringin Timur untuk Wilayah Katingan, Pembantu Bupati Kotawaringin Timur untuk Wilayah Seruyan, Pembantu Bupati Barito Utara untuk Wilayah Murung Raya, Pembantu Bupati Barito Selatan untuk Wilayah Barito Timur.

2) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 148/KPTS/1979, tanggal 18 Juni 1979 tentang Penghapusan Status Wilayah dan Kantor Daerah Tingkat II Administratif Gunung Mas, Katingan, Murung Raya dan Barito Timur serta Status Wilayah dan Kantor Persiapan Daerah Tingkat II Seruyan.

3) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 247/KPTS/1980, tanggal 02 Juli 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati Kotawaringin Timur untuk Wilayah Seruyan.

Pemerintahan Pembantu Bupati (Tubup) Kotawaringin Timur Wilayah Seruyan dengan Ibu Kota Kuala Pembuang.

**e. Pemerintahan Kabupaten Seruyan**

Pemerintahan Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180), yang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Juli 2002 di Jakarta. Ibukota Kabupaten Seruyan berada di Kuala Pembuang yang termasuk dalam Kecamatan Seruyan Hilir.



## 6.2 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Nama-nama Bupati yang menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

- a) Drs. H. Loper H. Anggus (Pj. Bupati) : Periode 2002-2003
- b) DR. (HC). H. Darwan Ali : Periode 2003-2008
- c) DR. (HC). H. Darwan Ali : Periode 2008-2013
- d) Sudarsono, S.H. : Periode 2013-2018
- e) Yulhadir : Periode 2018-2023

Nama-nama Wakil Bupati yang menjabat sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

- a) H. Rasyidi Harun : Periode 2003-2008
- b) Ir. H. Tarwidi Tamasaputra : Periode 2008-2013
- c) Yulhadir : Periode 2013-2018
- d) Hj. Iswanti S.E., M.M. : Periode 2018-2023

Dalam Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Seruyan menyelenggarakan urusan pemerintahan baik Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintah maupun Urusan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan urusan tersebut dimaksud dilaksanakan oleh SPKD dan kecamatan yang terdiri atas 18 (delapan belas) Dinas, 6 (enam) Badan, 1 (satu) Satuan, 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah, 2 (dua) Sekretariat, 10 (sepuluh) Kecamatan dan 1 (satu) Inspektorat.

## BAB VII

### PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (*SUBSEQUENT EVENT*)

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		Anggaran
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.345.996.782.712,53</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	266.924.793.712,53
1.2	Pendapatan Dana Perimbangan	920.552.928.000,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	158.519.061.000,00
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.462.075.264.430,42</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	564.001.647.974,92
2.2	Belanja Langsung	888.073.616.455,50
	Surplus/Defisit	(106.078.481.717,89)
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>106.078.481.717,89</b>
3.1	Penerimaan Pembiayaan	106.078.481.717,89
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional terdapat Pengurangan Alokasi Dana Transfer dan Dana Desa ke Kabupaten Seruyan sebesar Rp136.641.839.000,00, terdiri dari Dana Transfer Rp135.593.560.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp1.048.279.000,00. Rincian kenaikan penurunan Dana Perimbangan dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Perda Nomor 9 Tahun 2019)	Anggaran Penyesuaian (Perbup Nomor 10 Tahun 2020)	Kenaikan/ (Penurunan)
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>920.552.928.000,00</b>	<b>784.959.368.000,00</b>	<b>(135.593.560.000,00)</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	70.383.043.000,00	72.648.220.000,00	2.265.177.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	643.070.738.000,00	567.765.658.000,00	(75.305.080.000,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	207.099.147.000,00	144.545.490.000,00	(62.553.657.000,00)
<b>DANA DESA</b>	<b>106.984.261.000,00</b>	<b>105.935.982.000,00</b>	<b>(1.048.279.000,00)</b>
Dana Desa (DD)	106.984.261.000,00	105.935.982.000,00	(1.048.279.000,00)
<b>JUMLAH PENGURANGAN DANA TRANSFER DANA DESA</b>	<b>1.027.537.189.000,00</b>	<b>890.895.360.000,00</b>	<b>(136.641.839.000,00)</b>

Pemerintah Kabupaten Seruyan melakukan penyesuaian APBD menyesuaikan dengan pengurangan transfer pemerintah pusat dan dana desa serta potensi tidak terealisasinya pendapatan asli daerah. Belanja daerah dirasionalisasi dan *refocusing* untuk menanggulangi Covid-19. Rincian Penyesuaian APBD sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Perda Nomor 9 Tahun 2019)	Anggaran Penyesuaian (Perbup Nomor 10 Tahun 2020)	Kenaikan/ (Penurunan)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.345.996.782.712,53</b>	<b>(260.611.799.603,86)</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	142.954.833.108,67	(123.969.960.603,86)
1.2	Pendapatan Dana Perimbangan	784.959.368.000,00	(135.593.560.000,00)
1.3	Lain-Lain Pendapatan	157.470.782.000,00	(1.048.279.000,00)

Uraian	Anggaran (Perda Nomor 9 Tahun 2019)	Anggaran Penyesuaian (Perbup Nomor 10 Tahun 2020)	Kenaikan/ (Penurunan)
Yang Sah			
<b>2 BELANJA</b>	<b>1.452.075.264.430,42</b>	<b>1.177.480.558.108,67</b>	<b>(274.594.706.321,75)</b>
2.1 Belanja Tidak Langsung	564.001.647.974,92	540.009.236.647,52	(23.992.411.327,40)
2.2 Belanja Langsung	888.073.616.455,50	637.471.321.461,15	(250.602.294.994,35)
Surplus/Defisit	(106.078.481.717,89)	(92.095.575.000,00)	13.982.906.717,89
<b>3 PEMBIAYAAN</b>	<b>106.078.481.717,89</b>	<b>92.095.575.000,00</b>	<b>(13.982.906.717,89)</b>
3.1 Penerimaan Pembiayaan	106.078.481.717,89	92.095.575.000,00	(13.982.906.717,89)
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-

Rasionalisasi dan *refocusing* belanja daerah dengan mempedomani SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/2j dan Nomor 177/KMK.07/2020, dan dilaksanakan pada seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Seruyan. Rincian Rasionalisasi Anggaran SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Anggaran (Perda Nomor 9 Tahun 2019)	Anggaran Penyesuaian (Perbup Nomor 10 Tahun 2020)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	DINAS PENDIDIKAN	257.530.369.592,46	218.665.881.836,05	(38.864.487.756,41)
2	DINAS KESEHATAN	101.346.360.827,86	99.729.448.786,56	(1.616.912.041,30)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA PEMBUANG	33.099.733.000,80	36.014.537.915,90	2.914.804.915,10
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU	31.821.548.381,63	33.293.496.324,98	1.471.947.943,35
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	295.555.867.377,33	177.538.125.777,43	(118.017.741.599,90)
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	23.312.080.789,73	13.274.251.556,85	(10.037.829.232,88)
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	14.332.519.773,05	12.371.630.221,65	(1.960.889.551,40)
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.903.387.969,63	6.145.378.049,40	(758.009.920,23)
9	DINAS SOSIAL	7.054.674.096,78	5.327.652.568,45	(1.727.021.528,33)
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.461.227.343,31	5.809.949.677,74	(651.277.665,57)
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.448.390.831,75	10.945.670.508,10	(2.502.720.323,65)
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	24.716.446.688,90	16.753.238.435,50	(7.963.208.253,40)
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.063.754.582,48	24.887.526.910,92	(3.176.227.681,56)
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.458.221.375,13	6.144.197.462,25	(2.314.023.912,88)
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.527.776.846,03	7.365.951.721,45	(3.161.825.124,58)
16	DINAS PERHUBUNGAN	11.246.045.670,35	7.656.284.539,15	(3.589.761.131,20)
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	9.150.131.110,73	6.598.844.557,50	(2.551.286.553,23)
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	17.934.785.323,43	4.183.713.735,25	(13.751.071.588,18)
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.564.626.170,65	4.935.078.892,14	(629.547.278,51)

No	SKPD	Anggaran (Perda Nomor 9 Tahun 2019)	Anggaran Penyesuaian (Perbup Nomor 10 Tahun 2020)	Kenaikan/ (Penurunan)
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	12.903.235.144,50	8.059.976.010,05	(4.843.259.134,45)
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.291.499.198,20	3.754.130.402,90	(537.368.795,30)
22	DINAS PERIKANAN	19.419.319.859,28	11.341.354.178,10	(8.077.965.681,18)
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.472.978.111,08	8.641.315.650,00	(4.831.662.461,08)
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	32.731.568.032,26	22.264.799.871,99	(10.466.768.160,27)
25	BADAN PENGELOLA PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH	17.907.422.170,82	10.691.693.476,65	(7.215.728.694,17)
26	BADAN KEPEGAWAJAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.631.112.710,00	9.630.010.219,60	(7.001.102.490,40)
27	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	14.487.871.864,40	13.320.047.393,10	(1.167.824.471,30)
28	SEKRETARIAT DPRD	35.553.794.378,19	22.388.092.981,49	(13.165.701.396,70)
29	SEKRETARIAT DAERAH	38.369.515.680,30	28.073.614.578,80	(10.295.901.101,50)
30	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	814.564.115,35	604.452.323,51	(210.111.791,84)
31	INSPEKTORAT	11.089.974.258,93	7.180.459.265,55	(3.909.514.991,38)
32	KECAMATAN SERUYAN TENGAH	6.513.747.192,68	5.791.948.650,65	(721.798.542,03)
33	KECAMATAN DANAU SEMBULUH	3.260.497.048,15	2.982.956.230,10	(277.540.818,05)
34	KECAMATAN HANAU	4.233.753.508,70	3.991.474.769,85	(242.278.738,85)
35	KECAMATAN SERUYAN HILIR	9.730.406.255,23	8.957.392.099,85	(773.014.155,38)
36	KECAMATAN SERUYAN HULU	3.854.645.507,85	3.587.482.060,60	(267.163.447,25)
37	KECAMATAN BATU AMPAR	2.952.275.625,30	2.650.962.095,00	(301.313.530,30)
38	KECAMATAN SERUYAN RAYA	3.223.935.072,19	3.118.924.085,79	(105.010.986,40)
39	KECAMATAN DANAU SELULUK	2.779.524.907,30	2.818.265.187,80	38.740.280,50
40	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR	3.359.010.523,70	3.106.223.769,20	(252.786.754,50)
41	KECAMATAN SULING TAMBUN	3.288.500.237,23	3.025.822.248,70	(262.677.988,53)
42	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	42.256.108.705,68	42.045.968.082,00	(210.240.623,68)
43	PPKD	242.422.056.563,07	251.812.433.000,12	9.390.376.437,05
<b>Jumlah</b>		<b>1.452.975.264.430,42</b>	<b>1.177.480.558.108,67</b>	<b>(274.594.706.321,75)</b>

*Refocusing* dalam rangka penanggulangan Covid-19 diprioritaskan pada 3 aspek yaitu:

No.	Aspek	Nilai
1.	Penanggulangan Kesehatan	20.085.450.000,00
2.	Penanggulangan Dampak ekonomi	14.820.000.000,00
3.	Penyediaan <i>social safety net</i> / Jaringan Pengaman Sosial	12.538.850.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>47.444.300.000,00</b>

Penanggulangan Covid-19 dianggarkan pada beberapa SKPD yaitu Dinas Kesehatan sebesar Rp1.000.000.000,00, RSUD Kuala Pembuang sebesar Rp2.736.800.000,00, RSUD Hanau sebesar Rp1.547.050.000,00, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp600.000.000,00 dan DPA PPKD melalui anggaran belanja Tidak Terduga sebesar Rp41.560.450.000. Sumber dana yang digunakan dalam penanggulangan Covid-19 menggunakan Silpa DBHDR.



Rasionalisasi anggaran Belanja Modal dampak Covid-19 sebesar (Rp122.637.020.909,00), anggaran Belanja Modal sebelum penyesuaian anggaran sebesar Rp393.641.232.583,50 dilakukan penyesuaian anggaran menjadi Rp271.004.211.674,50. Jumlah paket lelang/seleksi yang masuk UKPBJ sebanyak 75 Paket Pekerjaan dengan jumlah HPS sebesar Rp153.118.505.643,00 atau 56,50% dari anggaran belanja modal.

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**DAFTAR PIUTANG DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	<b>PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	2019				
	Piutang Pajak		6.883.927.851,00	3.209.755.819,86	2.393.669.672,25	7.700.013.998,61
	Piutang Retribusi		4.519.590.154,00	212.465.290,00	4.413.993.557,00	318.061.887,00
	Piutang Lain Lain PAD yang Sah		816.732.944,82	1.566.323.966,54	720.602.384,82	1.662.454.526,54
2	<b>PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	2019				
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak		8.397.481.260,62	11.032.184.883,39	8.397.481.260,62	11.032.184.883,39
<b>JUMLAH</b>			<b>20.617.732.210,44</b>	<b>16.020.729.959,79</b>	<b>15.925.746.874,69</b>	<b>20.712.715.295,54</b>

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN IX**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal Penyisihan Piutang	Penambahan Penyisihan Piutang	Pengurangan Penyisihan Piutang	Saldo Akhir Penyisihan Piutang
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	<b>PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
	Piutang Pajak	3.560.160.589,01	382.486.741,51	-	3.942.647.330,51
	Piutang Retribusi	13.800.500,28	35.146.253,07	4.839.262,20	44.107.491,15
	Piutang Lain Lain PAD yang Sah	48.382.012,80	771.596,28	360.193,68	48.793.415,39
	<b>PENYISIHAN PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH</b>				
2	<b>PROVINSI</b>	-	-	-	-
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.622.343.102,09</b>	<b>418.404.590,85</b>	<b>5.199.455,88</b>	<b>4.035.548.237,05</b>

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN X**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**DAFTAR DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Uraian Rincian Dana Bergulir	Saldo Awal Dana Bergulir	Penambahan Dana Bergulir	Pengurangan Dana bergulir	Penyisihan Dana bergulir	Saldo Akhir Dana Bergulir
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
1	Dana Bergulir					
<b>JUMLAH</b>			.	.	.	.

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**



**LAMPIRAN XI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

(dalam rupiah)

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal 31 Desember 2017	Penyertaan Modal Tahun 2018	Jumlah Modal yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun ini	Jumlah Modal (Investasi)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2017	PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	Perda Nomor 7 Tahun 2007	Saham	39.000.000.000,00	35.500.000.000,00	3.500.000.000,00	39.000.000.000,00	-	7.512.203.176,00	35.500.000.000,00	3.500.000.000,00
2	2017	PDAM	Perda Nomor 3 Tahun 2013	Bagi Hasil	10.000.000.000,00	7.000.000.000,00	3.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3	2017	PT. JAMKRIDA KALTENG	Perda Nomor 4 Tahun 2015	Bagi Hasil	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-	17.096.219,00	3.000.000.000,00	-
		<b>Jumlah</b>			<b>52.000.000.000,00</b>	<b>45.500.000.000,00</b>	<b>6.500.000.000,00</b>	<b>52.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.529.299.395,00</b>	<b>43.500.000.000,00</b>	<b>8.500.000.000,00</b>

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN XII**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tanah	199.852.137.537,00	1.526.949.460,26	1.467.480.000,00	199.911.606.997,26
2	Peralatan Dan Mesin	316.010.052.143,83	73.794.002.023,18	11.236.564.494,99	378.567.489.672,02
3	Gedung Dan Bangunan	788.456.356.446,69	79.909.268.554,93	13.904.900.847,83	854.460.724.153,79
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	2.543.740.279.924,43	239.950.676.754,40	11.907.485.149,00	2.771.783.471.529,83
5	Aset Tetap Lainnya	15.435.120.734,02	15.746.568.766,00	3.523.534.100,00	27.658.155.400,02
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	109.921.410.831,00	6.109.222.475,68	1.381.365.000,00	114.649.268.306,68
<b>Jumlah</b>		<b>3.973.415.357.616,97</b>	<b>417.036.688.034,45</b>	<b>43.421.329.591,82</b>	<b>4.347.030.716.059,60</b>

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN XIII**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**DAFTAR ASET TETAP**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal 2019	Saldo Akhir 2019
1	2	3	4
1	Tanah	199.852.137.537,00	199.911.606.997,26
2	Peralatan Dan Mesin	316.010.052.143,83	378.567.489.672,02
3	Gedung Dan Bangunan	788.456.356.446,69	854.460.724.153,79
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	2.543.740.279.924,43	2.771.783.471.529,83
5	Aset Tetap Lainnya	15.435.120.734,02	27.658.155.400,02
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	109.921.410.831,00	114.649.268.306,68
<b>Jumlah</b>		<b>3.973.415.357.616,97</b>	<b>4.347.030.716.058,60</b>

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN XIV**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Kontruksi Dalam Pengerjaan		Luas (M2)	Letak/ Lokasi/ Alamat	Dokumen		Tanggal Bulan tahun Mulai	Asal Usul Pembayaan	Nilai Kontrak (Rp)
	Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tidak			Tumbang Manjul Kec. Seruyan Hulu	23/4/2018	016.03/PPK-PERKIMTAN/IV/2018	23/4/2018	Pembelian	49.984.000,00
2	Tidak			Desa Sungai Undang	18/11/2018	043.03/PPK-PERKIMTAN/XI/2018	18/11/2018	Pembelian	49.660.000,00
3	Tidak	Tidak	0	Jl. Budi Utomo	9/7/2019	32.2/KONST-PPK/VI/2019	9/7/2019	APBD	395.231.100,00
4	Tidak	Tidak	0	Jl. Budi Utomo	9/7/2019	33.2/KONST-PPK/VI/2019	9/7/2019	APBD	394.873.600,00
5	Tidak	Tidak	0	Jl. Budi Utomo	9/7/2019	34.2/KONST-PPK/VI/2019	9/7/2019	APBD	398.511.916,00
6	Tidak	Beton	180	Jalan Mohammad Hatta - Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (74212) Sms Center 0821 4400 4400 Email : diskominfo@seruyankab.go.id Website : diskominfo.seruyankab.go.id	12/5/2017	027/13K-DKIS/VI/2017	21/7/2017	Pembelian	221.050.000,00
7	Tidak	Beton	160	Jalan Mohammad Hatta - Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (74212) Sms Center 0821 4400 4400 Email : diskominfo@seruyankab.go.id Website : diskominfo.seruyankab.go.id	12/5/2017	027/14K-DKIS/VI/2017	21/7/2017	Pembelian	221.050.000,00
8	Tidak			teranga batu	30/10/2017	007/PPK/DISPOR APARBUD	30/10/2017	Pembelian	11.913.000,00
9	Tidak			Kecamatan Seruyan tengah di Desa Pangla	30/10/2017	007/PPK-DISPORAPARBU D/2017/0	30/10/2017	Pembelian	11.913.000,00
10	Tidak			Kecamatan suling Tambun	30/10/2017	007/PPK-DISPORAPARBU D/2017/0	30/10/2017	Pembelian	2.898.500,00
11	Tidak			Perencanaan Pengadaan Jalan Usaha Tani Desa Halimaung Jaya	10/8/2016	602.2/151.11/TU-SKT/VI/2016/0	10/8/2016	Pembelian	10.950.000,00
12	Tidak			Perencanaan Pengadaan Jalan Usaha Tani Desa Benua Usang	10/8/2016	602.2/151.11/TU-SKT/VI/2016/0	10/8/2016	Pembelian	10.950.000,00
13	Tidak				24/3/2017	602.2/80.36/TU/D KPP/III/2017	24/3/2017	Pembelian	12.430.000,00
14	Tidak	Beton			13/11/2017	027/618/PPK-DISDIK/DIKDAS/ XI/2	13/11/2017	Pembelian	6.820.000,00
15	Tidak	Beton		Jl. Anumani Kuala Pembuang	16/11/2017	4378/PPK/SDMK-DINKES/X/2017	20/12/2017	Pembelian	34.500.000,00
16	Tidak	Beton	400	Jl. Ayani	17/5/2018	12/PPK-DISNAKERTRANS/2018	17/5/2018	Pembelian	800.934.500,00



No.	Kontruksi Dalam Pengerjaan		Luas (M2)	Letak/ Lokasi/ Alamat	Dokumen		Tanggal Bulan tahun Mulai	Asal Usul Pembiayaan	Nilai Kontrak (Rp)
	Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Tidak	Beton	950	Tumbang Manjul	12/11/2018	028/282.1/KESBA NGPOL/X/2018	30/5/2011	Pembelian	12.430.000,00
18	Tidak	Beton	825	Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang (Kantor BKPSDM)	25/4/2018	800.5/27/PA-BKPSDM/IV/2018	25/4/2018	Pembelian	928.037.000,00
19	Tidak	Beton	220	Jl. A. Yani No. Kuala Pembuang II	16/11/2017	027/726/BPPRD/ X/2017	11/12/2017	Pembelian	398.850.000,00
20	Tidak	Beton		Jln. Akhmad Yani Kuala Pembuang	13/4/2012	027/017/SPMK-PHBK/IV/2012	31/12/2012	Pembelian	13.500.000,00
21	Tidak			Desa Asam Baru	30/4/2012	027/029/SPMK-PHBK/IV/2012	30/4/2012	Pembelian	5.600.000,00
22	Tidak			Desa Ayawan	30/9/2012	027/091/SPMK-PHBK/IX/2012	30/9/2012	Pembelian	4.450.000,00
23	Tidak	Beton		Desa Sungai Mitak Kec. Seruyan Hilir	2/11/2015	027/071/SPK-PHBK/IX/2015	2/11/2015	Pembelian	13.100.000,00
24	Tidak	Beton		Kecamatan Deneau Seluluk	13/11/2015	027/084/SPK-PHBK/IX/2015	13/11/2015	Pembelian	17.750.000,00
25	Tidak	Tidak		Desa Sungai Mitak	27/5/2016	027/031.2/SPK-PHBK/IV/2016	27/5/2016	Pembelian	49.500.000,00
26	Tidak	Beton		Jln. A. Yani Kntn Dinas Perhubungan Kuala Pembuang	18/11/2016	027/069/SPK-PHBK/IX/2016	18/11/2016	Pembelian	49.600.000,00
27	Tidak	Beton		Jln. Sampit-Pangkalan Bun Km.115 Desa Asam Baru Kecamatan Deneau Seluluk	28/11/2016	027/070/SPK-PHBK/IX/2016	28/11/2016	Pembelian	49.600.000,00
28	Tidak	Beton	108	Jl. Moh.hatta Kuala Pembuang	30/10/2017	*No. 470/127/ PL-DUKCAPIL/X/20		Pembelian	439.440.000,00
29	Tidak	Beton		Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir	9/7/2018	59/KOPERINDAG - SEK. 1/KN/II/2018	31/12/2018	Pembelian	19.208.961.850,00
30	Tidak			Jl. Tumbang Manjul, Seruyan Hulu	10/8/2012	621/63/Kontrak-CKN/III/2012	10/8/2012	Pembelian	96.257.850,00
31	Bertingkat	Beton	6714	Jl. A. Yani, K. Pembuang	25/9/2012	645.8/120/Kontra k-CK/X/2012	31/12/2012	Pembelian	63.870.999.000,00
32	Tidak	Beton		Kuala Pembuang	10/6/2014	641.6/13/KONTR AK-CKN/II/2014	10/6/2014	Pembelian	29.000.000,00
33	Tidak	Beton		Kuala Pembuang	10/6/2014	641.6/54/KONTR AK-CKN/II/2014	10/6/2014	Pembelian	709.208.000,00
34	Tidak	Beton			8/7/2014	641.6/88/KONTR AK-CKN/III/2014	8/7/2014	Pembelian	118.450.000,00
35	Tidak	Beton		Jl. A. Yani, K. Pembuang	8/7/2014	641.6/65/KONTR AK-CKN/II/2014	8/7/2014	Pembelian	156.640.000,00
36	Tidak	Beton		Palangkaraya, Kalleng	15/10/2014	641.6/285/KONT RAK-CK/X/2014	15/10/2014	Pembelian	49.665.000,00
37	Tidak			Kab. Seruyan	24/10/2014	645.1/217/KONT RAK-CK/X/2014	24/10/2014	Pembelian	49.236.000,00
38	Tidak			Kab. Seruyan	27/10/2014	610/237/SPK/SD A/X/2014	27/10/2014	Pembelian	49.120.000,00
39	Tidak	Beton		Jl. A. Yani, K. Pembuang	31/10/2014	641.6/220/KONT RAK-CK/X/2014	31/10/2014	Pembelian	49.450.000,00
40	Tidak	Beton		Jl. A. Yani, K. Pembuang	31/10/2014	641.6/222/KONT RAK-CK/X/2014	31/10/2014	Pembelian	771.450.000,00
41	Tidak	Beton		Kec. Seruyan Hulu	3/11/2014	641.6/307/KONT RAK-CK/X/2014	3/11/2014	Pembelian	19.700.000,00
42	Tidak			Jl. Sei Menyumbang kec. Seruyan Hulu	7/11/2014	622.5/768/X/BM. 2014	7/11/2014	Pembelian	49.000.000,00
43	Tidak	Beton		Kuala Pembuang	13/11/2014	641.6/267/KONT RAK-CK/X/2014	13/11/2014	Pembelian	542.157.000,00

No.	Kontruksi Dalam Pengerjaan		Luas (M2)	Letak/ Lokasi/ Alamat	Dokumen		Tanggal Bulan tahun Mulai	Asal Usul Pembayasan	Nilai Kontrak (Rp)
	Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Tidak	Beton		Kec. Batu Ampar	21/5/2015	641.6/79/KONTRAK-CKV/2015	21/5/2015	Pembelian	49.390.000,00
45	Tidak	Beton		Kab. Seruyan	24/7/2015	641.6/169/KONT RAK-CK/VI/2015	24/7/2015	Pembelian	98.505.000,00
46	Tidak			Kab. Seruyan	28/7/2015	610/44/SPK/SDA/ VII/2015	28/7/2015	Pembelian	49.200.000,00
47	Tidak	Beton		Jl. A. Yani, K. Pambuang	3/11/2015	641.6/279/KONT RAK-CK/XI/2015	3/11/2015	Pembelian	268.725.000,00
48	Tidak	Beton		Pembuang Hulu, Kec. Hansu	3/11/2015	621.8/278/KONT RAK-CK/XI/2015	3/11/2015	Pembelian	49.115.000,00
49	Bertingkat	Beton		Pembuang Hulu, Kab. Seruyan	3/11/2015	643.1/313/KONT RAK-CK/XI/2015	3/11/2015	Pembelian	13.701.103.700,00
50	Bertingkat	Beton		Kec. Seruyan Hulu, Kab. Seruyan	9/11/2015	641.2/419/KONT RAK-CK/XI/2015	9/11/2015	Pembelian	24.800.000,00
51	Tidak	Beton		Kec. Batu Ampar, Kab. Seruyan	9/11/2015	641.2/422/KONT RAK-CK/XI/2015	9/11/2015	Pembelian	24.500.000,00
52	Bertingkat	Beton		Kec. Seruyan Tengah	9/11/2015	641.2/423/KONT RAK-CK/XI/2015	9/11/2015	Pembelian	24.800.000,00
53	Bertingkat	Beton		Kec. Seruyan Raya, Kab. Seruyan	9/11/2015	641.2/421/KONT RAK-CK/XI/2015	9/11/2015	Pembelian	24.500.000,00
54	Bertingkat	Beton		Kec. Danau Sembuluh	9/11/2015	641.2/420/KONT RAK-CK/XI/2015	9/11/2015	Pembelian	24.800.000,00
55	Tidak	Beton		Kab. Seruyan	9/11/2015	610/102/SPK/SDA/ XI/2015	9/11/2015	Pembelian	49.973.000,00
56	Tidak	Tidak		Kec. Hansu - Kab Seruyan	18/3/2016	621.6/009/KONT RAK-CK/III/2016	2/6/2016	Pembelian	29.800.000,00
57	Tidak	Beton	0	Jl. A. Yani Kuala Pambuang	25/2/2016	621.6/005/KONT RAK-CK/II/2016	23/6/2016	Pembelian	24.600.000,00
58	Tidak			Kawasan Wisata Desa Sungai Bekau	25/2/2016	645.1/001/KONT RAK-CK/II/2016	25/2/2016	Pembelian	34.540.000,00
59	Tidak	Tidak		Kab. Seruyan	18/3/2016	641.6/008/KONT RAK-CK/III/2016	28/6/2016	Pembelian	316.549.000,00
60	Tidak	Tidak		Pagar Kantor Camat Batu Ampar	18/3/2016	641.6/011/KONT RAK-CK/III/2016	28/6/2016	Pembelian	34.500.000,00
61	Tidak	Tidak		Kec. Danau Seteluk - Kab. Seruyan	18/3/2016	461.6/010/KONT RAK-CK/III/2016	1/7/2016	Pembelian	29.757.000,00
62	Tidak			Kab. Seruyan	30/5/2016	622.5/303/VI/BM/2 016	30/5/2016	Pembelian	49.000.000,00
63	Tidak			Kab. Seruyan	30/5/2016	622.5/302/VI/BM/2 016	30/5/2016	Pembelian	49.000.000,00
64	Tidak	Tidak		Kec. Suling Tambun Kab. Seruyan	18/3/2016	641.6/013/KONT RAK-CK/III/2016	11/8/2016	Pembelian	34.650.000,00
65	Tidak	Tidak		Dinas Damkar Kec. Danau Sembuluh	25/4/2016	641.2/001/KONT RAK-PR/IV/2016	5/9/2016	Pembelian	20.700.000,00
66	Tidak	Beton	784	Jl. Budi Utomo Kuala Pambuang II	1/6/2016	645.8/039/KUNT RAK-CK/VI/2016	2/11/2016	Pembelian	448.600.000,00
67	Tidak	Tidak	2000	Kantor Camat Danau Sembuluh Di Telaga Pulang X: 0642007 Y: 9882830	1/6/2016	641.6/031/KONT RAK-CK/VI/2016	7/11/2016	Pembelian	390.567.800,00
68	Tidak	Tidak	64	Aula Kantor Kelurahan Kuala Pambuang II X : 0671641, Y : 09526617	1/6/2016	641.6/034/KONT RAK-CK/VI/2016	6/12/2016	Pembelian	434.355.000,00

No.	Kontruksi Dalam Pengerjaan		Luas (M2)	Letak/ Lokasi/ Alamat	Dokumen		Tanggal Bulan tahun Mulai	Asal Usul Pembiayaan	Nilai Kontrak (Rp)
	Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	Tidak	Tidak	158	Desa Asam Baru Kec. Danau Seluluk X : 0631981 Y : 09734798	25/7/2016	641.6/051/KONT RAK-CK/V/2016	15/12/2016	Pembelian	207.050.000,00
70	Tidak	Beton	252	Kec. Batu Ampar X ; 0628570 Y; 9748561	1/8/2016	641.6/036/KONT RAK-CK/V/2016	21/12/2016	Pembelian	313.671.000,00
71	Tidak	Tidak	235	Kec. Seruyan Hilir Timur X ; 0681297 Y; 09628434	25/7/2016	641.6/046/KONT RAK-CK/V/2016	21/12/2016	Pembelian	206.950.000,00
72	Tidak	Tidak	368	Kec. Seruyan Tengah - Kab. Seruyan X : 0623578 Y : 9788211	27/10/2016	641.6/062/KONT RAK-CK/X/2016	27/12/2016	Pembelian	508.537.000,00
73	Tidak	Tidak			20/7/2016	03333/SP2D-LS/BM/V/2016	27/12/2016	Pembelian	34.500.000,00
74	Tidak	Beton		Rantau Pulau, Kec. Seruyan Tengah - Kab. Seruyan	16/9/2016	645.6/074/KONT RAK-CK/X/2016	27/12/2016	Pembelian	149.800.000,00
75	Tidak	Beton		Kec. Seruyan Tengah - Kab. Seruyan	16/9/2016	645.6/075/KONT RAK-CK/X/2016	27/12/2016	Pembelian	8.300.000,00
76	Tidak	Beton	280	Jl. A. Yani Kuala Pembuang	27/7/2016	641.6/055/KONT RAK-CK/V/2016	27/12/2016	Pembelian	279.000.000,00
77	Tidak			Desa Bangkal Kec. Seruyan Raya	18/7/2017	610/86/SPK-SDA/V/2017	18/7/2017	Pembelian	29.500.000,00
78	Tidak			Mugi Penyuhu	4/7/2017	622.5/273/V/BM.2017	4/7/2017	Pembelian	122.500.000,00
79	Tidak			Kec. Suling Tambun	11/9/2017	610/95/SPK-SDA/X/2017	11/9/2017	Pembelian	29.700.000,00
80				Desa Tumbang Manjul	27/12/2017	12721/SP2DLS/1.03.01/12/2017	20/12/2017	Pembelian	39.215.000,00
81		Beton		Kuala Pembuang I Kec. Seruyan Hilir	13/11/2017	641.6/033/KONT RAK-CK/X/2017	21/12/2017	Pembelian	199.532.000,00
82	Tidak			Sel. Seruyan di Desa Baung	29/8/2017	622.5/063/V/BM.2016	29/8/2017	Pembelian	744.287.000,00
83	Tidak			Kec. Danau Seluluk, Seruyan Raya dan Danau Sembuluh	13/11/2017	621/125/KONTRA K-CK/X/2017	13/11/2017	Pembelian	39.617.000,00
84	Tidak				30/10/2017	610/138/SPK-SDA/X/2017	30/10/2017	Pembelian	39.680.000,00
85	Tidak			Kec. Batu Ampar	13/11/2017	621/127/KONTRA K-CK/X/2017	13/11/2017	Pembelian	39.765.000,00
86	Tidak			Kec. Suling Tambun dan Seruyan Hulu	13/11/2017	621/076/KONTRA K-CK/X/2017	13/11/2017	Pembelian	49.571.000,00
87	Tidak			Kec. Batu Ampar, Kec. Seruyan Tengah, Kec. Seruyan Hulu dan Kec. Suling Tambun	15/11/2017	622.5/704/X/BM.2017	15/11/2017	Pembelian	49.577.000,00
88	Tidak			Kec. Danau Sembuluh, Kec. Seruyan Raya, Kec. Danau Seluluk, dan Kec. Hanau	14/11/2017	622.5/702/X/BM.2017	14/11/2017	Pembelian	49.577.000,00
89	Tidak			Kec. Seruyan Hilir dan Kec. Seruyan Hilir Timur	15/11/2017	622.5/703/X/BM.2017	15/11/2017	Pembelian	49.577.000,00
90	Tidak				30/10/2017	610/138/SPK-SDA/X/2017	30/10/2017	Pembelian	49.630.000,00
91	Tidak			Kec. Seruyan Tengah, Batu Ampar dan Hanau	13/11/2017	621/124/KONTRA K-CK/X/2017	13/11/2017	Pembelian	49.632.000,00
92	Tidak				14/11/2017	622.5/693/X/BM.2017	14/11/2017	Pembelian	49.640.000,00
93	Tidak			Kec. Suling Tambun dan Seruyan Hulu	6/11/2017	621/121/KONTRA K-CK/X/2017	6/11/2017	Pembelian	49.390.000,00
94	Tidak			Kota Kuala Pembuang	13/11/2017	621.5/075/KONT RAK-CK/X/2017	13/11/2017	Pembelian	49.555.000,00

No.	Kontruksi Dalam Pengerjaan		Luas (M2)	Lotak/ Lokasi/ Alamat	Dokumen		Tanggal Bulan tahun Mulai	Asal Ueul Pembayaan	Nilai Kontrak (Rp)
	Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95				Kec. Seruyan Hilir	13/3/2017	641.6/028/KONT RAK-CK/02/2017	25/12/2017	Hibah	19.646.000,00
96				Hanau	24/7/2017	641.6/018/KONT RAK-CK/VII/2017	27/12/2017	Pembelian	14.723.000,00
97				Kecamatan Suling Tambun	15/6/2017	641.6/010/KONT RAK-CK/VI/2017	27/12/2017	Pembelian	38.080.000,00
98				Dinas PU. Kab. Seruyan	19/6/2017	641.6/013/KONT RAK-CK/VI/2017	27/12/2017	Pembelian	29.370.000,00
99				Kantor Kecamatan	24/7/2017	641.6/020/KONT RAK-CK/VII/2017	27/12/2017	Pembelian	24.799.000,00
100				Kecamatan sendul	27/7/2017	641.6/008/KONT RAK-CK/V/2017	27/12/2017	Pembelian	49.550.000,00
101				Pagar Di Kecamatan	13/11/2017	641.6/039/KONT RAK-CK/XI/2017	27/12/2017	Hibah	49.252.000,00
102	Tidak			Jalan Soekarno - Hatta Kec. Seruyan Hilir	24/7/2017	641.6/019/KONT RAK-CK/VII/2017	24/7/2017	Pembelian	29.738.000,00
103	Tidak			Kec. Seruyan Hilir dan Kec. Seruyan Hilir Timur	30/5/2017	622.5/140W/BM.2 017	30/5/2017	Pembelian	24.900.000,00
104	Tidak			Kec. Seruyan Tengah, Batu Ampar dan Hanau	13/11/2017	621.5/073/KONT RAK-CK/ XI/2017	13/11/2017	Pembelian	39.490.000,00
105	Tidak			Kec. Danau Seluluk, Seruyan Raya dan Danau Sembuluh	13/11/2017	621.5/074/KONT RAK-CK/ XI/2017	13/11/2017	Pembelian	39.435.000,00
106	Tidak	Beton		Kab. Seruyan	30/12/2017	12722/tp2d/16/1.0 3.1.01/12/20	30/12/2017	Pembelian	49.115.000,00
107	Tidak	Beton		Jl. Kuala Pembuang-Sempit	29/8/2017	641.6/023/KONT RAK-CK/VIII/2017	31/12/2017	Pembelian	-
108	Tidak			Kec. Seruyan Hulu	22/10/2014	622.5/789/IX/BM. 2014	22/10/2014	Pembelian	49.000.000,00
109	Tidak	Tidak		Kab. Seruyan	4/4/2018	705/001/KONTRA K-CK-SOR/DPUPRI	4/4/2018	Pembelian	78.047.000,00
110	Tidak	Beton		Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan	9/4/2018	705/001/KONTRA K-CK-RMD/DPUPRI	9/4/2018	Pembelian	20.746.000,00
111	Tidak	Beton	16	Kec. Hanau E: 02°29'604" E:112°06'548" - 02°29'610" E: 112°06'583" - 02°29'611" E :112°06'605" - 02°29'606" E: 112°06'605"	2/5/2018	610/33/SPK-SDA/DPUPRV/2 018	2/5/2018	Pembelian	232.290.000,00
112	Tidak	Tidak		desa Irawan Kab. Seruyan	3/7/2018	690/16/UPTD-AB/KONTRAK/DI SPUV	3/7/2018	Pembelian	97.500.000,00
113	Tidak	Tidak		Kab. Seruyan	3/7/2018	690/15/UPTD-AB/KONTRAK/DI SPUV	3/7/2018	Pembelian	97.000.000,00
114	Tidak	Beton	619	Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan	11/7/2018	640/003/KONTRA K-CK-RMD/DPUPRV	11/7/2018	Pembelian	318.000.000,00
115	Bertingkat	Beton		Kec. seruyan hilir Kab. Seruyan S.03.23°170" E:112.33°090"	3/8/2018	640/018/KONTRA K-CK-GK/DPUPRVI	3/8/2018	Pembelian	996.081.131,00
116	Tidak	Tidak	0	Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan	18/12/2019	705/054/KONTRA K-CK-GK/DPUPRXI	18/12/2019	DAU	99.456.000,00
117	Tidak	Tidak	0	Kabupaten Seruyan	8/4/2019	700/10/KONTRA K-UPTD.AB/DPUP RI	8/4/2019	DAU	99.269.500,00



No.	Kontruksi Dalam Pengerjaan		Luas (M2)	Letak/ Lokasi/ Alamat	Dokumen		Tanggal Bulan tahun Mulai	Asal Usul Pembiayaan	Nilai Kontrak (Rp)
	Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	Tidak	Tidak	0	Kabupaten Seruyan	8/4/2019	700/09/KONTRA K-UPTD.AB/DPUPRI	8/4/2019	DAU	99.544.500,00
119	Tidak	Tidak	0	Kab. Seruyan	11/2/2019	705/006/KONTRA K-CK-GRG/DPUPRI	11/2/2019	DAU	34.743.500,00
120	Tidak	Tidak	0	Kabupaten Seruyan	11/11/2019	610/100/KONTRA K-SDA/DPUPRI/2	11/11/2019	DAU	99.561.000,00
121	Tidak	Tidak	0	Kabupaten Seruyan	11/11/2019	610/101/KONTRA K-SDA/DPUPRI/2	11/11/2019	DAU	99.445.500,00
122	Tidak	Beton	0	Kab. Seruyan	20/8/2019	640/038/KONTRA K-CK-GK/DPUPRI	20/8/2019	DAU	199.800.000,00
123	Tidak	Tidak	0	Kab. Seruyan	11/2/2019	705/004/KONTRA K-CK-GRG/DPUPRI	11/2/2019	DAU	83.270.000,00
124	Tidak	Tidak	0	Kab. Seruyan	11/2/2019	705/007/KONTRA K-CK-GRG/DPUPRI	11/2/2019	DAU	23.785.500,00
129	Tidak	Tidak	0	Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan	13/11/2019	650/03/KONTRA K-TR/DPUPRI/201	13/11/2019	DAU	99.577.500,00
130	Tidak	Tidak	0	Kec. Seruyan Hilir Timur Kab. Seruyan S:3201730025 E:112354947065	12/8/2019	640/007/KONTRA K-CK-SOR/DPUPRI/V	12/8/2019	DAU	1.305.488.359,68
<b>Jumlah</b>									<b>114.649.268.306,68</b>

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN XV**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**DAFTAR ASET LAINNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal 2019	Saldo Akhir 2019
1	2	3	4
1	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	1.214.126.400,00	710.619.238,00
2	Tagihan Penjualan Angsuran	1.703.618.475,00	1.703.618.475,00
3	Tuntutan Ganti Rugi	49.828.671.689,78	49.757.492.038,03
4	Aset Tak Berwujud	16.572.638.250,00	9.997.613.250,00
5	Aset Lain-Lain	74.094.018.281,00	78.518.998.396,00
<b>Jumlah</b>		<b>143.413.073.095,78</b>	<b>140.688.341.397,03</b>

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN XVI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**DAFTAR DANA CADANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NIHIL							
<b>Jumlah</b>								

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN XVII**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

(dalam rupiah)

No.	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal Kewajiban 2019	Saldo Akhir Kewajiban 2019
1	2	3	4
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	4.648.783.850,00	727.254.238,00
2	Utang Bunga	-	-
3	Pendapatan Diterima Dimuka	98.297.262,50	930.289,20
3	Utang Beban	14.129.331.232,55	2.181.057.716,11
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.648.783.850,00	727.254.238,00
<b>JUMLAH</b>		<b>18.876.412.345,05</b>	<b>2.809.242.243,31</b>

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**



**LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

(dalam rupiah)

No.	Rincian Kewajiban Jangka Panjang	Saldo Awal Kewajiban 2019	Saldo Akhir Kewajiban 2019
1	2	3	4
	NIHIL		
	JUMLAH		

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN XIX**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA**  
**YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI**  
**DALAM TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KODE REKENING KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	JUMLAH REALISASI TAHUN N-2, TAHUN N-1 DAN TAHUN N			JUMLAH AKUMULASI REALISASI s.d AKHIR TAHUN 2019 (Rp)	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA
			REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)	8
JUMLAH			.	.	.	.	.

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN XX**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

KETERANGAN	MODAL HIBAH	PENYERTAAN PEMERINTAH DAERAH	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	TOTAL EKUITAS
<b>Saldo Per 31 Desember 2017</b>	295.238.537,00	18.360.761.833,00	-7.612.391.682,00	11.043.608.688,00
Penambahan Penyertaan Pemerintah Daerah	-	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	-	-	-760.645.425,00	-760.645.425,00
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2018</b>	295.238.537,00	21.360.761.833,00	-8.373.037.107,00	13.282.963.263,00
Penambahan atau koreksi	44.400.000,00	0,00	44.400.000,00	0,00
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	-	-	1.344.814.341,00	1.344.814.341,00
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2019</b>	250.838.537,00	21.360.761.833,00	-6.983.822.766,00	14.627.777.604,00

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**